



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2005-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang merupakan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah maka Pemerintah Kota Balikpapan perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil makmur;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3364);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALIKOTA BALIKPAPAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2005-
2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kota Balikpapan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah perumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Kota Balikpapan periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kota Balikpapan.
- (2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJP Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 mengacu kepada RPJP Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Daerah Kota Balikpapan.

Pasal 4

Berpedoman kepada RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 pada setiap tahap 5 (lima) Tahunan, sejalan dengan pergantian Walikota akan disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan.

Pasal 5

RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berisi:

- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab III. Analisis Isu-Isu Daerah
- Bab IV. Visi dan Misi Daerah
- Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- Bab VI. Kaidah Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) RPJP Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Walikota.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Walikota berikutnya.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Walikota berikutnya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Semua ketentuan yang berkaitan dengan RPJM Daerah sepanjang belum dilakukan perubahan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) RPJM Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah Provinsi yang telah disesuaikan dengan RPJP Nasional paling lambat 6 (enam) bulan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 4 April 2013

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 5 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2013 NOMOR 1



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
BAB - I. PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I - 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I - 5
1.3.1 Hubungan Dokumen Perencanaan Nasional dengan RPJP Kota Balikpapan.....	I - 6
1.3.2 Hubungan Dokumen Perencanaan Provinsi Kalimantan Timur dengan RPJP Kota Balikpapan.....	I - 6
1.3.3 Hubungan Dokumen RPJPD Kota Balikpapan dengan RTRW Kota Balikpapan.....	1 - 6
1.3.4 Hubungan Dokumen RPJP Daerah Kota Balikpapan dengan RPJP dan RTRW Kabupaten Perbatasan.....	1 - 7
1.4. Sistematika Penulisan.....	I - 8
1.5. Maksud dan Tujuan.....	I - 10
BAB - II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II - 1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II - 1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II - 1
2.1.1.1. Kondisi Fisik Lingkungan.....	II - 1
2.1.1.2. Iklim dan Kualitas Udara.....	II - 3
2.1.1.3. Tutupan Lahan dan Penggunaan Lahan.....	II - 4
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah.....	II - 6
2.1.3. Mitigasi Bencana.....	II - 20
2.1.4. Demografi.....	II - 36
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II - 39
2.2.1. Kesejahteraan Sosial	II - 39
2.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	II - 40
2.2.1.2. Pendapatan Perkapita.....	II - 42
2.2.1.3. Distribusi Pendapatan.....	II - 43
2.2.1.4. Investasi.....	II - 44
2.2.1.5. Inflasi.....	II - 46
2.2.1.6. Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (UKM).....	II - 47



	2.2.1.7. Perindustrian.....	II - 50
	2.2.1.8. Prasarana Dan Sara Perdagangan.....	II - 51
	2.2.1.9. Energi.....	II - 54
	2.2.2. Aspek Kesehatan.....	II - 55
	2.2.3. Aspek Pendidikan.....	II - 57
	2.2.4. Aspek Daya Beli.....	II - 58
	2.2.5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).....	II - 58
	2.2.6. Keamanan dan Ketertiban.....	II - 60
	2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II - 60
	2.4. Aspek Daya Saing.....	II - 76
BAB - III.	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....	III - 1
	3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	III - 1
	3.2. Isu Strategis.....	III - 32
BAB - IV.	VISI DAN MISI DAERAH.....	IV - 1
	4.1. Visi.....	IV - 1
	4.2. Misi.....	IV - 5
BAB - V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	VI - 1
	5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan.....	V - 1
	5.1.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing.....	V - 1
	5.1.2. Menyediakan Infrastruktur Kota Yang Memadai.....	V - 6
	5.1.3. Mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan Lingkungan.....	V - 8
	5.1.4. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif.....	V - 9
	5.1.5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintah Yang Baik.....	V - 10
	5.2. Tahapan Dan Prioritas.....	V - 13
	5.2.1. RPJMD Tahap I (2005 – 2009).....	V - 13
	5.2.2. RPJMD Tahap II (2010 – 2014).....	V - 21
	5.2.3. RPJMD Tahap III (2015-2019).....	V - 31
	5.2.4. RPJMD Tahap IV (2020-2024).....	V - 42
BAB - VI.	KAJIAN PELAKSANAAN.....	VI - 1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Topografi (Ketinggian) Tahun 2010.....	II - 2
Tabel 2.2	Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci menurut Kelerengan Tahun 2010.....	II - 2
Tabel 2.3	Rata-Rata Suhu, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Tahun 2005-2011.....	II - 4
Tabel 2.4	Luas Tutupan Lahan Kota Balikpapan Tahun 2011.....	II - 5
Tabel.2.6	Kebijakan Ruang Kota Balikpapan.....	II - 7
Tabel 2.7	Rencana Pola Ruang Kota Balikpapan Tahun 2012-2032.....	II - 8
Tabel.2.8	Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah.....	II - 19
Tabel.2.9	Kegiatan Pembangunan Infrastruktur BUMN.....	II - 19
Tabel.2.10	Kejadian Bencana Tahun 2010.....	II - 22
Tabel.2.11	Kejadian Bencana Tahun 2011.....	II - 23
Tabel.2.12	Kejadian Bencana Tahun 2012.....	II - 24
Tabel.2.13	Sebaran Kawasan Rawan Longsor Berdasarkan Pembagian Zona.....	II - 26
Tabel.2.14	Kriteria dan Indikator Rawan Banjir.....	II - 28
Tabel.2.15	Kawasan Rawan Banjir Kota Balikpapan.....	II - 29
Tabel.2.16	Jenis Penyakit Utama Yang Di Derita Penduduk.....	II - 31
Tabel 2.17	Pertumbuhan Penduduk Kota Balikpapan.....	II - 36
Tabel 2.18	Distribusi Penduduk per Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2011.....	II - 37
Tabel 2.19	Indeks Pembangunan Manusia menurut Kecamatan, Tahun 2011.....	II - 40
Tabel 2.20	Perkembangan PDRB Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2005 – 2011.....	II - 41
Tabel 2.21	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan Dengan Dan Tanpa Migas	II - 41
Tabel 2.22	Perkembangan dan Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Penduduk Kota Balikpapan, Tahun 2005 – 2011.....	II - 43
Tabel 2.23	Distribusi Pendapatan dan Indeks Gini di Kota Balikpapan Tahun 2005 s/d 2011..	II - 44
Tabel 2.24	Nilai Investasi Swasta Nasional, PMA – PMDN & Pemerintah Kota Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu.....	II - 45
Tabel 2.25	Tingkat Inflasi Kota Balikpapan per Tahun 2005-2011.....	II - 46
Tabel 2.26	Klasifikasi Koperasi di KOTA BALIKPAPAN Tahun 2005 – 2011.....	II - 48

Tabel 2.27	Perkembangan UMKM di Kota Balikpapan mulai Tahun 2005 s/d 2011.....	II - 49
Tabel 2.28	Perkembangan Sektor Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2011.....	II - 50
Tabel 2.29	Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan di Kota Balikpapan Tahun 2005 s.d 2011.....	II - 51
Tabel 2.30	Nama Pasar Modern Dan Tradisional Menurut Kecamatan Kota Balikpapan Tahun 2011.....	II - 52
Tabel 2.31	Jumlah Pedagang dan pengelola pasar menurut wilayah tahun 2011	II - 53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan RPJP, RPJM dan RTRW...	I-7
Gambar 2.2 Diagram Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan.....	II-3

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1 Jumlah Kasus Diare Berdasarkan Puskesmas (2011).....	II - 34
Grafik 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Tahun (2005-2011).....	II - 36
Grafik 2.3 Perkembangan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kota Balikpapan Tahun (2005-2011).....	II - 37
Grafik 2.4 Distribusi Penduduk per Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2011.....	II - 38
Grafik 2.5 Struktur Utama Penduduk Di Kota Balikpapan Tahun 2011.....	II - 39
Grafik 2.6 Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan Dengan dan Tanpa Migas.....	II - 42



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses mendasar untuk menetapkan sasaran sekaligus menetapkan pula bagaimana cara pencapaian sasaran tersebut. Untuk itu, diperlukan penetapan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dan selanjutnya dirumuskan pula proses perencanaannya. Dari sisi kurun waktu proses perencanaan tersebut meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan) sesuai dengan masa capaian dari setiap sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini berkesesuaian dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pemerintah daerah diharuskan menyusun Perencanaan Jangka Panjang (dua puluh tahun), Jangka Menengah (lima tahun), dan Pembangunan Tahunan.

Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2006 telah menyusun materi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2026. Namun materi RPJPD ini belum ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Selama ini secara materi, RPJPD Kota Balikpapan 2006-2026 ini pada dasarnya telah dipedomani untuk menyusun berbagai produk perencanaan daerah lainnya yaitu RPJMD Kota Balikpapan 2006-2011, RPJMD Kota Balikpapan 2011-2016 dan RTRW Kota Balikpapan 2012-2032. Oleh karena itu Pemerintah Kota

Balikpapan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Balikpapan agar memiliki legitimasi secara hukum.

Sehubungan dengan perkembangan pembangunan Kota Balikpapan dan diterbitkannya berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan RPJPD menuntut tidak hanya semata-mata diperlukan penetapan peraturan daerah tentang RPJPD, namun diperlukan pula *review* materi RPJPD Kota Balikpapan tersebut. Hal ini sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

RPJP Daerah ini disusun dalam rangka menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif untuk jangka waktu dua puluh tahunan. Dokumen perencanaan ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RPJPD merupakan dokumen perencanaan skala makro kurun waktu dua puluh tahunan, mencakup empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang memuat pentahapan pelaksanaan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Disisi lain RPJPD ini merupakan pula dokumen perencanaan yang mencakup empat rencana pembangunan lima tahunan yang memuat pentahapan pembangunan.

Sebagai acuan mendasar yang dipergunakan dalam penyusunan RPJPD ini adalah rumusan visi, misi dan arah kebijakan umum yang merupakan kesepakatan seluruh pemangku kepentingan di Kota Balikpapan yang dilaksanakan melalui mekanisme Musrenbang RPJPD. Disamping itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diacu pula RPJP Nasional, RPJP Provinsi Kalimantan Timur, RTRW Nasional, RTRW Provinsi Kalimantan Timur dan RTRW Kota Balikpapan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);

11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
13. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan dokumen RPJP Kota Balikpapan mengacu, mempedomani, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJP Nasional, RPJP Propinsi, Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan. Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari proses penyusunan dokumen RPJP Kota Balikpapan dapat menghasilkan dokumen rencana yang sinergis dan terpadu baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah.

Kota Balikpapan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis, baik secara nasional maupun regional provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dapat dilihat pada dokumen RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Kalimantan Timur serta RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, berikut jenjang perencanaan lainnya.

1.3.1 Hubungan Dokumen Perencanaan Nasional dengan RPJP Kota Balikpapan

Sesuai dengan RTRW Nasional 2008-2028, Balikpapan merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN). Disamping itu Kota Balikpapan ditetapkan sebagai pusat penyebaran kegiatan ekonomi yang skala pelayanannya meliputi wilayah Balikpapan sendiri, Kutai, Penajam Pasir Utara, Samarinda, Bontang, dan beberapa Kota/Kabupaten di sekitarnya serta menjadi salah satu pusat pendukung ekonomi secara nasional.

1.3.2 Hubungan Dokumen Perencanaan Provinsi Kalimantan Timur dengan RPJP Kota Balikpapan

Dalam konteks Kalimantan Timur, Kota Balikpapan dalam *hierarchi* pusat pelayanan ditetapkan sebagai Kota Orde I. Secara ekonomi Kota Balikpapan merupakan pula bagian penting dari kawasan pembangunan ekonomi terpadu (KAPET) Sasamba yang meliputi Samarinda, Samboja, Muara Jawa dan Balikpapan.

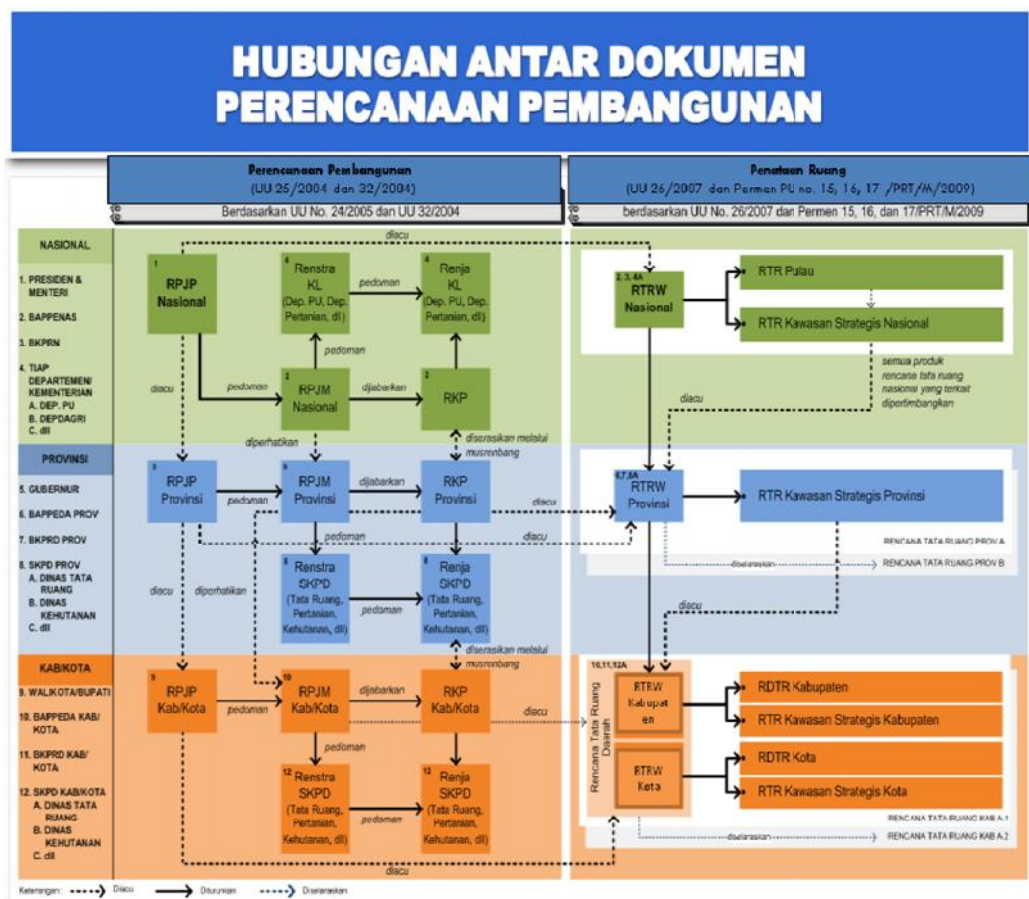
1.3.3 Hubungan Dokumen RPJPD Kota Balikpapan dengan RTRW Kota Balikpapan

RPJPD Kota Balikpapan adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan sampai tahun 2025. Adapun RTRW merupakan pedoman dalam pemanfaatan ruang kota agar dapat menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sampai tahun 2025. Jadi, sinkronisasi dan sinerginitas substansi maupun implementasi kedua produk tersebut menjadi syarat utama yang tidak boleh bertentangan.

1.3.4 Hubungan Dokumen RPJP Daerah Kota Balikpapan dengan RPJP dan RTRW Kabupaten Perbatasan

Penelaahan RTRW dan RPJPD Kabupaten perbatasan bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi dan keterpaduan struktur dan pola ruang dengan daerah perbatasan dalam rangka pembangunan jangka panjang antar daerah.

Hubungan antar dokumen, baik hirarkhi rencana pembangunan maupun dalam hubungannya dengan rencana tata ruang disemua tingkatan pemerintahan tergambar dalam skema berikut ini.



Gambar.1-1

Gambar : Hubungan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan RPJP, RPJM dan RTRW

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya, Sistematika Penulisan dan Maksud dan Tujuan;

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah dan yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu dua puluh tahun.

Dalam Gambaran Umum Kondisi Daerah disajikan mencakup :

- 2.1 Aspek Geografis dan Demografi;
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum;
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah;

BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Menguraikan prediksi kondisi Kota Balikpapan pada periode 20 (dua puluh tahun) kedepan dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan berdasarkan hasil sintesa, mencakup;

- 3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah;
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH

Visi, Misi dan arah Pembangunan Kota Balikpapan terdiri :

4.1 Visi :

“Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota 5 Dimensi: Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan & Budaya dalam Bingkai Madinatul Iman“

4.2 Misi :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
2. Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai;
3. Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan;
4. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif;
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik;

Dari Misi tersebut ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk dua puluh tahun mendatang.

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

TAHUN 2005-2025

- 5.1 RPJM Ke-1 (2005 – 2009)
- 5.2 RPJM Ke-2 (2010 – 2014)
- 5.3 RPJM Ke-3 (2015 – 2019)
- 5.4 RPJM Ke-4 (2020 – 2024)

1.5. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah secara partisipatif melalui rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, isi dan substansinya disusun dengan maksud sebagai berikut :

- 1) Sebagai pedoman pembangunan jangka panjang daerah bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi;
- 2) Menyajikan gambaran kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai selama 20 (dua puluh) tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah;
- 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara pusat dengan daerah;
- 4) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- 5) Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan ke dalam RPJM Daerah;
- 6) Memberi kemudahan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan lima tahunan.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Kondisi Fisik Lingkungan

Secara administratif luas keseluruhan Kota Balikpapan menurut RTRW Tahun 2012-2032 adalah 81.495 Ha, yang terdiri dari luas daratan 50.330,57 Ha dan luas lautan 31.164,03 Ha.

Secara geografis Kota Balikpapan terletak pada posisi 116,5° Bujur Timur dan 117,0° Bujur Timur serta diantara 1,0° Lintang Selatan dan 1,5° Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan 7 Kelurahan dalam wilayah Kota Balikpapan dan Perda Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan, secara administratif wilayah Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan.

Secara umum Kota Balikpapan berada pada ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Klasifikasi terbesar yaitu berada pada ketinggian 20-100 mdpl dengan luas 20.090,57 ha atau 51,66 % dari luas

wilayah, ketinggian >10-20 mdpl seluas 17.260 ha atau 34,17% dari luas wilayah dan ketinggian 0-10 mdpl seluas 6.980 Ha atau 13 % dari luas wilayah. Berikut tabel luas wilayah Kota Balikpapan dirinci menurut topografi (ketinggian) Tahun 2010.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Topografi (Ketinggian) Tahun 2010

No	Ketinggian mdpl	Luas Wilayah	
		(Ha)	(%)
1.	0-10	6.980,00	13
2.	>10-20	17.260,00	34,7
3.	>20-100	26.090,57	51,66
Jumlah		50.330,57	100,00

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka, 2011

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari 85% kawasan perbukitan dengan jenis tanah podsolik merah kuning yang memiliki karakter topsoil tipis, struktur tanah mudah tererosi. Sedangkan 15% lainnya merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan dengan jenis tanah umumnya adalah alluvial.

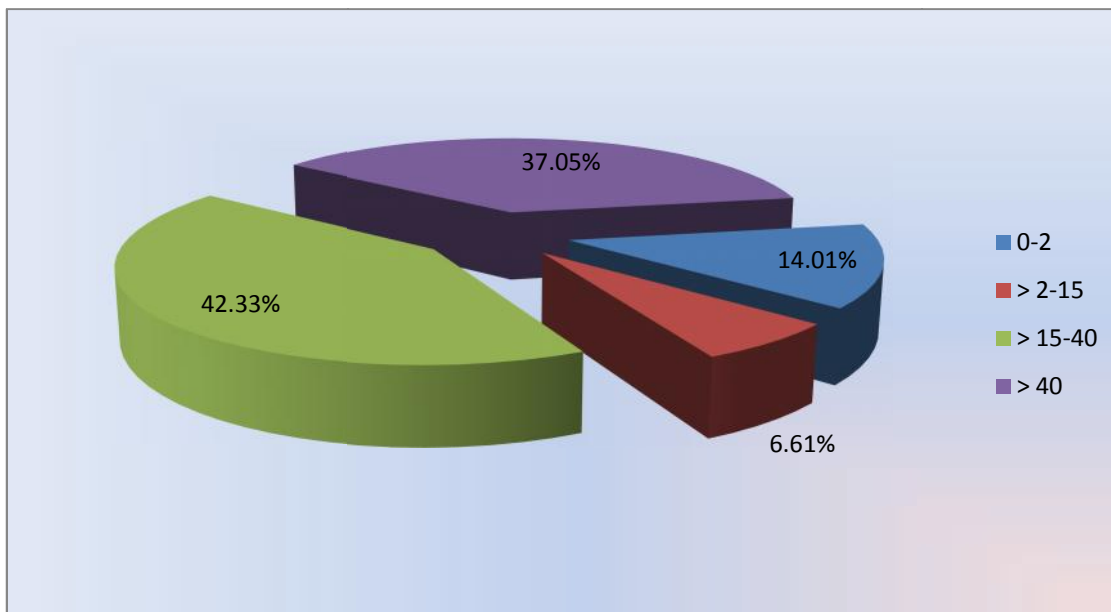
Dari sisi topografis sebagian besar wilayah Kota Balikpapan berada pada kemiringan lereng antara 15-40% yaitu seluas seluas 21.305,57 Ha atau 42,33% dari luas wilayah keseluruhan. Tabel 2.2 berikut ini menunjukkan rincian luas wilayah Kota Balikpapan berdasarkan kelerengan.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci menurut Kelerengan Tahun 2010

No	Kelas Lereng	Luas Wilayah	
		(Ha)	(%)
	(%)	(Ha)	(%)
1	0-2	7.050,00	14.01
2	> 2-15	3.325,00	6.61
3	> 15-40	21.305,57	42.33
4	> 40	18.650,00	37.05
Jumlah		50.330,57	100,00

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka, 2011

Gambar 2.1
Diagram Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan



Sumber : Analisis Penyusun Revisi RTRW Kota Balikpapan, 2012

2.1.1.2. Iklim dan Kualitas Udara

Kota Balikpapan beriklim tropis, mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah yang ada di Kalimantan Timur pada umumnya, yaitu tidak adanya perbedaan antara musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada Bulan Mei sampai Bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada Bulan November sampai dengan Bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan (pancaroba) pada bulan-bulan tertentu. Selain itu, karena letaknya di daerah katulistiwa maka iklim di Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh angin Muson, yaitu angin Muson barat pada periode Nopember - April dan Angin Muson Timur pada periode Mei - Oktober.

Suhu udara Kota Balikpapan sepanjang tahun berkisar dari 21,7°C sampai 34,7°C. Selain itu, sebagai daerah beriklim tropis, Kota Balikpapan mempunyai kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar antara 82-91%.

Curah hujan di Kota Balikpapan sangat beragam. Rata-Rata curah hujan tertinggi dan terendah selama tahun 2009 yang tercatat pada stasiun

meteorologi Kota Balikpapan masing-masing sebesar 64,4 mm dan sebesar 338,0 mm.

Keadaan angin di Kota Balikpapan pada tahun 2009 yang dipantau dari Stasiun Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kota Balikpapan, menunjukkan bahwa kecepatan angin berkisar antara 4 sampai 6 knot. Kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Juli dan kecepatan terendah terjadi pada bulan Maret, April, Oktober, November dan Desember.

Tabel 2.3
Rata-Rata Suhu, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Tahun 2005-2011

No	Uraian	Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Suhu Udara (°C)	34,7	34,6	35,7	32,6	34,4	28,2
	- Maksimum	22,4	22,7	22,1	22,8	21,7	26,3
	- Minimum						
2.	Kelembaban Udara (%)	87,0	84,8	85,9	90,00	85,00	86,7
3.	Tekanan Udara (mb)	1.011,3	1010,8	1010,1	1010,5	1010,9	1.019,4
4.	Kecepatan Angin (Knot)	5,3	6,3	5,1	5,0	5,0	6,0
5.	Curah Hujan (mm/th)	2384,4	2887,1	2823,1	3785,0	2212,8	2.998,0
6.	Penyinaran Matahari (%)	47,0	46,9	40,00	38,0	47,7	52,5

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka Tahun 2011

2.1.1.3. Tutupan Lahan dan Penggunaan Lahan

Secara umum rencana penggunaan lahan Kota Balikpapan berupa lahan tidak terbangun dengan luas 26,316.46 Ha (52,29 %) dari luas wilayah Kota Balikpapan, sedangkan lahan terbangun seluas 24,014.11Ha (47.71 %) dari luas wilayah darat Kota Balikpapan.

Walaupun secara umum penggunaan lahan didominasi oleh hutan namun tutupan lahannya dominan berupa semak belukar. Hal ini dikarenakan karakteristik morfologis Kota Balikpapan berupa perbukitan dengan topsoil yang rendah dan kemiringan lereng yang curam menyebabkan vegetasi yang tumbuh didominasi oleh semak belukar. Berikut adalah tabel luas tutupan lahan Kota Balikpapan Tahun 2011:

Tabel 2.4 :
Luas Tutupan Lahan Kota Balikpapan Tahun 2011

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas Penggunaan (Ha)	Prosentase (%)
1	Hutan Alami	3,844.19	7.64
2	Hutan Bekas Terbakar	4,541.20	9.02
3	Hutan DAS Manggar	2.24	0.00
4	Hutan Eksisting Sungai Wain	3,262.23	6.48
5	Hutan Kota	88.24	0.18
6	Agro Wisata	52.96	0.11
7	Rawa-Rawa	308.16	0.61
8	Sekat Bakar	98.87	0.20
9	Semak Belukar	16,092.81	31.97
10	Mangrove	2,342.66	4.65
11	Area Hijau	3,044.51	6.05
12	Perkebunan Tanaman Keras	1,689.44	3.36
13	Perkebunan Tanaman Pangan	748.19	1.49
14	Kebun Campuran	2,019.22	4.01
15	Ladang/Tegalan	37.96	0.08
16	Lahan Terbuka	1,428.18	2.84
17	PT. INHUTANI	1,560.64	3.10
18	Lapangan Olahraga	139.28	0.28
19	Bendali	87.21	0.17
20	Waduk	273.99	0.54
21	Blok Pemanfaatan Terbatas	1,380.07	2.74
22	IPAL	0.23	0.00
23	Kawasan Bandara Sepinggian	286.70	0.57
24	Kawasan Industri	66.06	0.13

25	Kawasan Industri Pertamina	339.37	0.67
26	Kawasan Militer	132.82	0.26
27	Kawasan Wisata	11.19	0.02
28	Permukiman	6,216.14	12.35
29	TPA Manggar	5.59	0.01
30	Tambak	230.22	0.46
	Jumlah	50,330.57	100.00

Sumber : Analisis Penyusun Revisi RTRW Kota Balikpapan, 2012

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan yang diarahkan sebagai Pusat Pelayanan Primer di Provinsi Kalimantan Timur yaitu pusat yang melayani wilayah Provinsi Kalimantan Timur, wilayah Kalimantan bagian utara dengan wilayah internasional dan wilayah Kalimantan bagian timur dengan wilayah nasional. Kota Balikpapan memiliki fungsi kegiatan sebagai:

- a) Pusat pemerintahan kota,
- b) Pusat perdagangan regional,
- c) Pusat industri,
- d) Pusat transportasi udara internasional,
- e) Pusat pengolahan migas.

Dari penetapan ruang seperti tersebut maka arah dan strategi pengembangan ruang wilayah Kota Balikpapan mengarah ke kawasan Perdagangan dan Jasa Regional, dan Industri Pengolahan sebagai faktor dan elemen pembentuk ruang. Hal ini didasarkan:

- a) Kota Balikpapan merupakan pintu gerbang Wilayah Indonesia Timur. Hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai PKN dan potensinya sebagai kota jasa, kota transit yang dilengkapi dengan fasilitas jasa dan transportasi. Balikpapan sebagai Gerbang Wilayah/Regional ditandai dengan keberadaan Bandara Internasional atau pelabuhan laut utama serta pelabuhan pengumpan regional yang lengkap dibanding kawasan lain di Kalimantan bahkan Wilayah Indonesia Timur;

- b) Balikpapan merupakan simpul utama kegiatan di Kalimantan Timur. Mengingat kota ini merupakan jalur distribusi dan outlet dari dan ke kabupaten/kota dan Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 secara umum tujuan dan kebijakan ruang di Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel.2.6.
Kebijakan Ruang Kota Balikpapan

Tujuan penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Berdimensi industri, perdagangan, jasa dan pariwisata budaya dan pendidikan • Berwawasan lingkungan • Berkelanjutan
Konsep fungsi kota	Terwujudnya Kota Balikpapan Sebagai Kota Industri, Perdagangan dan Jasa yang dinamis, selaras dan hijau.
Kebijakan struktur tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> Ñ Peningkatan pelayanan perkotaan dan perdesaan serta pusat pertumbuhan ekonomi yang merata; Ñ Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah.
Kebijakan pola ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan kawasan industri yang berwawasan lingkungan • Pengembangan kawasan komersial di pusat-pusat pertumbuhan baru • Konservasi dan rebitalisasi warisan budaya buatan (<i>built heritage</i>) dan alam (<i>Natural Herritage</i>) • <i>Foresting the city</i> dalam rangka <i>cleaning</i> dan <i>cooling the air</i> • <i>Zero waste</i> • <i>Conserving water supply</i>
Kebijakan pengembangan prasarana wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pengembangan infrastruktur dalam rangka mempercepat pertumbuhan kawasan • Percepatan pengembangan insfrastruktur yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (<i>ecological and sustainable</i>)

Sumber : RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan 2012-2032, pengembangan Pusat Pelayanan Kota Balikpapan adalah meliputi kawasan kota lama di Balikpapan Selatan, rencana pusat kota ke-2 Karang Joang di Balikpapan Utara dan rencana pusat kota ke-3 Teritip di Balikpapan Timur.

Guna mewujudkan penataan ruang Kota Balikpapan yang *Vibrant, Harmony and Green*, maka ditetapkan rencana pola ruang sebagaimana tabel 2.7.

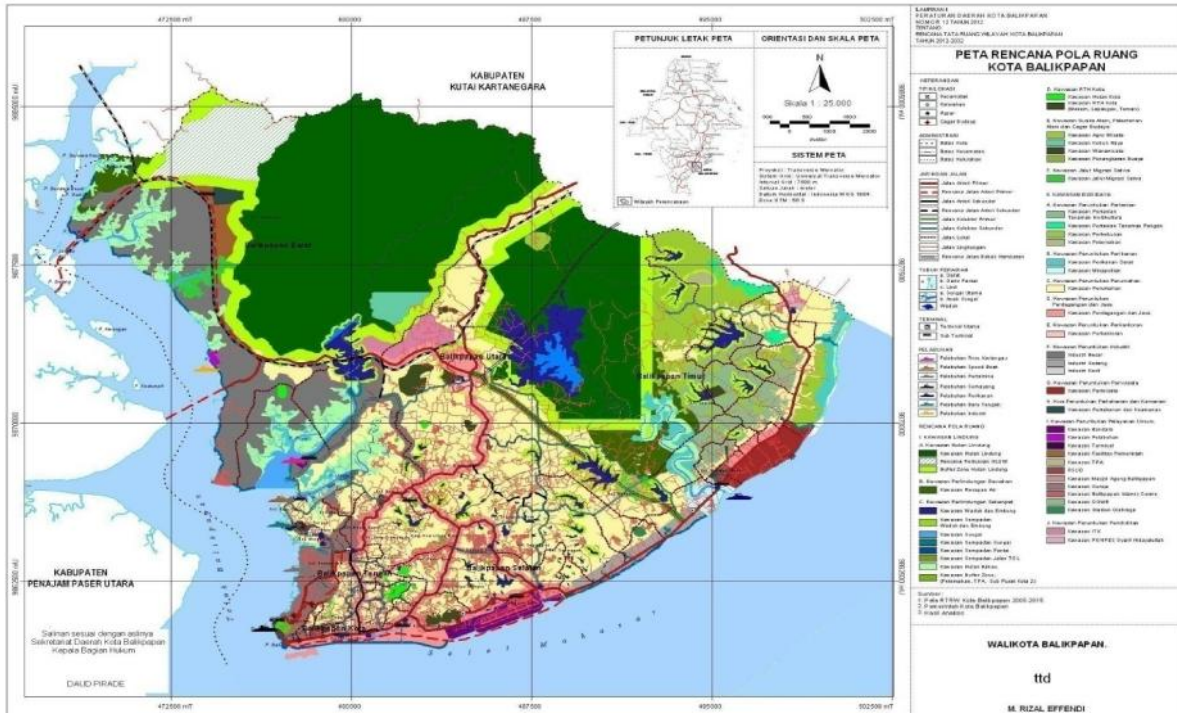
Tabel 2.7.
Rencana Pola Ruang Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

NO.	LAND USE	LUAS	PERSENTASE
A	KAWASAN LINDUNG		
	Kawasan Hutan Lindung		
1	Kawasan Hutan Lindung (13,379.07 Ha), Perluasan HLSW (1,402.39 Ha)	14,781.46	28.96
	Kawasan Perlindungan dibawahnya		
2	Kawasan Resapan Air	920.00	1.80
	Kawasan Perlindungan Setempat		
3	Kawasan Buffer Zone	4,391.18	8.60
	<i>a. HLSW (1766.53 Ha), HLSM (1243.35)</i>	3,009.88	5.90
	<i>b. TPA</i>	4.95	0.01
	<i>c. bendali/embung</i>	955.94	1.87
	<i>d. Peternakan Teritip</i>	32.78	0.06
	<i>e. waduk wain (160.52 Ha), waduk teritip (138.12 Ha)</i>	298.64	0.59
	<i>f. sub pusat kota ke-2</i>	86.51	0.17
	<i>g.KIKS</i>	2.47	0.00
4	Kawasan Sempadan Jalan TOL	229.69	0.45
5	Kawasan Sempadan Pantai	317.76	0.62
6	Kawasan Sempadan Sungai	160.03	0.31
7	Kawasan Waduk dan Embung	1,914.22	3.75
8	Kawasan Hutan Bakau	1,859.41	3.64
	Kawasan Ruang Terbuka Hijau		
9	Kawasan Hutan Kota	224.91	0.44
10	Kawasan RTH Kota	302.95	0.59
	Kawasan Suaka Alam, Perlindungan Alam, Cagar Budaya		
11	Kawasan Agro Wisata	67.84	0.13
12	Kawasan Kebun Raya	254.76	0.50
13	Kawasan Penangkaran Buaya	4.22	0.01
14	Kawasan Wanawisata	19.16	0.04
	Kawasan Migrasi Satwa		
15	Kawasan Jalur Evakuasi Satwa	196.50	0.39

16	Sungai	672.39	1.32
	Jumlah A	26,316.46	52.29
B	KAWASAN BUDIDAYA		
	Kawasan Perumahan		
1	Kawasan Perumahan	10,779.86	21.42
	Kawasan Perdagangan dan Jasa		
2	Kawasan Perdagangan dan Jasa	1,869.50	3.71
	Kawasan Perkantoran		
3	Kawasan Perkantoran	90.09	0.18
	Kawasan Industri		
4	Kawasan Industri Besar	4,736.99	9.41
5	Kawasan Industri Kecil	2.97	0.01
6	Kawasan Industri Sedang	384.91	0.76
	Kawasan Pertanian		
7	Kawasan Pertanian Tanaman Hortikultura	1,251.67	2.49
8	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	145.45	0.29
9	Kawasan Peternakan	58.06	0.12
10	Kawasan Perkebunan	2,076.18	4.13
	Kawasan Perikanan		
11	Kawasan Perikanan	582.19	1.16
	Kawasan Wisata		
12	Kawasan Pariwisata	458.99	0.91
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan		
13	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	264.47	0.53
	Kawasan Pelayanan Umum		
14	Kawasan Balikpapan Islamic Centre	14.87	0.03
15	Kawasan Bandara	372.06	0.74
16	Kawasan DOME	4.87	0.01
17	Kawasan Fasilitas Pemerintah	215.49	0.43
18	Kawasan Gereja	1.22	0.00
19	Kawasan Masjid Agung	0.94	0.00
20	Kawasan Minapolitan	190.56	0.38
21	Kawasan Pelabuhan	29.23	0.06
22	Kawasan Persampahan	18.17	0.04
23	Kawasan Rumah Sakit	0.93	0.00
24	Kawasan Stadion	24.45	0.05
25	Kawasan Terminal	13.46	0.03
	Kawasan Pendidikan		
26	Kawasan ITK	340.73	0.68
27	Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah	85.83	0.17
	Jumlah B	24,014.11	47.71
	Total (A+B)	50,330.57	100.00

Sumber : RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032

Gambar.2.2
Rencana Pola Ruang Kota Balikpapan Tahun 2012-2032



Sumber : RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032

Perbedaan kondisi geografis wilayah mengakibatkan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki, sehingga berdampak pada perbedaan komoditi unggulan yang diusahakan di setiap wilayah. Oleh karena itu Kota Balikpapan memiliki komoditi unggulan yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah, baik sektor pertanian maupun dari sektor Industri pengolahan yang memanfaatkan bahan baku hasil pertanian.

Diantara komoditi-komoditi unggulan yang dimiliki masing-masing wilayah di Kota Balikpapan, terdapat beberapa komoditi yang menjadi unggulan tidak hanya di tingkat Kota Balikpapan tetapi sampai ke tingkat Provinsi dan Nasional. Komoditi-komoditi tersebut diantaranya dapat dikategorikan sebagai komoditi khas Kota Balikpapan. Khususnya komoditi unggulan tersebut dapat dilihat dari jenis komoditinya yang hanya dihasilkan atau sebagian besar produksinya terpusat di Kota Balikpapan, dan juga dapat dilihat dari cita rasa yang dimiliki berbeda dengan komoditi yang sama yang dihasilkan daerah lain.

Komoditi-komoditi khas yang menjadi unggulan di Kota Balikpapan diantaranya dari sektor pertanian yaitu pepaya mini, karet, salak, nenas.

Sementara dari sektor Industri diantaranya industri kerajinan manik-manik dan batu permata, industri rumput laut.

a. Perikanan.

Wilayah pesisir laut Kota Balikpapan masih menyimpan potensi sumberdaya yang terbaharui (***renewable resources***) khususnya potensi sumber daya perikanan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu kawasan pesisir dan laut juga memiliki berbagai fungsi ekonomi, antara lain dipergunakan untuk aktivitas pemanfaatan sumberdaya perikanan, pertambangan, pertanian, rekreasi dan pariwisata, kawasan industri, permukiman serta pelabuhan / transportasi. Agar pemanfaatan sumberdaya tersebut dapat optimal diperlukan upaya terpadu untuk pengelolannya dengan melibatkan peran serta seluruh stakeholder dibidang perikanan dan kelautan.

Pembangunan yang berbasis potensi daerah menjadi relevan untuk dikaji dan didorong pengembangannya. Dalam hal ini Kota Balikpapan yang memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar bisa memainkan peran strategis dalam menopang dan membangun pondasi ekonomi kota yang kuat. Arti dan peran strategis penting sektor perikanan dan kelautan dalam pembangunan diantaranya :

- 1) Sumberdaya disektor perikanan dan kelautan merupakan sumberdaya yang selalu dibaharui (*renewable resources*) sehingga bertahan dalam jangka panjang asal diikuti dengan pengelolaan yang aktif.
- 2) Investasi disektor perikanan dan kelautan memiliki efisiensi dan daya serap tenaga kerja relatif tinggi
- 3) Produk perikanan dan kelautan memiliki prospek pasar yang baik dengan pangsa pasar yang terus meningkat.
- 4) Industri di sektor perikanan dan kelautan memiliki keterkaitan yang kuat dengan industri – industri yang lain.
- 5) Sumberdaya laut yang besar baik kuantitas maupun diversitas, bukan hanya di perairan Balikpapan, tetapi juga perairan Selat Makasar.

- 6) Produk ekspor perikanan dan kelautan memiliki daya saing yang tinggi sebagaimana dicerminkan dari bahan baku yang dimilikinya serta produksi yang dihasilkannya.

Pada umumnya masyarakat nelayan Kota Balikpapan masih mengandalkan kegiatan perikanan tangkap sampai sekarang, sedangkan kapasitas ruang dan volume ikan semakin berkurang. Hal ini disebabkan kualitas perairan semakin menurun, kerusakan ekosistem yang terus meningkat. Akibatnya ketersediaan nutrisi alam di perairan mengalami keterbatasan sehingga sumberdaya laut berupa ikan, kerang-kerangan, udang dan lain-lain tidak mampu bertahan sampai dapat dikonsumsi.

Salah satu komitmen yang perlu digalakkan oleh Kota Balikpapan untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan meningkatnya income masyarakat nelayan Balikpapan adalah dengan mengalihkan kegiatan penangkapan selama ini ditekuni ke bentuk usaha budidaya berbagai jenis biota laut yang cocok untuk dikembangkan. Pengembangan sektor perikanan budidaya di Kota Balikpapan memiliki proses yang baik dilihat dan ketersediaan lahan dan potensi pemasarannya. Wilayah perairan yang memiliki potensi untuk pengembangan budidaya perikanan adalah perairan Kariangau sampai Manggar, Teritip dan Lamaru. Jenis Budidaya ikan selama ini dilakukan dalam tambak dan karamba jaring apung. Disisi lain pada kawasan pesisir dan lautan Kota Balikpapan sangat potensial untuk dikembangkan budidaya ikan yang mempunyai nilai ekonomis penting selain udang dan bandeng adalah ikan kerapu (kerapu tiks, kerapu macan, kerapu sunu, dan kerapu lumpur) maupun rumput laut dan jenis kerang-kerangan.

b. Industri

Posisi strategis dan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Kota Balikpapan menjadikan visi pembangunan kota kedepan sebagai sentra jasa, perdagangan dan industri, sehingga perlu ditunjang dengan keberadaan prasarana dan sarana yang memadai serta terciptanya

kondisi dan situasi yang kondusif untuk memacu pertumbuhan dunia usaha kecil. Melihat visi dan perkembangan kota yang cukup pesat, maka pengembangan kota diarahkan kepada sektor-sektor ekonomi yang potensial dan mempunyai unggulan, termasuk industri kecil/ rumah tangga yang pada saat ini tersebar di beberapa wilayah Kota Balikpapan. Pengembangan IK/IRT pada saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia, merupakan refleksi dari pemberdayaan ekonomi kerakyatan, namun demikian keberadaannya di pusat perkotaan akan menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan hidup akibat pengolahan hasil produksi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Pemerintah Kota Balikpapan sejak tahun 1994 melalui Program Jangka Menengah menyusun rencana Relokasi Industri kecil/rumah tangga yang pada tahap I diprioritaskan pada pengrajin tahu/tempe Balikpapan. Pada tahun 1995 telah mulai dilakukan pembangunan berbagai fasilitas KIKS tetapi pada tahun 1997 mengalami penundaan akibat pengaruh krisis moneter. Kemudian sejak tahun 2000 dilakukan lagi pembangunan sarana/prasarana yang pada tahap awal Perumnas ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan rumah produksi dan rumah tinggal yang telah selesai sebanyak 50 unit. Proyek Relokasi Industri ini berlaku di Sumber km.3,5 kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas lahan 9 ha yang mempunyai daya tampung 150 - 200 pengusaha industri kecil, lokasi proyek telah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Balikpapan tahun 1994-2004 (pada saat lokasi KIKS ditetapkan).

c. Pariwisata

Dalam pengembangan sektor Pariwisata Kota Balikpapan mempunyai cukup banyak potensi dan sebagian besar merupakan wisata alam dan Peninggalan Sejarah. Rincian wisata dan lokasi adalah sebagai berikut:

- **Wisata Alam Bukit Bangkirai**

Wisata alam Bukit Bangkirai merupakan wisata petualangan yang berada di dalam kawasan hutan primer bukit Bangkirai, dapat ditempuh 90 menit atau 58 km dari Kota Balikpapan. Kawasan ini merupakan bagian dari kawasan hutan-hutan tropis yang ada di Kalimantan Timur seluas hampir 15 juta ha. Dalam kawasan ini selain keasrian hutan alamnya juga terdapat jembatan tajuk (canopy bridge) dan beberapa jenis burung surga (drongos) dan burung enggang (richoneros) yang sangat langka. Tempat ini juga untuk kepentingan riset dan observasi alam lainnya serta dilengkapi dengan fasilitas akomodasi berupa cottage yang dapat disewa oleh pengunjung.

- **Penangkaran Buaya**

Penangkaran buaya ini terletak di Kelurahan Teritip dengan luas areal 4 ha. Jumlah buaya yang ada di penangkaran ini berjumlah 3.000 ekor yang terdiri dari tiga macam jenis, yaitu Buaya Muara, Buaya Supit dan Buaya Air Tawar. Tempat ini terbuka untuk umum setiap hari dari pukul 08.00 - 17.00. Lokasi ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua atau empat, juga dengan kendaraan umum yaitu angkutan kota No. 7 dengan jarak 27 km dari pusat kota Balikpapan.

- **Meriam Peninggalan Jepang**

Meriam peninggalan Tentara Jepang ini berada di kawasan Asrama Bukit, Kelurahan kampung Baru Ilir (sidodadi) dengan jarak 8 km dari pusat kota. Meriam ini menggambarkan bahwa Balikpapan pada saat Perang Dunia II merupakan tempat yang strategis untuk pertahanan. tempat ini memiliki areal seluas 2.500 m². Dari tempat ini dapat dilihat pemandangan kota Balikpapan, Kilang Minyak dan teluk Balikpapan.

- **Kilang Minyak**

Kilang minyak Balikpapan terletak di tepi Teluk Balikpapan, meliputi areal seluas 2.5 km². Kilang ini terdiri dari unit Kilang Balikpapan 1

dan unit Kilang Balikpapan II. Kilang Balikpapan 1 dibangun sejak tahun 1922 dan dibangun kembali pada tahun 1948 dan mulai beroperasi tahun 1950. Sedangkan Kilang Balikpapan II dibangun tahun 1980 dan resmi beroperasi 1 Nopember 1983. Tugas Kilang Balikpapan mengolah minyak mentah menjadi produk-produk yang siap dipasarkan, yaitu BBM dan Non BBM. yang memenuhi kebutuhan dalam negeri khususnya kawasan Timur Indonesia. Lokasi kilang terletak di Jl. Minyak yang berhadapan langsung dengan teluk Balikpapan.

- **Monumen Perjuangan Rakyat**

Monumen ini terletak di Jl. Jend. Sudirman tepatnya di depan kantor Makodam VI Mulawarman, didepan pantai dan berada di pusat kota. Monumen ini menggambarkan keberanian rakyat melawan penjajah.

- **Wanawisata Km. 10**

Taman ini terletak di Km. 10 Jl. Soekarno Hatta 15 menit naik kendaraan dari pusat kota Balikpapan. Tempat ini adalah taman Arboretum yang dibangun oleh PT. Inhutani I Unit Balikpapan. Di dalam taman ini ditanam berbagai jenis pohon dan buah-buahan langka, juga terdapat penangkaran Rusa Sambar (*Servus Unicolor*) dan trek-trek (jalur) untuk berolahraga jogging serta areal camping di alam terbuka dengan lingkungan yang asri. Taman wisata ini dibuka setiap hari dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua ataupun roda empat, juga tersedia angkutan kota.

- **Taman Bekapai**

Taman ini terletak di Jl. Jend. Sudirman di depan kantor PLN. Di tengah taman terdapat sebuah patung / monumen yang terbuat dari bahan stainless steel yang menggambarkan keluarnya semburan minyak dari perut bumi. Dari dalam patung tersebut air mancur yang pada malam hari didukung oleh pencahayaan yang sangat indah. Lokasi sangat cocok untuk bersantai bersama keluarga.

- **Hutan Lindung Sungai Wain**

Hutan Lindung Sungai Wain merupakan salah satu hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai Hutan Lindung dengan luas areal 9.872 Ha. Sungai Wain sepanjang 18.300 m dengan airnya yang jernih, di kiri kanannya terdapat deretan hutan bakau. Habitat binatang yang terdapat di Hutan Lindung Sungai Wain mulai dari ikan, kepiting, burung, kera, orang utan dan lain sebagainya. Pemanfaatan sungai ini juga sebagai sumber air bersih bagi Perumahan Pertamina dan Kilang Minyak yang ada di Kota Balikpapan.

- **Tugu Australia**

Tugu yang terletak di Jl. Jend. Sudirman yang berdekatan dengan pantai Strand Banua Patra ini memiliki luas areal 725 m² adalah sebuah tugu peringatan sebagai tanda kehormatan bagi Tentara Australia (pasukan Divisi VII Australia) yang gugur melawan Tentara Jepang. Tempat ini mudah dicapai dengan semua jenis kendaraan ataupun angkutan kota.

- **Pantai Manggar Segara Sari**

Pantai dengan luas 13.000 m² dengan air laut yang jernih, riak gelombang yang kecil serta pasir yang putih, merupakan tempat yang nyaman bagi mereka yang ingin bermain, berlayar maupun volley pantai. Tempat ini dibuka untuk umum mulai pukul 06.00 - 18.00, dapat dicapai dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum nomor 7. Lokasi pantai ini berada di Kelurahan Manggar dan Teritip dengan jarak 9 km dari Bandara Sepinggian atau 22 km dari pusat kota Balikpapan.

- **Pantai Melawai**

Pantai yang terletak di Jl. Jend. Sudirman dekat dengan Pulau Tukung, tempat dimana para pedagang menjual berbagai macam masakan - minuman yang nikmat dengan harga yang relatif murah. Pengunjung dapat duduk bersantai, bersantap diatas tikar sambil

menikmati deburan ombak dan melihat kapal-kapal yang berlayar, lego jangkar maupun yang sedang menurunkan muatan di pelabuhan laut Semayang. Lokasi ini buka mulai pukul 17.00 - 20.30.

- **Taman Agro Wisata**

Taman ini diresmikan pada tanggal 17 Desember 1997 oleh mantan Wakil Presiden RI Tri Sutrisno. Dengan areal seluas 100 Ha, terletak di Jl. Soekarno Hatta Km. 23. Di dalam taman ini pengunjung dapat menikmati jenis-jenis tanaman tropis. Disamping itu juga terdapat peristirahatan atau piknik dengan fasilitas antara lain : Rumah Panjang (Lamin) yang terbuka untuk berteduh dengan ornamen Dayak, tempat berkemah dengan pemandangan yang alami serta Play Ground. Tempat ini dibuka untuk umum setiap hari dan dapat dikunjungi dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, juga terdapat angkutan kota.

- **Tugu Peringatan Jepang**

Terletak di Kelurahan Lamaru 26 km dari pusat kota. Tugu ini dikelilingi oleh hutan dan perkebunan yang indah. Monumen yang terbuat dari batu dengan tulisan Kanki. Didirikan sebagai tanda penghormatan kepada Tentara Jepang yang gugur dalam perang Dunia II. Wisatawan Jepang secara rutin mengunjungi tempat ini pada saat-saat tertentu untuk melakukan penghormatan dengan ritual keagamaan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Kota Balikpapan mengemban fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN). Adapun fungsi dan peran Kota Balikpapan dalam konteks perwilayahan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Balikpapan sebagai Pusat Kegiatan Nasional.

Aktivitas-aktivitas yang ada di Kota Balikpapan diarahkan mempunyai skala pelayanan tingkat nasional serta diarahkan untuk dapat menjadi wilayah maju

dan mempunyai peran dominan terhadap perkembangan perekonomian Negara Indonesia. Beberapa kegiatan yang mempunyai skala pelayanan tingkat nasional adalah status Balikpapan yang merupakan produsen komoditi industri pengolahan minyak (1,3 juta ton) dalam lingkup nasional. Produsen dan konsumen komoditi industri pengolahan non migas (852 ribu dan 679 ribu ton) dengan lingkup antar pulau dan nasional. Dalam RTRW Provinsi disebutkan pula bahwa kota Balikpapan diarahkan sebagai Pusat Pelayanan Orde I, sehingga Balikpapan berfungsi sebagai pusat yang melayani seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Wilayah Nasional/Internasional. Adapun fungsi utama Kota Balikpapan sebagai Pusat Pelayanan Orde I yaitu:

- a). Pusat Perdagangan dan Jasa Regional.
- b). Pusat Distribusi dan kolektor barang dan jasa regional.
- c). Pusat Pelayanan Jasa Transportasi Laut, Udara, Sungai dan Darat.
- d). Pusat Industri Pengolahan.
- e). Pusat Pelayanan Jasa Pariwisata.

2. Peran Balikpapan sebagai lokasi Pelabuhan Laut Internasional

Untuk mendukung fungsi Kota Balikpapan sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) maka keberadaan sarana prasarana pendukung segala aktivitas yang berlangsung dalam wilayah PKN itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka diwilayah Kota Balikpapan dikembangkan Pelabuhan Laut Internasional sebagai *transit point* distribusi barang skala nasional dan internasional. Kondisi ini didukung oleh lokasi Kota Balikpapan yang berbatasan langsung dengan laut yang merupakan ALKI II.

3. Peran Balikpapan sebagai Kawasan Lindung Nasional, yang memiliki:

- a. Hutan Lindung S. Wain seluas 9.872,9 Ha.
- b. Hutan Lindung S. Manggar seluas 4.999 Ha.

4. Kawasan Andalan yang berada di kawasan Bontang-Samarinda Tenggarong-Balikpapan, Penajam dan sekitarnya dengan aktivitas seperti:

- a. Industri
- b. Perkebunan
- c. Pertambangan
- d. Kehutanan
- e. Perikanan
- f. Pariwisata

5. Peran Kota Balikpapan Sebagai Pendukung MP3EI

Kota Balikpapan merupakan kota yang strategis dalam Master Plan Pengembangan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI), mengingat di wilayah Kota Balikpapan terdapat kegiatan ekonomi utama untuk minyak dan gas dikoridor Ekonomi Kalimantan direncanakan terdapat di lokus Balikpapan berupa proyek-proyek utama seperti penambahan kapasitas produksi BBM dan berbagai pembangunan infrastruktur yang mendukung Kalimantan sebagai koridor III dalam pengembangan perekonomian nasional.

Adapun kegiatan-kegiatan penting yang ada di Kota Balikpapan dalam kaitannya dengan MP3EI tersebut tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel.2.8.
Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah

No	Proyek MP3EI	Nilai Investasi (IDR Miliar)	Periode mulai	Periode selesai
1.	Pembangunan jembatan Pulau Balang bentang panjang 1.314 meter	3.600	2013	2015
2.	Pengembangan pelabuhan Internasional Balikpapan yaitu Terminal Peti Kemas Kariangau	713	2008	2012
3.	Pembangunan fasilitas pelabuhan Penajam Pasir Utara dan kariangau/Balikpapan	598	2015	-
4.	Pembangunan jembatan pulau balang bentang pendek 470 meter	488	2008	2014
5.	Pembangunan waduk Wain untuk kebutuhan air baku	290	2012	2015

Tabel.2.9.
Kegiatan Pembangunan Infrastruktur BUMN

No	Proyek MP3EI	Nilai Investasi (IDR Miliar)	Periode mulai	Periode selesai
1.	Bandara Balikpapan	1.600	2011	2013
2.	Pembangunan Pembangkit listrik Kaltim-PLN	7.270	2011	2015

3.	Pembangunan fasilitas transmisi kelistrikan di Kaltim-PLN	1.035,16	2011	2015
----	---	----------	------	------

2.1.3. Mitigasi Bencana

Kota Balikpapan termasuk dalam kepulauan Kalimantan yang secara geologis merupakan daerah relative stabil karena pada posisi cekungan belakang (*back arc basin*). Batuan penyusun yang mempunyai daya kohesif rendah dengan topografi 85% berbukit sangat rentan terhadap bahaya gerakan tanah baik itu longsoran, amblesan maupun nendatan. Gerakan tanah ini biasanya berasosiasi dengan patahan atau sesar. Sesar di Kota Balikpapan dijumpai di sekitar Jln. Mayjen Sutoyo, Prapatan dan di Kampung Damai. Kondisi ini menyebabkan beberapa wilayah Kota Balikpapan rentan terhadap bahaya longsor dan amblesan.

Data dan Informasi kejadian bencana di Kota Balikpapan pada tahun 2006 - 2009 adalah sebagai berikut:

1. Bencana Alam

a. Banjir

Bencana Banjir terjadi pada tahun 2006 sebanyak 5 kali akibat curah hujan sangat tinggi, kondisi air pasang dan drainase yang berfungsi tidak optimal. Tidak ada bencana banjir pada tahun 2007-2009, akan tetapi kembali terjadi banjir besar pada tahun 2012.

b. Angin Puting Beliung

Angin puting beliung umumnya terjadi pada setiap tahun dengan kapasitas yang berbeda-beda. Keadian bencana angin puting beliung yang relatif besar dampak negatifnya terjadi pada tahun 2006.

c. Longsor

Longsor terjadi pada tahun 2007 yang mengakibatkan 2 orang korban dan tahun 2012 yang mengakibatkan 2 orang korban.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dalam rentan tahun 2010-2012 (hingga mei 2012) terjadi 520 kejadian bencana yang ditanggulangi oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dengan uraian tahun 2010 dengan 343 kejadian, pada tahun 2011 dengan 111 kejadian dan tahun 2012 sebanyak 67 kejadian. Dari seluruh kejadian terbagi menjadi bencana rawan bencana, kebaran dan bencana non alam/ulah manusia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Kejadian Bencana Tahun 2010

PENGGOLONGAN JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN TAHUN 2010												Jumlah	Keterangan
	Jan	Peb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des		
BENCANA ALAM														
Angin Topan/P.beliung/Siklon	3	'	-	-	-	2	-	-	'	'	'	1	6	
Tanah Longsor di Pemukiman	1	2	1	1	'	'	6	'	'	'	'	2	13	3 orang MD
Pohon tumbang Akibat Hujan	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	
Wabah Penyakit	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249	januari wabah dengue
Kebakaran (Pengolongan kebakaran menurut Kejadian)														
Pemukiman	'	3	1	2	2	'	3	2	5	4	3	4	29	
Sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	
Sarana Kesehatan Umum	'	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
Gudang	1	-	-	-	1	-	-	'	'	1	1	1	5	
Kios/ lapak	-	-	2	-	-	2	'	1	'	'	'	'	5	
Kantor	-	-	-	-	-	-	'	'	'	'	'	1	1	
Hutan ,Ladang	1	6	2	'	-	1	'	'	'	'	'	'	10	
Kapal laut	-	-	-	1	-	-	'	'	'	1	'	'	2	
Hotel	-	-	'	-	-	-	1	1	'	'	'	'	2	
Ledakan Tabung GAS / gas liar	-	-	-	'	-	-	-	'	1	1	'	'	2	
Bencana Non Alam /Ulah Manusia														
Musibah Orang Tenggelam	'	1	-	-	-	2	-	-	2	-	2	'	7	
Jumlah	261	13	6	4	3	7	10	4	9	8	6	12	343	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Tabel 2.11
Kejadian Bencana Tahun 2011

PENGGOLONGAN JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN TAHUN 2011												Jumlah
	Jan	Peb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
BENCANA ALAM													
Banjir Air	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	5
Angin Topan/P.beliung/Siklon	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Gelombang Pasang	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tanah Longsor di Pemukiman	1	1	-	1	-	1	-	-	3	-	-	-	7
Pohon tumbang Akibat Hujan	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	5
Kebakaran (Pengolongan kebakaran menurut Kejadian)													
Pemukiman	1	3	4	1	3	3	5	7	1	-	-	-	28
Sekolah	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
Gudang	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Rumah Makan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kantor	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Hutan ,Ladang	-	-	-	-	2	1	4	22	3	-	-	-	32
Kendaraan roda 2 / roda 4 /roda 6/ roda10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
toko,swalayan mall,Pusat perbelanjaan	1	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	5
Batu Bara	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
Instalasi PLN ,gardu dan trafo jaringan	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
JUMLAH KEJADIAN PERBULAN	10	12	10	7	9	12	11	31	10	0	0	0	111

Tabel 2.12
Kejadian Bencana Tahun 2012

PENGGOLONGAN JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN TAHUN 2012					Jumlah	Keterangan
	Jan	Peb	Mart	Apr	Mei		
BENCANA ALAM							
Banjir Air	1	1	4	4	-	10	
Angin Topan/P.beliung/Siklon	-		1		-	1	
Tanah Longsor di Pemukiman	1	1	1		2	5	8 rmh rusak
Pohon tumbang Akibat Hujan	3	2	5	1	-	11	
Kebakaran (Pengolongan kebakaran menurut Kejadian)							
Pemukiman	5	8	5	3	2	23	2 orang MD
Gudang	-	-	1	-	-	1	
Kantor		1		-	-	1	
Hutan ,Ladang	1	1	3	-	2	7	
toko,swalayan mall,Pusat perbelanjaan		-		1	1	2	292 kios rusak
Instalasi PLN ,gardu dan trafo jaringan	2	1	1	2	-	6	
BENCANA GABUNGAN ALAM DAN ULAH MANUSIA							
Banjir Genangan air (akibat hujan sampah)	-	-	-	-	-	0	
Banjir Bandang (akibat hujan ,tanggul jebol)	-	-	-	-	-	0	
Tanah Longsor (akibat pengundulan Hutan dan hujan)	-	-	-	-	-	0	
Perahu nelayan tenggelam	-		-	-	-	0	
JUMLAH KEJADIAN PERBULAN	13	15	21	11	7	67	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

a. Banjir

Dari hasil tabel Overlay peta diatas maka didapat tingkat kerawanan bencana longsor per zona nya. Mayoritas Kawasan berada di kelas Rawan longsor sedang seluas 29.657 ha dan rawan longsor rendah seluas 20.028,94 ha. Luasnya kawasan rawan lonsor sedang diakibatkan tingginya sensitivitas batuan penyusun di kawasan yang tersusun oleh batuan dan terlihat banyak struktur retakan, lapisan batuan miring ke arah luar lereng. Selain itu juga karena berada dikawasan yang bercurah hujan tinggi dan berada di kawasan kelerengan yang sedang.

Terdapat kawasan rawan bencana longsor tinggi dengan luas mencapai 1.318,66 ha dan tersebar di Batu Ampar, Damai, Gunung Bahagia, Gunung Samarinda, Gunung Sari Ilir, Karang Joang (RT 4, 5, 7,11, 13, 14,16, 18,20,21, 22, 26 dan 35),Kariangau, Klandasan Ulu, Lamaru, Sepinggian, Teritip dan Tlaga Sari. Kawasan rawan bencana longsor yang tinggi ini dikarenakan kawasan yang berada di kelerengan denga tingkat lereng yang sedang dan curam, curah hujan yang tinggi, tingginya senstivitas batuan penyusun dan jenis tanah di kawasan yang tersusun oleh batuan dan terlihat banyak struktur retakan, lapisan batuan miring ke arah luar lereng, tata air yang tinggi sehingga menimbulkan sering muncul rembesan- rembesan air pada lereng dan kondisi kawasan yang menjadi hunian penduduk.

Dengan melihat analisis super impose peta di atas, maka perlu adanya penanganan dan perencanaan dalam menentukan arah pengembangan khusus pada kawasan dengan tingkat kelongsoran yang tinggi dengan memberikan limitasi pembatasan pengembangan dan atau pembebasan dari kegiatan budidaya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi beban lingkungan dan kondisi rawan longsor agar tidak terjadi kerusakan lingkungan dan korban jiwa. Tidak hanya pada kawasan dengan tingkat kelongsoran tinggi yang diperhatikan, kawasan tingkat kelongsoran sedangpun harus diperhatikan karena juga masih menyimpan potensi untuk longsor dan bila tidak dalam penanganan yang baik maka ada kemungkinan dapat berubah kelas menjadi kerawanan yang tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabe2.13
Sebaran Kawasan Rawan Longsor Berdasarkan Pembagian Zona

Zona	Rawan Longsor Tinggi		Rawan Longsor Sedang		Rawan Longsor Rendah	
	Lokasi	Luas (ha)	Lokasi	Luas (ha)	Lokasi	Luas (ha)
Zona A	Batu Ampar, Gunung Sari Ulu, Karang Joang, Kariangau, Lamaru, Sepinggian dan Teritip	255	Karang Joang, Batu Ampar, Gunung Sari Ulu, Prapatan, Lamaru dan Teritip	9.583,0	-	-
Zona B	Batu Ampar, Gunung Bahagia, Gunung Sari Ulu, Sepinggian, Sumber Rejo dan Tlaga Sari	472,05	Baru Ilir, Baru Tengah, Baru Ulu, Batu Ampar, Damai Gunung Bahagia, Gunung Samarinda, Sari Ilir, Karang Jati, Karang Joang, Karianagau, Lamaru, Manggar, Prapatan, Sepinggian, Sumbe Rejo, Teritip dan Tlaga Sari	10.290,06		
Zona C	Batu Ampar, Damai, Gunung Bahagia, Gunung Samarinda, Gunung Sari Ilir, Karang Joang, Kariangau, Klandasan Ulu,	591,61	Baru Ilir, Baru Tengah, Baru Ulu, Batu Ampar, Damai Gunung Bahagia, Gunung Samarinda,	9.784,22	Baru Ilir, Batu Ampar, Damai Gunung Bahagia, Gunung Samarinda, Gunung Sari	20.028,94

Zona	Rawan Longsor Tinggi		Rawan Longsor Sedang		Rawan Longsor Rendah	
	Lokasi	Luas (ha)	Lokasi	Luas (ha)	Lokasi	Luas (ha)
	Lamaru, Sepinggan, Teritip dan Tlaga Sari		Gunung Sari Iilir, Gunung Sari Ulu, Karang Joang, Karang Rejo, Kariangau, Klandasa Iilir, Klandasan Ulu, Lamaru, Manggar, Manggar Baru, Marga Sari, Margo Mulyo, Mekar Sari, Muara Rapak Prapatan, Sepinggan, Sumber Rejo, Tritip dan Tlaga Sari		Iilir, Gunung Sari Ulu, Karang Jati, Karang Joang, Karang Rejo, Kariangau, Klandasa Iilir, Klandasan Ulu, Lamaru, Manggar, Manggar Baru, Marga Sari, Margo Mulyo, Mekar Sari, Muara Rapak Prapatan, Sepinggan, Sumber Rejo, Teritip Tlagasari	

b. Banjir dan Genangan Banjir

Berdasarkan Karakteristik penyebab kawasan Kriteria Rawan Banjir secara garis besar terbagi menjadi 4 (empat) tipe, yaitu :

- a) Daerah pesisir / pantai
- b) Daerah dataran banjir (*floodplain*)
- c) Daerah sempadan sungai
- d) Daerah cekungan

Daerah pantai menjadi rawan banjir disebabkan daerah tersebut merupakan dataran rendah yang elevasi muka tanahnya lebih rendah atau sama dengan elevasi air laut pasang rata-rata (*Mean Sea Level / MSL*). Potensi banjir berasal dari aliran sungai yang bermuara di pantai dan terjadinya pasang air laut. Daerah sempadan

sungai merupakan daerah rawan bencana banjir yang berada sekitar 100 m di kiri - kanan sungai besar, dan 50 m di kiri - kanan anak sungai atau sungai kecil. Daerah dataran banjir (*floodplain area*) adalah daerah dataran rendah di kiri dan kanan alur sungai, yang elevasi muka tanahnya sangat landai dan relatif datar, sehingga aliran air menuju sungai sangat lambat, yang mengakibatkan daerah tersebut rawan terhadap banjir, baik oleh luapan air sungai maupun karena hujan lokal di daerah tersebut. Daerah cekungan merupakan daerah yang relatif cukup luas baik di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi (hulu sungai) dapat menjadi daerah rawan bencana banjir, bila penataan kawasan atau ruang tidak terkendali dan mempunyai sistem drainase yang kurang memadai. Daerah cekungan yang dilalui sungai, pengelolaan bantaran sungai harus benar- benar dibudidayakan secara optimal, sehingga bencana dan masalah banjir dapat dihindarkan.

Tab2.14
Kriteria dan Indikator Rawan Banjir

Faktor		Penilaian			Bobot
		Tinggi (3)	Sedang (2)	Rendah (1)	
Kondisi Alam	Topografi	Datar & Sedikit landai	Landai Agak Curam	Curam & berbukit	35
	Debit Aliran Air	>50m ³ /dt	> 10m ³ /dt	<10 m ³ /dt	5
	DPS	Tinggi	Sedang	Rendah	5
	Tingkat Permeabilitas	< 10 mm/dt	> 10 mm/dt	>27,7 mm/dt	5
	Muka Air	Tinggi	Sedang	Rendah	5
	Tingkat retensi air	Rendah	Sedang	Tinggi	10
Peristiwa Alam	Intensitas Hujan	>200 mm/th			20
Aktivitas Manusia	Penyedotan air tanah	Tak Terkendali	Kurang terkendali	Cukup terkendali	5
	Sistem Drainase	buruk	Cukup	baik	5
	Pemanfaatan ruang	Melanggar RTRW	Ada Pelanggaran RTRW	Sesuai RTRW	5

Sumber: Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kawasan Banjir

Keterangan:

<165 aman

166-230 sedang

>231 tinggi

Tabel 2.15
Kawasan Rawan Banjir Kota Balikpapan
Sesuai Dengan Kondisi Kriteria dan Indikatornya

Tingkat Kerawanan	Sebaran Lokasi	Luasan (ha)	KRB
Tinggi	Baru Ilir, Baru Tengah, Baru Ulu, Batu Ampar, Damai, Gunung Bahagia, Lamaru Gunung Samarinda, Gunung Sari Ilir, Gunungn sari ulu, Karang Jati, Karang Joang, Kariangau, Mangar, Manggar Baru, Marga Sari, Margo Mulyo, Muara Rapak, Prapatan, Sepinggian, Sumber Rejo, Teritip	3.755,97	Sempadan Sungai, Cekungan dan dataran banjir
Sedang	Baru Ilir, Baru Tengah, Baru Ulu, Batu Ampar, Damai, Gunung Bahagia, Gunung Samarinda, Gunung Sari Ulu, Gunung Sari Ilir, Karang Jati, Karang Joang, Karang Rejo, Kariangau, Klandasan Ilir, Klandasan Ulu, Lamaru, Manggar, Manggar Baru, Marga Sari, Margo Mulyo, Mekar Sari, Muara Rapak, Prapatan, Sepinggian, Sumber Rejo, Teritip dan Tlaga Sari.	45.122,33	Sempadan Sungai, Cekungan, Dataran Banjir dan Kawasan Pesisir
Aman	Batu Ampar, Gunung Bahagia, Damai, Gunung Sari Ulu, Karang Joang, Kariangau, Lamaru, Marga Sari, Margo Mulyo, Muara Rapak, Prapatan, Sepinggian, Teritip dan Tlaga Sari	604.88	

Sumber: Studi Rawan Bencana, Tahun 2012

Berdasarkan hasil analisis overlay super impose kawasan rawan banjir, Kota Balikpapan termasuk dalam kategori kerawanan tinggi, sedang dan aman. Mayoritas Kota Balikpapan berada dalam kondisi kerentanan banjir yang sedang, hal ini dikarenakan berada di Sempadan Sungai, Cekungan, Dataran Banjir dan Kawasan Pesisir yang dapat memberikan potensi banjir pada kawasan walaupun hanya

dalam tingkat sedang. Walaupun pada tingkat kerawanan yang sedang, bila ditidak di perhatikan dan terjadi penurunan lingkungan atau degradasi lingkungan dapat membuat kelas yang rawan banjir tingkat sedang menjadi kelas rawan banjir tingkat tinggi.

Sedangkan kondisi dengan tingkat kerawanan banjir Kota Balikpapan yang tinggi tersebar di Baru Ilir, Baru Tengah (RT 20 dan 23), Baru Ulu, Batu Ampar (RT,28, 42,47,48,77,78,84) Damai (RT 39), Gunung Bahagia (RT 36,37,84,85 dan 96), Gunung Samarinda (RT 31,53 dan 28), Gunung Sari Ilir, Gunung Sari Ulu(RT 20) Karang Jati (RT 14,16,17,18,21,22), Karang Joang, Lamaru (RT 2, 11 dan 12) Kariangau, Mangar (RT 39,40.42 dan 55), Manggar Baru (RT 5,15,16,17,18 dan 28) Marga Sari (RT 1,12,18,23) Margo Mulyo (RT 27 dan 41), Muara Rapak, Prapatan, Sepinggian (RT 35), Sumber Rejo (RT 44 dan 45), Teritip seluas 3.755,97. Kawasan yang mempunyai kerawanan banjir tinggi ini dikarenakan kawasan berada di daerah luapan sungai, cekungan limpasan air dan didukung dengan jenis tanah, daya resap air yang rendah dan kondisi drainase yang tidak optimal.

Kondisi aman dari banjir hanya tersebar seluas 604,88 ha, kawasan ini mayoritas merupakan kawasan dengan kelerengn curam.

2. Bencana Non-Alam

Kebakaran merupakan bencana non alam yang sering terjadi. Volume kejadian kebakaran pada tahun 2011 sebanyak 85 kali. Terjadi kenaikan kejadian kebakaran dari tahun 2006-2009. Pada tahun 2006 terjadi 6 kali kebakaran, meningkat menjadi 8 kali pada tahun 2007, pada tahun 2008 dan 2009 terjadi 12 kali kebakaran dan pada tahun 2010 sebanyak 57 kejadian.

3. Wabah Penyakit Menular

Kondisi kesehatan masyarakat dapat ditunjukkan langsung dengan data penyakit yang secara umum di derita penduduk Balikpapan dan memberikan sumbangan kepada salah satu faktor penyebab kematian pada penduduk Kota Balikpapan.

Tabel 2.16
Jenis Penyakit Utama Yang Diderita Penduduk

No	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita	% Terhadap Total Penduduk
1	Nasopharingitis Akuta (common cold) ISPA	59.927	31.83
2	Hipertensi Primer	37.154	19.73
3	Peny Pulpa & Jaringan Perapikal	20.068	10.66
4	Diare dan Gastroenteritis non spesifik	12.941	6.87
5	type 2: Non insulin dependen DM	10.989	5.84
6	Pharingitis	10.909	5.79
7	Dyspepsia	10.661	5.66
8	Infeksi akut lain pd sal pernafasan atas	9.967	5.29
9	Gastritis	8.886	4.72
10	Penyakit Gusi dan Jaringan Periodontal	6.774	3.60

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, 2011.

Beberapa penyakit akibat sanitasi buruk (bersumber dari Dinas Kesehatan) yaitu :

1. Penyakit Demam berdarah dengue di Kota Balikpapan pada tahun 2011 mengalami peningkatan jumlah kasus. Insiden Rate kasus DBD kota Balikpapan pada tahun 2011 mengalami penurunan (63,45. per 100.000) dibandingkan pada tahun 2010 (292,18 per 100.000) Namun dibandingkan standart nasional Insiden Rate nya (55/100.000 penduduk) kasus DBD di Kota Balikpapan masih lebih tinggi. Sedangkan *Case Fatality Rate* (CFR) Penyakit DBD di Kota Balikpapan tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2010. Adapun distribusi CFR DBD di kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

CFR DBD Tahun 2009-2011

Tahun	Jumlah		CFR %
	Kasus	Kematian	
2009	1.094	14	1,28
2010	1.796	7	0,39
2011	398	1	0,25

Sumber : Bid.P2PL

2. Penyakit Tuberkulosis Paru (P2 TB Paru)

Penyakit TB paru di Kota Balikpapan masih menjadi masalah kesehatan karena:

- Penemuan penderita TB dengan BTA (+) masih rendah
- Prosentase penularan tertinggi pada kelompok produktif
- Menyerang pada semua kelompok umur

Dari gambaran pencapaian program penanggulangan TB Paru di Balikpapan tahun 2011 menunjukkan pencapaian yang belum memuaskan dan memerlukan peningkatan.

Adapun gambaran hasil program penanggulangan Tb paru pada tabel dibawah ini

**Pencapaian Penanggulangan Penyakit TB Paru
Tahun 2009-2011**

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2009	2010	2011
1	Target suspek penderita	12.278	12.640	13.172
2	Jumlah suspek yang didapat	3.496	3.207	4.361
3	Angka konversi (%) kohort	90,48	86,00	88,72
4	Angka kesembuhan (%) kohort	80,89	87,87	87,87
5	Cross Check	0	0	2,7 %
6	Angka deteksi kasus	20,40	24,83	31,33

Sumber : Bid.P2PL

Jumlah puskesmas dengan program DOTS pada tahun 2011 sebesar 100% (26 puskesmas). Angka konversi pada tahun 2011 terdapat peningkatan di bandingkan dengan pencapaian tahun 2010. Jumlah penemuan TB BTA (+) tahun 2011(31,33 %) mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2010 (24,83 %). Sedangkan angka kesembuhan dalam 2 tahun terakhir bersifat stagnan (87,87 %) namun bila dibandingkan dengan tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 6,98%. Untuk meningkatkan cakupan penemuan kasus baru BTA (+) program penanggulangan penyakit TB, melakukan ekspansi ke Rumah Sakit dan melibatkan LSM peduli TB (PPTI) serta berkolaborasi dengan program P2 HIV untuk melakukan screening pada ODHA yang suspek TB.

Kasus TB Paru cukup tinggi di daerah slum area (daerah kumuh) dengan sanitasi perumahan dan populasi penduduk yang tinggi, diharapkan program aktif case finding selektif dapat dilaksanakan pada kontak serumah, lingkungan dan pada daerah tersebut diatas untuk mengoptimalkan penjarangan kasus TB Paru.

3. Penyakit Diare (P2 Diare)

Kasus diare di Balikpapan tergantung dengan musim dan bersifat situasional, saat musim menjelang kemarau dan menjelang hujan angka kasus cukup tinggi. Pada musim kemarau kasus diare meningkat tajam, hal tersebut dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas sarana air bersih. Penyakit diare juga dipengaruhi oleh perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) secara individu, terutama perilaku mencuci tangan saat makan dan jajan makanan yang tidak terjaga hygiene sanitasinya

Pencapaian Penanggulangan Penyakit Diare Tahun 2009-2011

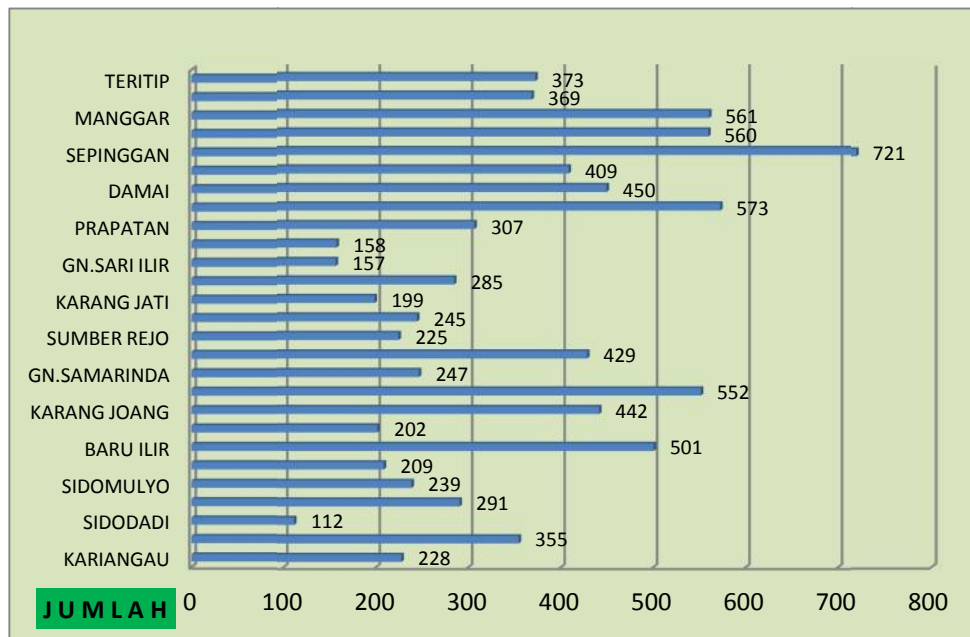
Tahun	Jumlah Penderita	Insiden Rate (IR) per 1000	
		Balikpapan	Nasional
2009	9.334	1,6	3,0
2010	10.517	3,8	4,8
2011	13.064	2,08	4,1

Sumber : Bid.P2PL

Berdasarkan tabel insiden rate diare di Kota Balikpapan tahun 2009-2011 mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan tetapi dibawah

target insiden rate (IR) nasional.

Grafik.2.1
Jumlah kasus diare berdasarkan Puskesmas (2011)



Sumber : Dinas Kesehatan, 2011

4. Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut adalah penyakit yang dipengaruhi oleh musim, tingkat sanitasi perumahan yang buruk dan status gizi. Jumlah penderita ISPA tiga tahun terakhir fluktuatif. Tahun 2009 terdapat 58.387 kasus, tahun 2010 meningkat menjadi 72.891 kasus dan tahun 2011 terjadi 61.950 kasus. Cakupan kasus ISPA dapat di lihat pada grafik di bawah ini.

**Pencapaian Penanggulangan Penyakit ISPA
Tahun 2009-2011**

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2009	2010	2011
1	Jumlah penderita ISPA	58.387	72.891	61.950
2	Target penemuan Pnemonia	5.591	6.076	6.076
3	Jumlah kasus Pnemonia	935	1.439	2.273
4	Penemuan pnemonia	16,72	23,68	37,40

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Balikpapan 2012

Berdasarkan tabel proporsi penemuan pneumonia pada balita tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010, kondisi ini menunjukkan tingkat kompetensi tenaga medis dalam mendiagnosa kasus pneumonia pada balita berdasarkan standarisasi semakin baik walaupun bila dibandingkan dengan target Nasional (70%) untuk penemuan kasus baru pneumonia, Kota Balikpapan masih rendah.

Masih banyaknya kasus penyakit sanitasi tersebut telah dijelaskan di atas disebabkan oleh pola hidup masyarakat yang kurang sehat, yang ditunjukkan perilaku:

1. Sebagian masyarakat masih membuang sampah di sungai, saluran drainase dan pekarangan rumah.
2. Masih rendahnya pola cuci tangan pakai sabun saat akan makan, menyiapkan makanan atau setelah membersihkan kotoran anak.

Tingginya penyakit infeksi terutama infeksi saluran pernafasan disebabkan banyaknya daerah kumuh (slum area) di Kota Balikpapan terutama pada kecamatan Balikpapan Selatan dan Balikpapan Tengah. Keadaan ini menciptakan kemudahan dari kuman pathogen untuk menginfeksi penduduk yang kondisi perumahannya kurang sehat.

5. Penyakit Zoonosis (Flu Burung)

Selain wabah penyakit demam berdarah dan difteri, ada juga penyakit yang ditimbulkan melalui hewan, yaitu penyakit hewan zoonosis. Hal ini perlu mendapat perhatian, mengingat penyakit zoonosis pada hewan dapat menular pada manusia bahkan dapat menyebabkan kematian, sehingga apabila telah terjadi sering dikatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Sejak penyakit flu burung mewabah di sebagian daerah di Indonesia, tetapi hingga tahun 2010 belum ada warga Kota Balikpapan yang dinyatakan positif menderita flu burung. Beberapa penderita yang dirawat dan memiliki gejala penyakit flu burung ternyata setelah dilakukan pemeriksaan mendalam tidak terbukti positif terjangkit flu burung, sehingga statusnya hanya suspect. Namun demikian, karena penyakit ini relative berbahaya dan telah mewabah di beberapa daerah

di Indonesia, perlu bagi Kota Balikpapan untuk mewaspadaai masuknya penyakit ini ke Kota Balikpapan. Dibutuhkan kerjasama lintas sector dan dengan masyarakat agar Kota Balikpapan tetap dapat terhindar dari penyakit flu burung.

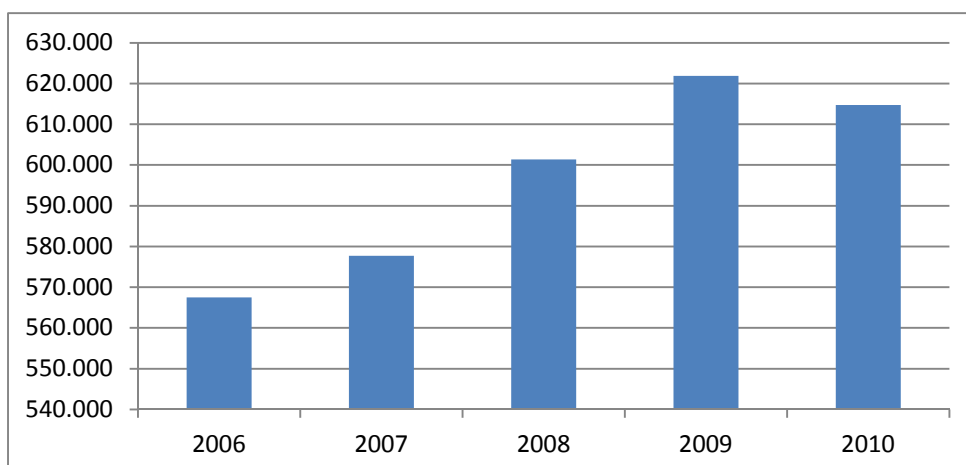
2.1.4. Demografi

Penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2011 sebesar 639.031 jiwa. Sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur dan kota transit, Kota Balikpapan mengalami pertumbuhan penduduk yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur. Pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan dalam 7 tahun terakhir sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini

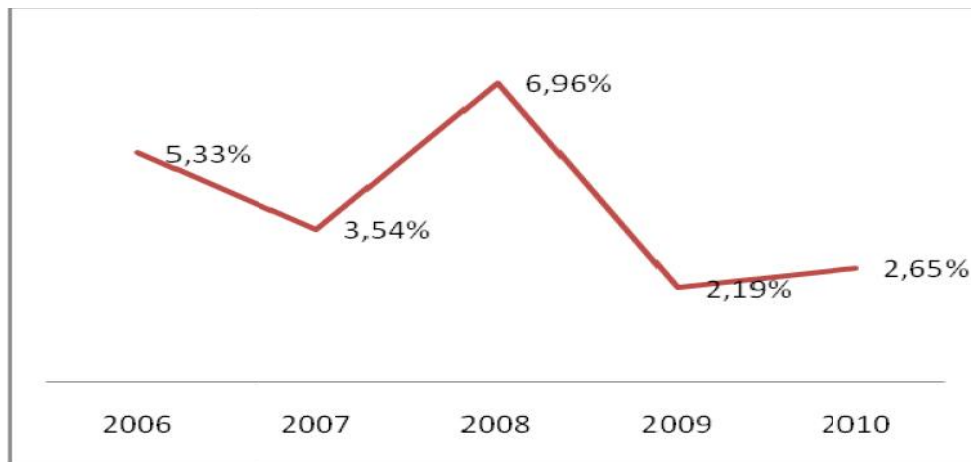
Tabel 2.17
Pertumbuhan Penduduk Kota Balikpapan

NO	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	TINGKAT PERTUMBUHAN	PERTUMBUHAN ALAMI	PERTUMBUHAN MIGRASI
1	2005	554,437	2,36%	-	-
2	2006	567,504	5.33%	1,85%	2,3%
3	2007	577,675	3.54%	2,97%	2,37%
4	2008	601,392	6.96%	1,64%	1,57%
5	2009	621,862	2,19%	0,92%	1,7%
6	2010	614,681	2.65%	1,15%	1,5%
7	2011	639.031	3.96 %	2.11 %	1.7 %

Grafik 2.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2011



Grafik 2.3
Perkembangan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kota Balikpapan
Tahun 2005 – 2011



Dengan luas wilayah sekitar 503,3 Km², maka kepadatan penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2010 adalah 1221 jiwa/Km² dan tahun 2011 adalah 1.269,68 jiwa/Km².

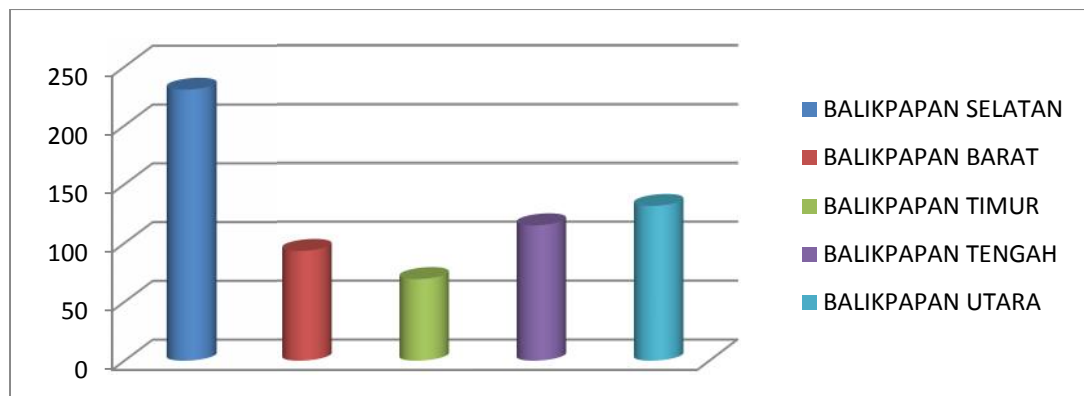
Distribusi jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Balikpapan Selatan, yaitu mencapai jumlah 223.041 jiwa atau mencapai 36,28% dari seluruh jumlah penduduk Kota Balikpapan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Timur, dengan jumlah penduduk sekitar hampir 65.868 jiwa atau sekitar 10,72 % jumlah penduduk Kota Balikpapan. Distribusi persentase jumlah penduduk Kota Balikpapan menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.18
Distribusi Penduduk per Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2011

KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)
BALIKPAPAN SELATAN	230,547
BALIKPAPAN BARAT	93,134
BALIKPAPAN TIMUR	69,228
BALIKPAPAN TENGAH	114,837
BALIKPAPAN UTARA	131,285

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2011

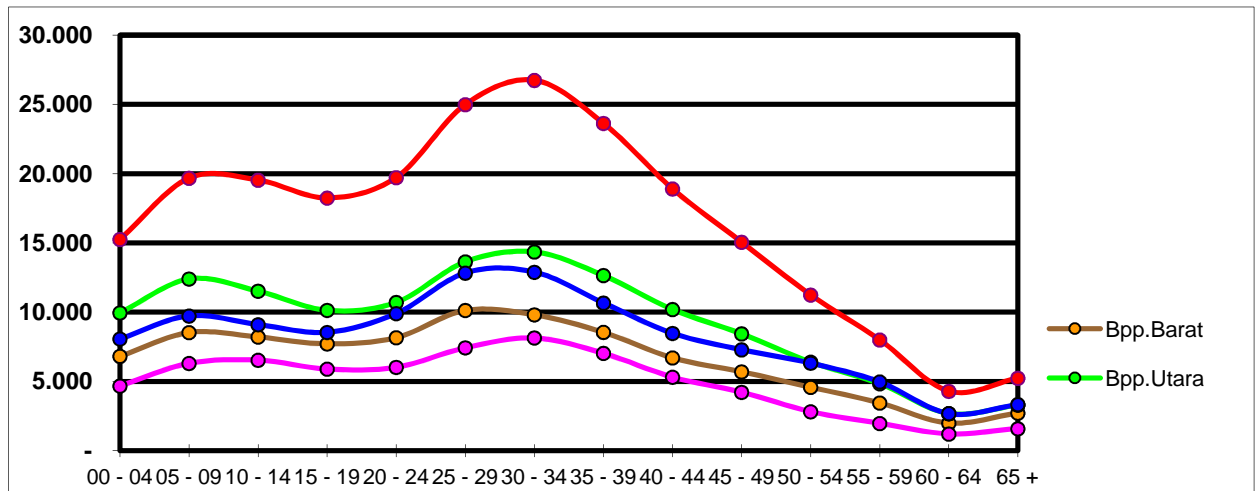
Grafik 2.4
Distribusi Penduduk per Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2011



Selanjutnya penduduk Kota Balikpapan dapat dianalisis menurut struktur umurnya. Struktur umur ini adalah informasi yang sangat penting karena berkaitan dengan perkembangan persentase kelompok sasaran pembangunan. Misalnya proporsi penduduk pada tingkat pendidikan dasar, menengah, tinggi, remaja, usia kerja (produktif), usia lanjut. Besaran komposisi penduduk ini akan menentukan kebutuhan layanan pada setiap kelompok.

Bila dilihat dari struktur usia penduduk Kota Balikpapan, yang tergolong menonjol adalah usia masa awal usia kerja (25-34 tahun) dan pada usia pendidikan tinggi (20-24 tahun). Pada kedua kelompok ini terlihat pola lonjakan bila dibandingkan dengan usia pendidikan dasar-menengah. Artinya secara normal sebenarnya strukturnya akan semakin menyempit mulai dari usia balita sampai dengan usia lanjut. Lonjakan pada usia tersebut di atas, mengindikasikan bahwa di Kota Balikpapan terjadi migrasi masuk yang sangat besar, yaitu penduduk pendatang yang mencari kerja di Kota Balikpapan. Struktur seperti ini patut mendapat perhatian, karena kemungkinan akan selalu berulang. Antisipasi atas peristiwa seperti ini harus selalu dilakukan dalam mengupayakan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Balikpapan.

Grafik 2.5
Struktur Umur Penduduk di Kota Balikpapan Tahun 2011



2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Sosial

Tujuan pokok pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan manusia. Kesejahteraan pada dasarnya memiliki dimensi yang luas dan beragam. Salah satu indikator kesejahteraan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang meliputi indikator pendidikan, kesehatan dan daya beli. Sebagai indikator utama pada dasarnya IPM adalah berfungsi sebagai indikator *impact*, yaitu terbentuk karena banyak aspek pembangunan yang dilakukan.

Pada tahun 2006 IPM Kota Balikpapan mencapai 71,30 dan sampai dengan tahun 2011 pertumbuhannya relatif tinggi yaitu mencapai 78.83. Mengikuti pola tersebut, dapat diproyeksikan IPM sampai dengan tahun 2025 mencapai 86,53

Struktur IPM Kota Balikpapan bervariasi menurut aspeknya. Indeks Kesehatan adalah indeks tertinggi, sedangkan Indeks Daya Beli adalah indeks terendah. Berdasarkan data yang ada, Indeks Kesehatan adalah indeks yang diperkirakan dapat mengalami pertumbuhan paling cepat. Bila pada tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami kenaikan sekitar 0,37 poin dan pada tahun 2010 ke 2011 mengalami kenaikan sebesar 0,36 poin maka pada tahun 2025 diperkirakan akan mengalami kenaikan 5,11 poin. Sementara untuk indeks

pendidikan relative mengalami kenaikan yang lebih rendah dari indeks kesehatan, karena indikator-indikator yang mempengaruhi indeks pendidikan telah mencapai angka yang relative tinggi. Sementara itu indeks daya beli juga relative kecil pengaruhnya terhadap peningkatan IPM karena peningkatan pendapatan masyarakat dibarengi dengan laju inflasi yang juga turut mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat.

Selanjutnya dapat digambarkan tingkat IPM menurut kecamatan sebagaimana pada tabel 2.14.

Tabel 2.19
Indeks Pembangunan Manusia menurut Kecamatan,
Tahun 2011

wilayah	Angka Harapan Hidup (eo)	Angka Melek Huruf	Rata rata lama sekolah	Paritas Daya Beli	IPM
	Tahun	(%)	(Tahun)	(000 Rp)	
1	2	3	4	5	6
Balikpapan Selatan	73,37	98,73	10,81	678.70	81,60
Balikpapan Timur	72,97	100,67	9,28	620.95	75,75
Balikpapan Utara	71.16	98,70	9,97	668.56	78.27
Balikpapan Tengah	71,81	98.30	10,23	671.48	78,98
Balikpapan Barat	71,76	98,30	9,17	664.39	77,85
Balikpapan	71,95	98,41	10,05	638,73	75,11

2.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat melalui indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan PDRB Kota Balikpapan terdiri dari PDRB dengan dan tanpa migas, atas dasar harga berlaku maupun konstan. Pertumbuhan PDRB selama lima tahun terakhir (tahun 2005 sampai dengan 2011), secara rinci dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 2.20
Perkembangan PDRB Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan
Tahun 2005 - 2011

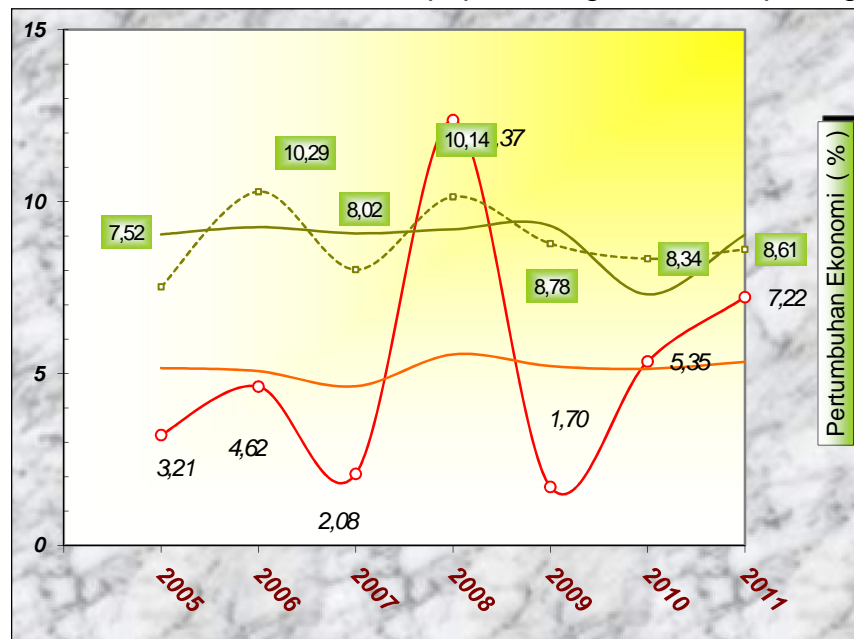
Tahun	PDRB Dengan Migas		PDRB Tanpa Migas	
	ADH Berlaku	ADH Konstan	ADH Berlaku	ADH Konstan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2005	22.353.578,85	12.621.678,53	9.398.803,75	7.280.058,11
2006	26.493.086,53	13.204.717,77	10.697.541,68	8.029.097,35
2007	28.081.137,52	13.479.345,05	12.913.742,98	8.672.738,36
2008	38.527.951,29	15.147.326,04	15.580.564,47	9.551.793,79
2009	36.595.856,14	15.405.235,46	17.541.545,82	10.390.239,95
2010	41.259.008,37	16.229.497,11	19.997.414,64	11.256.798,09
2011	45.128.321,52	17.401.119,98	22.882.879,62	12.225.720,59

Sedangkan Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan dengan dan tanpa migas selama kurun waktu lima tahun terakhir (2005 – 2011) dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 2.21
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan dengan dan tanpa migas
Tahun 2005 - 2011

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan		Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2005	12.621.678,53	7.280.058,11	3,21	7,52
2006	13.204.717,77	8.029.097,35	4,62	10,29
2007	13.479.345,05	8.672.738,36	2,08	8,02
2008	15.147.326,04	9.551.793,79	12,37	10,14
2009	15.405.235,38	10.390.239,95	1,70	8,78
2010 r)	16.229.497,11	11.256.708,09	5,35	8,34
2011 *)	17.401.119,98	12.225.720,59	7,22	8,61

Grafik 2.6
Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan Dengan dan Tanpa Migas



Dengan melihat data tersebut diatas bahwa perekonomian kota Balikpapan mengalami pertumbuhan secara nilai akan tetapi kalau dilihat pertumbuhan yang fluktuatif. PDRB berdasarkan harga konstan pada tahun 2009 baik migas maupun migas mengalami perlambatan tetapi secara nilai tetap tumbuh. terutama PDRB dengan migas mengalami pertumbuhan yang fluktuatif hal ini dikarenakan Perbaikan kilang minyak (over haul) yang dilakukan secara rutin oleh PT.Pertamina UP.V Balikpapan menyebabkan kinerja kilang minyak menjadi tidak maksimal serta mempengaruhi produksi, namun secara kualitas ekonomi Kota Balikpapan dari tahun ke tahun tetap tumbuh.

2.2.1.2 Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu wilayah / daerah adalah Pendapatan per kapita, parameter ini dianggap cukup relevan dalam skala makro ekonomi. Pendapatan per kapita penduduk Kota Balikpapan dari tahun ketahun menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.22
Perkembangan dan Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Penduduk Kota
Balikpapan, Tahun 2005–2011

Tahun	Dengan Migas		Tanpa Migas	
	Nilai (Rupiah)	Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun (%)	Nilai (Rupiah)	Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2005	26.018.632	30,49	13.339.072	11,94
2006	27.899.063	7,23	15.097.222	13,18
2007	29.094.883	4,29	17.716.352	17,35
2008	46.442.009	59,62	21.369.170	20,62
2009	40.443.913	-12,92	24.030.199	12,45
2010 r)	47.178.940	16,65	27.654.236	15,08
2011*)	52.022.076	10,26	31.795.728	14,98

Dari data diatas nilai pendapatan perkapita kota Balikpapan mengalami kenaikan hingga tahun 2011, kecuali pendapatan perkapita dengan migas pada tahun 2009 mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh sektor industry pengolahan dalam hal ini industri pengilangan minyak mengalami penurunan produksi.

2.2.1.3 Distribusi Pendapatan

Keberhasilan pembangunan akan dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat di semua lapisan apabila tingkat pertumbuhan ekonomi relatif tinggi dan diikuti peningkatan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Jika kita lihat tingkat pemerataan pendapatan yang dicapai di Kota Balikpapan relatif baik. Penilaian indikator ini dengan menggunakan Indeks Gini Ratio , dimana angka koefisien gini Ratio kota Balikpapan selama periode 2005-2011 mengalami fluktuatif berdasarkan ukuran koefisien gini rasio maka kota Balikpapan berada diketimpangan sedang menuju ketimpangan rendah yang berarti bahwa proses pertumbuhan ekonomi telah dibarengi dengan pemerataan pendapatan .Walaupun distribusi pendapatan masih terkonsentrasi pada golongan berpendapatan menengah dan tinggi seperti data pada tabel berikut :

Tabel 2.23
Distribusi Pendapatan dan Indeks Gini di Kota Balikpapan
Tahun 2005 s/d 2011

Distribusi Pendapatan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
40% Rendah	18,25	19,21	19,94	19,93	16,56	19,30	8,53
40% Sedang	40,19	45,99	48,51	56,56	44,14	53,58	24,26
20% Tinggi	41,56	34,80	31,55	23,51	39,30	27,12	67,21
Indeks Gini	0,318	0,303	0,273	0,235	0,267	0,336	0,140

Sumber : BPS Kota Balikpapan

2.2.1.4 Investasi

Perkembangan investasi di Kota Balikpapan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Kondisi ini tercermin dari nilai investasi yang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif, misalnya penyederhanaan prosedur birokrasi, sistem informasi serta promosi investasi daerah yang lebih intensif serta membuat pelayanan perijinan satu pintu. Jika dilihat dari perbandingan angka realisasi investasi di Kota Balikpapan selama kurun waktu lima tahun terakhir (sejak 2005 hingga 2011) untuk nilai investasi swasta nasional, PMA-PMDN dan pemerintah kota, maka terus meningkat.

Perkembangan nilai investasi swasta nasional, PMDN/PMA dan Pemerintah dapat dilihat pada table berikut ini :

TABEL 2.24
NILAI INVESTASI
SWASTA NASIONAL, PMA – PMDN & PEMERINTAH KOTA
BADAN PENANAMAN MODAL & PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA BALIKPAPAN

Tahun	SWASTA NASIONAL			PMA / PMDN			PEMERINTAH		JUMLAH TOTAL		
	Investasi (Rp. Triliun)	TK	Luasan Lahan	Investasi (Rp. Triliun)	TK	Luasan Lahan	Investasi (Rp. Triliun)	TK	Investasi (Rp. Triliun)	TK	Luasan Lahan
2005	-	-	-	1,04	2.316	-	0,69	-	1,72	2.316	-
2006	-	-	-	0,69	1.823	-	1,22	-	1,91	1.823	-
2007 *	1,82	1.692	555,29	0,94	1,158	22,55	1,55	-	4,30	2.850	577,8389
2008	4,92	3.442	1.819,14	0,62	450	2,88	1,80	-	7,34	3.892	1.822,0193
2009	3,21	4.596	676,64	1,36	1,442	42,40	1,90	-	6,46	6.038	719, 0435
2010	3,31	2.093	212,24	0,43	244	10,00	1,64	-	5,39	2.337	222,2350
2011	7,15	5.581	528,16	0,47	603	14,50	1,81	-	9,44	6.184	542,6633

Sumber Data : BPMP2T Kota Balikpapan 2012

Perkembangan nilai investasi swasta nasional, PMA-PMDN dan Pemerintah Kota di Kota Balikpapan dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun dari 2005 s/d 2011 mengalami peningkatan rata-rata 32,76 % pertahun. Berdasarkan tabel tersebut diatas, Invetasi yang tercatat oleh Bagian Perekonomian Setda Kota Balikpapan pada tahun 2005 sebesar Rp. 1,72.triliun dengan penyerapan tenaga kerja sejumlah 2.310 orang. Mulai bulan April 2007 urusan perijinan ditangani oleh Badan Perijinan dan Investasi Daerah (BPID), investasi pada tahun 2007 meningkat sebesar Rp 4,3 triliun dengan serapan tenaga kerja 2.850 orang, selanjutnya pada tahun 2008 total investasinya tembus di angka

Rp 7,34 triliun dengan serapan tenaga kerja 3.892 orang. Sementara di tahun 2009 BPID menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T), investasi tercatat mencapai Rp 6,46 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 6.038 orang. Pada tahun 2011 nilai investasi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan total Rp 9,44 trilyun, kenaikan nilai investasi yang cukup signifikan terjadi pada investasi swasta nasional dari Rp. 3,31 trilyun pada tahun 2010 naik menjadi Rp. 7,15 trilyun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.581 orang.

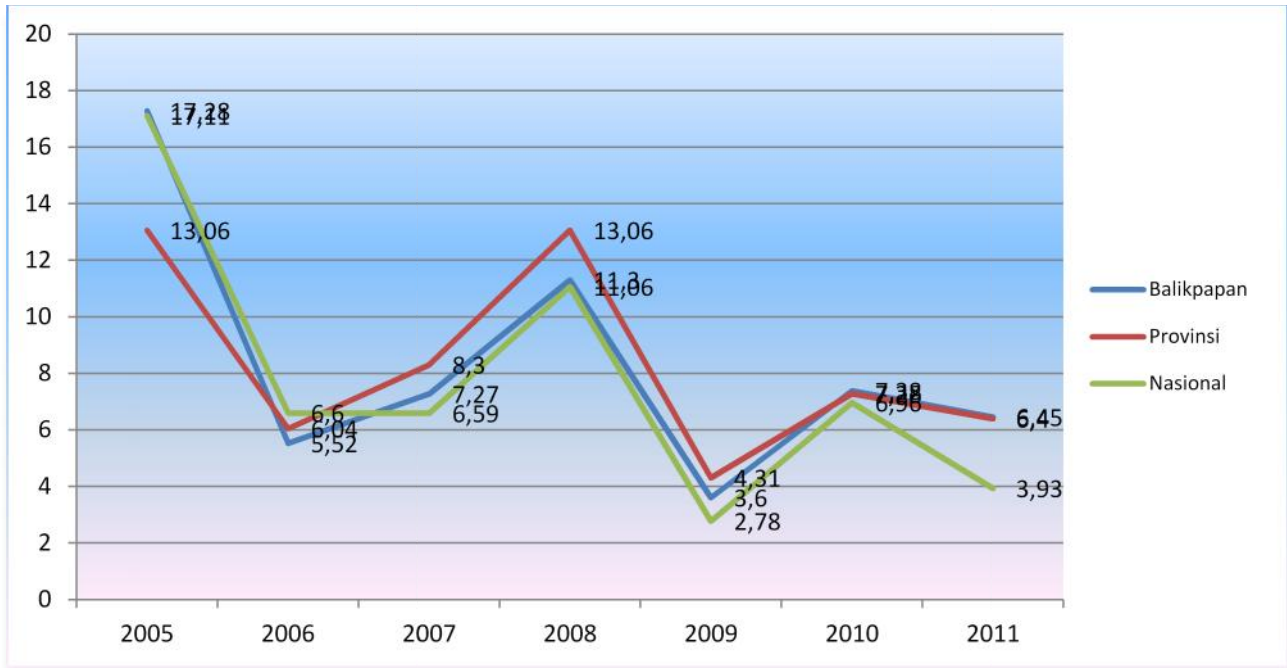
2.2.1.5 Inflasi

Di samping Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kinerja ekonomi Kota Balikpapan adalah laju inflasi. Laju inflasi menunjukkan kecepatan perubahan harga-harga barang dan jasa secara umum di wilayah Kota Balikpapan dan oleh karena itu secara tidak langsung merefleksikan kestabilan dalam perekonomian. Laju inflasi Kota Balikpapan dari tahun 2005 s/d 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.25
Tingkat Inflasi Kota Balikpapan per
Tahun 2005-2011

Tingkat Inflasi	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Kota Balikpapan	17,28	5,52	7,27	11,30	3,60	7,38	6,45
Kalimantan Timur	13,06	6,04	8,30	13,06	4,31	7,28	6,40
Nasional	17,11	6,6	6,59	11,06	2,78	6,96	3,93

Sumber: BPS Kota Balikpapan (2011)



Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel diatas, bahwa laju inflasi di Kota Balikpapan selama 7 (tujuh) tahun relatif rendah dan fluktuatif rata-rata dibawah dua digit. Hanya pada tahun 2005 dan 2008 laju inflasi kota Balikpapan mencapai dua digit. Laju inflasi pada tahun 2005 dan tahun 2008. Inflasi tahun 2008 dipicu karena kenaikan komoditas dipasar dunia, seperti Crude Plam Oil (CPO) sebagai bahan minyak goreng, kedelai, tepung terigu dan beras. Selain itu juga dipengaruhi oleh tingginya gelombang laut menyebabkan terganggunya distribusi serta kebijakan pemerintah menaikkan harga harga BBM bersubsidi akhir bulan Mei 2008.

2.2.1.6 Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia telah dicetuskan oleh Bung Hatta namun perkembangannya baik usaha mapun jumlahnya masih kurang menggembarakan, khususnya Kota Balikpapan dan Indonesia pada umumnya. Untuk lebih jelasnya perkembangan koperasi di kota Balikpapan dari tahun 2005 s/d 2011 dirinci pada tabel berikut :

Tabel 2.26
Klasifikasi Koperasi di KOTA BALIKPAPAN Tahun 2005 – 2011

No.	Klasifikasi	Tahun						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Koperasi (unit)	454	474	482	484	486	495	516
2	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	195	208	353	357	373	297	318
3	Persentase Koperasi Aktif (%)	42,95	43.88	73.24	73.76	76.75	60,00	61.63

Sumber: Disperindagkop KOTA BALIKPAPAN, tahun 2012

Berdasarkan perkembangannya koperasi yang ada di Kota Balikpapan dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun dari 2005 s/d 2011 belum mengalami peningkatan yang signifikan yaitu rata-rata hanya 2,16 % pertahun, sedangkan koperasi yang aktif meningkat rata-rata 8,49 % pertahun.

Menurut kelompoknya koperasi yang ada di Kota Balikpapan tahun 2011 sejumlah 24 kelompok antara lain : KUD 5 unit, Koperasi Peternakan 1 unit, Koperasi Nelayan 8 unit, Kopti 1 unit, Kopinkra 1 unit, Koppantren 9 unit, Kopkar, 97 unit, Koperasi Angkatan Darat 19 unit, Kop. Angkatan Laut 1 unit, Kop. Angkatan Udara 2 unit, Kop. Kepolisian 7 unit, Kop. Serba Usaha 186 unit, Koperasi Pasar 6 unit, Koperasi Simpan Pinjam 12 unit, Kop. Pegawai Negeri 65 unit, Koperasi Wanita 18 unit, Koperasi Veteran 1 unit, Koperasi Wredatama 1 unit, Koperasi Pepabri 1 unit, Koperasi Mahasiswa 1 unit, Koperasi Pemuda 1 unit, Koperasi Lainnya 46 unit, Koperasi KJKS 2 unit dan Koperasi Sekunder 2 unit.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki posisi penting, bukan saja dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di Kota Balikpapan, dalam banyak hal mereka menjadi perekat dan menstabilkan masalah kesenjangan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu upaya untuk menumbuhkan iklim kondusif bagi perkembangan UMKM dalam mempercepat pembangunan daerah.

Menempatkan usaha mikro kecil dan menengah sebagai sasaran utama pembangunan harus dilandasi komitmen dan koordinasi yang baik antara

pemerintah, pebisnis dan lembaga non bisnis serta masyarakat setempat dengan menerapkan *strategi Agresif yang berbasis pada ekonomi jaringan (Kemitraan)*; Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah keseluruhan dengan cara memberi dukungan positif dan nyata terhadap pengembangan sumber daya manusia (pelatihan kewirausahaan), teknologi, informasi, akses pendanaan serta pemasaran, Perluasan pasar ekspor, merupakan indikator keberhasilan membangun iklim usaha yang berbasis kerakyatan. Untuk mengetahui perkembangan UMKM di Kota Balikpapan mulai tahun 2005 s/d 2011, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.27
Perkembangan UMKM di Kota Balikpapan mulai Tahun 2005 s/d 2011

NO	KLASIFIKASI	TAHUN						
		2005	2006	2007	2008	2008	2010	2011
1	UMKM	10,905	11,630	12,020	12,690	12,846	13,807	14,440

Sumber Data : Disperindagkop Kota Balikpapan Tahun 2012

Menurut data perkembangan UMKM di Kota Balikpapan mengalami peningkatan dalam kurun waktu 7 tahun (2005 s/d 2011) terakhir ini. Pada tahun 2005 jumlah UMKM 10.905 unit dan meningkat pada tahun 2011 menjadi 14.440 unit atau tumbuh rata-rata sebesar 4,79 % pertahun. Dilihat dari jenis usahanya UMKM di Kota Balikpapan didominasi oleh usaha perdagangan kurang lebih 70 % dari total UMKM.

Pada umumnya kendala pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kota Balikpapan antara lain : belum kondusifnya iklim usaha, rendahnya akses kepada sumber permodalan, rendahnya mutu produk dan terbatasnya daerah pemasaran, rendahnya kualitas SDM dan masalah yang terkait dengan kelembagaan koperasi.

2.2.1.7 Perindustrian

Kota Balikpapan mempunyai beberapa kawasan industri baik industri kecil, sedang dan berat yaitu :

1. Kawasan Industri Kecil di Kawasan Industri Kecil Sumber (KIKS). KIKS seluas 9 Ha yang telah dimanfaatkan seluas 3 Ha, dengan jumlah pengrajin 42 unit.
2. Kawasan Industri Sedang di Kawasan Industri Batakan. Kawasan ini merupakan kawasan industri yang keberadaannya tersebar disepanjang Jalan Mulawarman.
3. Kawasan Industri Berat yaitu Kawasan Industri Pertamina dan Kawasan Industri Kariangau (KIK).

Kawasan Industri Kariangau (KIK) berlokasi di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, merupakan kawasan strategis yang dapat dijangkau melalui darat dan laut. Pembangunan Tahap I pada areal seluas 1.584 Ha, sedangkan untuk Tahap II seluas 2.891,6 Ha. Industri yang sudah eksisting sampai dengan tahun 2009 sebanyak 15 perusahaan, kawasan ini juga dilengkapi dengan sarana pelabuhan peti kemas yang beroperasi pada tahun 2012.

Menurut perkembangan Sektor Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28
Perkembangan Sektor Industri Kecil, Menengah dan Besar
di Kota Balikpapan Tahun 2005 - 2011

No	Sektor Industri	TAHUN						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Industri Kecil	483	521	544	566	586	604	859
2	Industri Menengah	81	98	103	110	119	125	119
3	Industri Besar	73	76	83	93	102	110	102
	Jumlah	637	695	730	769	806	839	859

Sumber: Disperindagkop KOTA BALIKPAPAN, 2012

Berdasarkan tabel diatas, pertumbuhan industri formal di Kota Balikpapan selama lima tahun (2005 – 2011), ternyata pertumbuhan industri kecil mengalami peningkatan yang paling tinggi yaitu rata-rata 10,07 %

pertahun, disusul industri menengah sebesar 6,62 % dan paling kecil pertumbuhannya industri besar rata-rata 5,73 % pertahun.

Jumlah tenaga kerja yang terserap dibidang industri formal pada tahun 2005 berjumlah 9.341 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 12.777 orang. Untuk perkembangan ekspor non migas dan migas selama lima tahun dari tahun 2005 hingga 2011 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.29
Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan di Kota Balikpapan Tahun 2005 s.d 2011

No	Uraian	Satuan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Nilai Ekspor Non Migas	US \$	574604,64	1.842.524.550,12	8.746.921.600,25	1.176.276.161,82	1.441.258,12	1.971.859.998,61	2.517.889.361,28
2	Nilai Ekspor Migas	US \$	653.590.382,06	1.015.1796.8126,38	0,00	1.215.509.457,02	803.713.180,56	1.129.155.778,72	713.730.438,60

Sumber : Disperindagkop Kota Balikpapan, tahun 2012

Perkembangan ekspor kota Balikpapan secara keseluruhan mengalami peningkatan, pada tahun 2005 untuk ekspor non migas pada tahun 2005 sejumlah US \$ 574.604.353,64 meningkat pada tahun 2011 sebesar US \$ 2.517.889.361,28 atau meningkat rata-rata 27,92 % pertahun. Dengan komoditi antara lain batu bara, biji besi, CPO, plywood dan lain-lain. Adapun Negara tujuan ekspor non migas antara lain Negara-negara Timur Tengah, Eropa, Asia dan USA. Begitu pula untuk ekspor migas dari tahun 2005 s/d 2011 nilainya juga mengalami peningkatan.

2.2.1.8 Prasarana dan Sarana Perdagangan

Keberadaan pasar di Kota Balikpapan sebagai pusat perdagangan yang cukup penting sekali ini, disebabkan fungsi dan struktur perekonomian di Kota Balikpapan didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa.

Jumlah pasar modern dan tradisional di Kota Balikpapan dirinci per kecamatan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.30
Nama Pasar Modern Dan Tradisional Menurut Kecamatan Kota Balikpapan Tahun 2011

Kecamatan	Jenis Pasar	
	Modern	Tradisional
-1	-2	-3
1. Balikpapan Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Balikpapan Super Blok - Yova Super Market - Balcony - Balikpapan Trade Center - Plaza Balikpapan - Mal Fantasi Balikpapan Baru - Lotte Mart 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasar Sepinggan - Pasar Damai (BP) - Pasar Kelandasan I - Pasar Kelandasan II - Pasar Damai III
2. Balikpapan Timur		<ul style="list-style-type: none"> - Pasar Gunung Tembak - Pasar Manggar Baru
3. Balikpapan Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Plaza Muara Rapak 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasar Buton Km 4,5 - Pasar Purnamasari
4. Balikpapan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Plaza Gajah Mada 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasar Karang Jati - Pasar Gunung Guntur
5. Balikpapan Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Plaza Kebun Sayur 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasar Pandan Sari - Pasar Penampungan "A" - Pasar Kebun Sayur - Pasar Kampung Baru Tengah - Pasar Loak Besi

Sumber : Dinas Pasar Kota Balikpapan 2012

Jumlah pedagang dan pengelolaan pasar menurut wilayah baik yang dikelola oleh pemerintah, perorangan maupun swasta yang termasuk dalam manajemen pasar, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 2.31
JUMLAH PEDAGANG DAN PENGELOLA PASAR MENURUT WILAYAH
TAHUN 2011

Wilayah/Pasar	Jumlah Pedagang/Kios	Pengelola
1	2	3
Wilayah I		
- Pasar Inpres Kebun Sayur	343	Dinas Pasar
- Pasar Kampung Baru Tengah	356	Dinas Pasar
- Pasar Penampungan A Kebun Sayur	298	Dinas pasar
- Pasar Loak Besi Kampung Baru	48	Dinas Pasar
Wilayah II		
- Pasar Pandansari	981	Dinas Pasar
Wilayah III		
- Pasar Inpres Klandasan I	578	Dinas Pasar
- Pasar Inpres Klandasan II	887	Dinas Pasar
- Pasar Damai I (BP)	294	Dinas Pasar
Wilayah IV		
- Pasar Sepinggan	833	Dinas Pasar
Pengelola Pihak Lain		
- Pasar Muara Rapak	943	Pihak ke 3 (swasta)
- Pasar Baru Square/balcony	1.974	Pihak ke 3 (swasta)
- Plaza Kebun Sayur	567	Pihak ke 3 (swasta)
- Pasar Buton Km 4,5	70	Perorangan
- Pasar Manggar	221	Perorangan
- Pasar Teritip/Gunung Tembak	30	Perorangan
- Pasar Karang Jati	-	Perorangan
- Pasar Gunung Guntur	-	Perorangan

Sumber: Kantor Dinas Pasar Kota Balikpapan, tahun 2012

Dilihat dari tabel tersebut diatas, bahwa pasar yang dikelola oleh swasta sebanyak 3 (tiga) pasar yaitu pasar Muara Rapak, Plaza Kebun Sayur dan Pasar Baru Square. Sedangkan yang dikelola oleh perorangan sejumlah 5 (lima) yang terdiri dari Pasar Teritip/Gunung Tembak, Pasar Manggar, Pasar Karang Jati, pasar Gunung Guntur dan Pasar Buton Km 4,5 sedangkan dikelola oleh Pemerintah sejumlah 9 (sembilan) pasar.

2.2.1.9 ENERGI

Pengilangan minyak di Kota Balikpapan yang dikelola oleh PT. Pertamina (PERSERO) UP V memproduksi 2 (dua) jenis, yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) terdiri dari Premium/Migas, avtur, kerosene, HSD/solar, IDO/minyak diesel, pertamax serta fuel oil IFO dan Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM) yang terdiri dari nephta, LSWR, fully refined serta LPG. Produksi BBM pada tahun 2008 mencapai 67.273.729 barrel atau sekitar 70,07 %, sedangkan untuk non BBM mencapai 28.732.937 barrel atau sekitar 29,93 %. Pada tahun 2009 produksi BBM mencapai 64.396.063 barrel atau sekitar 79,53%, sedangkan untuk non BBM mencapai 16.573.785 barrel atau sekitar 20,47%. Untuk tahun 2010 Produksi BBM mencapai 58.799.424 barrel atau sekitar 70,82%, sedangkan untuk non BBM mencapai 24.225.216 barrel atau sekitar 29,18%. Selanjutnya Produksi BBM tahun 2011 mencapai 61.574.106 barrel atau sekitar 74,82 %, sedangkan untuk non BBM mencapai 20.716.559 barrel atau sekitar 25,18 %.

Listrik menjadi salah satu penopang berjalannya roda pembangunan Kota Balikpapan. Sebagian besar kebutuhan listrik Kota Balikpapan, baik untuk rumah tangga maupun untuk usaha masih dipasok oleh PLN. Perkembangan jumlah produksi dan terjual PLN Cabang Balikpapan dari tahun 2005 – 2011 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.34
JUMLAH Kwh Produksi dan Terjual PLN Cabang Balikpapan
2005-2011

TAHUN	JUMLAH		KETERANGAN
	Produksi	Terjual	
2005	541.644.000	381.707.280	
2006	541.644.000	381.707.280	
2007	466.008.049	435.618.999	
2008	496.600.470	453.169.871	
2009	708.084.232	647.868.989	
2011	866.163.896	794.452.774	

Sumber : PT. PLN (Persero) Cabang Balikpapan Tahun 2012

Dilihat dari data perkembangan jumlah kwh produksi dan terjual selama kurun waktu 2005 – 2011 mengalami peningkatan kwh produksi dan terjual dengan pertumbuhan secara kumulatif (2005-2011) sebesar 59,91 % serta rata-rata produksi sebesar 8,13 % pertahun. Sedangkan kwh terjual mengalami pertumbuhan secara kumulatif (2005-2011) sebesar 108,13 % serta dengan rata-rata produksi pertumbuhan kwh terjual 12,99 % pertahun. Seiring pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pula terhadap kebutuhan energy khususnya energy listrik di Kota Balikpapan.

2.2.2. Aspek Kesehatan

Aspek kesehatan yang mempengaruhi IPM adalah Usia Harapan Hidup (UHH), dimana angka tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Angka Kematian Kasar (AKK).

UHH Kota Balikpapan pada tahun 2011 adalah 72,39 dimana capaian ini dipengaruhi oleh menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) atau menurunnya jumlah kematian bayi dibawah usia satu tahun pada setiap 1000 kelahiran hidup.

Kematian neonatal pada tahun 2011 berjumlah 80 kasus. Kematian neonatal pada usia awal kehidupan merupakan salah satu indikator belum optimalnya manajemen kelangsungan program pelayanan kesehatan ibu dan anak.

AKI pada tahun 2011 yang dilaporkan sebanyak 5 kasus. Angka ini belum dapat dikatakan sebagai jumlah seluruh kematian ibu yang terjadi di Kota Balikpapan, karena kemungkinan masih banyak kasus kematian ibu yang tidak tercatat atau tidak dilaporkan. Sebagai penyebab langsung kematian ibu yang utama adalah pendarahan (45%) dan lainnya adalah penyebab tidak langsung antara lain keterlambatan merujuk. Kematian ibu maternal dapat dicegah bila cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan penanganannya.

Hal lain yang dapat memperkecil resiko kematian ibu adalah dengan pelayanan berkala meliputi pelayanan K1 dan K4. Cakupan K1 Kota Balikpapan mencapai 89,31%, sedangkan cakupan K4 mencapai 88,86%, sedangkan target standar pelayanan minimal kesehatan adalah 95%. Dengan demikian masih terdapat kesenjangan sebesar 13,02%, kesenjangan ini dapat diakibatkan oleh kemampuan dan pemahaman petugas pengelola KIA tentang manajemen kelangsungan program KIA yang belum optimal, Peran swasta yang cukup dominan belum mendukung pelaksanaan program, definisi operasional yang belum sama antara Rumah Sakit dan program kesehatan, petugas pencatatan dan pelaporan yang tidak mengetahui secara rinci diagnosis yang ditegakkan petugas medis.

AKABA atau jumlah kematian anak umur 1-4 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2010 adalah sebanyak 53 anak. AKABA menggambarkan masalah kesehatan anak serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan.

Keadaan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat Kota Balikpapan dapat dilihat dari persentase rumah sehat yang memiliki sarana air bersih 71%, yang memiliki jamban 93,23 %, yang memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) 57,8 % dan yang memiliki pembuangan sampah 50,66 %, sedangkan persentase tempat-tempat umum sehat dilihat dari sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi, luas ruangan dan sistem pencahayaan yang memadai.

Adapun perilaku sehat masyarakat dilihat dari cakupan rumah tangga yang ber-PHBS sebanyak 80%, dan tingkat perkembangan posyandu, yaitu Posyandu Pratama 15%, Posyandu Madya 10%, dan Posyandu Mandiri 75%.

Akses dan mutu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas (67,37 %) dan rumah sakit (31,74 %).

Pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan di Kota Balikpapan, dapat dilihat dari persentase persalinan oleh tenaga kesehatan (77,56%), persentase kelurahan yang mencapai *Universal Child Immunization (UCI)* sudah 60%, persentase ibu hamil yang mendapat tablet Fe 1 (84,37%), mendapat tablet Fe 3 (82,67%), persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif (67,80%), persentase balita yang mendapat Vitamin A 2 kali setahun (92,63%), persentase murid SD/MI yang mendapat pemeriksaan gigi dan mulut (40,27%), persentase pekerja yang mendapat pelayanan kesehatan kerja (41,92%), serta persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan yang sudah mencapai 100%.

2.2.3. Aspek Pendidikan

Aspek pendidikan yang mempengaruhi IPM adalah Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dimana capaian sangat dipengaruhi oleh berbagai indikator yang dikelompokkan kedalam kelompok pemerataan dan perluasan akses, kelompok peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Angka Melek Huruf usia >15 tahun di Kota Balikpapan pada tahun 2011 sebesar 98,76%, dan akan dituntaskan pada tahun 2025 melalui Program Keaksaraan

Fungsional kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kota Balikpapan.

Capaian Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2011 baru mencapai 10,26 tahun, sehingga perlu diupayakan melalui berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan target capaian sebagaimana yang diharapkan sampai dengan tahun 2025.

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2011 pada jenjang Sekolah Dasar dan sederajat adalah 109.39 % meningkat 9.7 % dari tahun 2010. APK jenjang Sekolah Menengah Pertama dan yang sederajat telah mencapai 40.19 % turun 2.3 % dari tahun 2010, sedangkan APK pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) baru mencapai 19 % meningkat 0.2 % dari tahun 2010.

Sedangkan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2011 pada jenjang Sekolah Dasar dan sederajat adalah 90.64 % meningkat 1.07 % dari tahun 2010. APM jenjang Sekolah Menengah Pertama dan yang sederajat telah mencapai 19 % meningkat 0.2 % dari tahun 2010, sedangkan APM pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) baru mencapai 64.54 % meningkat 1 % dari tahun 2010.

2.2.4. Aspek Daya Beli

Indeks daya beli masyarakat merupakan salah satu komponen IPM yang mengalami peningkatan. Indeks daya beli yang diperoleh dari penghitungan konsumsi per kapita penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2007 mencapai Rp. 577.127,- sedangkan tahun 2006 sebesar Rp 576.890,-. Indeks daya beli tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 0,001 persen yaitu dari 63,99 pada tahun 2006 menjadi 64,04 pada tahun 2007. Indeks daya beli yang mengalami peningkatan, walaupun relatif rendah juga memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan nilai IPM masyarakat Kota Balikpapan pada tahun 2007.

Daya beli merupakan yang paling kompleks dalam perhitungan dan penentuannya. Indeks daya beli masyarakat merupakan salah satu komponen IPM. Indeks daya beli yang diperoleh dari perhitungan konsumsi perkapita penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2008 (BPS angka sangat sementara) mencapai 64,27 poin atau setara dengan konsumsi perkapita penduduk sebesar Rp. 578.130,-meningkat dari tahun 2005 sebesar 63.93 poin atau setara dengan Rp. 576.620,-. Peningkatan daya beli tersebut masih dibawah standar upah minimum rata - rata tahun 2008 sebesar Rp. 939.000,- .

2.2.5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kota Balikpapan yang ditandai dengan relatif tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kota Balikpapan dari berbagai masalah sosial di tingkat mikro. Berbagai masalah sosial berkembang di masyarakat pada tahun 2011 adalah Jumlah anak terlantar (158 orang), Korban Tindak Kekerasan (14 orang), Wanita Tuna Susila (5 orang), Gelandangan dan

Pengemis (7 orang), Korban penyalahgunaan Napza (57 orang), Keluarga bermasalah psikologi / orang gila (18 orang). Beberapa hal yang cukup menonjol antara lain adalah:

- Peningkatan jumlah anak terlantar, keluarga miskin, keluarga dengan rumah tidak layak huni dan korban HIV-AIDS.
- Penurunan jumlah anak jalanan, anak nakal, tuna susila, pengemis, gelandangan dan masyarakat yang tinggal di daerah bencana.

Dengan beberapa kecenderungan tersebut, beberapa tantangan masalah sosial Kota Balikpapan relatif masih sangat besar. Adapun data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Balikpapan tahun 2011, yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.35
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2011

NO	JENIS PMKS	JUMLAH MENURUT		JUMLAH	JUMLAH	
		LAKI-LAKI	PEREM-PUAN		KK	JIWA
1	Anak Balita Terlantar	3	4	7		
2	Anak Terlantar					
	- Luar Panti	707	678	1.385		
	- Dalam Panti	-	-	-		
3	Anak Nakal	12	-	12		
4	Anak Jalanan	177	145	322		
5	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	-	72	72		
6	Korban Tindak Kekerasan			45		
7	Lanjut Usia					
	- Luar Panti	620	680	1.300		
	- Dalam Panti	-	-	-		
8	Penyandang Cacat	215	150	365		
9	Gelandangan/Pengemis	51	15	66		
10	Eks Narapidana	22	-	22		
11	Wanita Tuna Susila	-	349	349		
12	Korban Penyalahgunaan Napza	199	12	211		
13	RTS				7.136	23.375
14	Keluarga berumah tidak layak huni				33	
15	Keluarga bermasalah Psikologo/orang gila					84

16	Korban Bencana Alam				73	325
17	Pekerja Migran					
18	Pengidap HIV/AIDS					
19	Korban Bencana Alam / Pengungsian				161	592

Adapun perbandingan peningkatan jumlah PMKS yang ada dan jumlah PMKS yang ditangani masih belum berimbang, sehingga diperlukan anggaran yang memadai untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan secara optimal. Oleh karena itu dalam penanganannya diperlukan koordinasi yang baik antara unsur-unsur terkait baik pemerintah, swasta dan masyarakat.

2.2.6. Keamanan dan Ketertiban

Pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan yang tidak dapat diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja bagi semua golongan penduduk dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Hal tersebut dapat memicu timbulnya berbagai jenis kriminalitas. Seperti halnya kota-kota besar lain di Indonesia, di Kota Balikpapan kekhawatiran terhadap meningkatnya masalah kriminalitas sebagai akibat perkembangan kota yang belum mampu mengakomodir kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakatnya, menjadi tanggung jawab seluruh warga dan Pemerintah Kota untuk mengatasinya. Oleh karena itu kedepan Pemerintah Kota bersama sama masyarakat perlu lebih meningkatkan aktifitas pengamanan secara swakarsa (sistem keamanan lingkungan).

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah Kota Balikpapan telah mendorong upaya reformasi birokrasi yang akan dilakukan menurut tahapan-tahapan tertentu. Saat ini telah dilakukan reorganisasi pemerintahan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kota Balikpapan.

Secara umum, implementasi SOTK baru berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah maka struktur organisasi Pemerintah Kota Balikpapan saat ini terdiri dari sejumlah SKPD, yaitu 13 Dinas, 8 lembaga teknis

daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, 1 Rumah Sakit Khusus Bersalin, 6 Kecamatan, 33 Kelurahan serta Sekretariat Daerah.

Dengan perangkat organisasi tersebut diharapkan struktur organisasi menjadi lebih ramping, bergerak taktis dan strategis, serta dapat mengurangi jabatan struktural yang ada, guna meningkatkan efisiensi kerja dan penyelenggaraan pemerintahan. Penataan kelembagaan pada dasarnya diarahkan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik untuk menghilangkan citra birokrasi sebagai penghambat pembangunan. Dengan demikian, adanya re-organisasi berimplikasi terhadap pengurangan jabatan.

Di antara masalah yang masih menjadi tantangan di masa depan adalah kapasitas aparatur tata kerja. Berbagai kegiatan peningkatan kinerja aparatur dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan, pengawasan, mengikuti pendidikan dan latihan, dan sebagainya. Namun dengan semakin kompleksnya permasalahan perkotaan, dirasakan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam mencapai pelayanan prima masih perlu lebih ditingkatkan lagi.

Tata kerja di masa datang juga penting untuk diperjelas dan dituangkan dalam mekanisme kerja dan *job description* yang baik agar sistem dapat berjalan dengan baik. Tata kerja ini berfungsi sebagai petunjuk operasional SOTK yang sudah ada. Dan saat ini SKPD yang telah memiliki Standar Mutu Nasional (SMN) ISO 9001:2000 adalah sebanyak 6 SKPD.

Hal lain yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, adalah upaya penguatan kelurahan. Saat ini seluruh Kelurahan di Kota Balikpapan telah menjalankan fungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan untuk meningkatkan kualitas perijinan maka telah dibentuk Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) dan Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa (ULP) yang dalam proses kerjanya telah memanfaatkan lelang elektronik (E-Procurement). Langkah-langkah dalam upaya reformasi pelayanan perizinan, meliputi :

- a. Regulasi perizinan usaha dengan memangkas jumlah perizinan dan menata perizinan yang tumpang tindih.
- b. Birokrasi perizinan usaha melalui penyederhanaan prosedur perizinan.

Dalam pelaksanaannya reformasi pelayanan perizinan diformulasikan ke dalam pembentukan pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan satu pintu adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan, sampai dengan penerbitan dokumen secara terpadu dan dilakukan di satu tempat melalui *front office* untuk meminimalisasi interaksi antara pemohon dan petugas perizinan dan menghindari kemungkinan pungutan-pungutan tidak resmi.

Seiring dengan penataan organisasi perangkat daerah Kota Balikpapan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bentuk kelembagaan terpadu satu pintu ditingkatkan dari setingkat kantor menjadi setingkat badan dengan nomenklatur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan dengan asumsi bahwa pelayanan perizinan yang diselenggarakan berkaitan erat dengan investasi di daerah.

Dengan adanya kemudahan perizinan diharapkan akan mendorong kondusivitas iklim investasi di Kota Balikpapan.

Hal-hal yang perlu dilakukan seiring dengan peningkatan kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu meliputi :

1. Revisi Perda-perda terkait dengan prinsip-prinsip pelayanan satu pintu, seperti penyederhanaan, persyaratan dan waktu pelayanan;
2. Penyederhanaan jumlah perizinan dengan menyatukan atau menghapus perizinan yang dianggap tumpang tindih dan menyulitkan pelaku usaha;
3. Pengurangan biaya bagi kategori usaha tertentu;

i. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat daya saing daerah. Berikut ini diuraikan fasilitas wilayah/infrastruktur yang ada di Kota Balikpapan.

ii. Infrastruktur Perhubungan

Sarana jalan raya adalah bagian dari sistem perhubungan utama di Kota Balikpapan. Selain itu ada sarana perhubungan pelabuhan Semayang dan perhubungan udara Internasional Sepinggian. Sebagai sarana utama jalan raya di Kota Balikpapan, panjang jalan di Kota

Balikpapan pada tahun 2011 adalah sepanjang 799,42 km dengan rincian sesuai status jalan sebagai berikut :

- Jalan Nasional : 115,0 Km
- Jalan Propinsi : 221,07 Km
- Jalan Kota : 463,35 Km

Adapun kondisi fisik jalan tersebut sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat bahwa untuk jalan Nasional dalam kondisi baik sepanjang 97,65 km atau 84,91%, kondisi sedang sepanjang 15,33 Km atau 13,33% dan kondisi rusak 2 km. Untuk jalan Propinsi dalam kondisi baik sepanjang 146,43 km atau 66,23%, kondisi sedang sepanjang 51,43 Km atau 23,23% dan kondisi rusak 23,3 Km atau 10,49%. Sedangkan untuk jalan kota dalam kondisi baik sepanjang 305,42 km atau 65,91%, kondisi sedang sepanjang 96,99 Km atau 20,93% dan kondisi rusak 60,94 Km atau 13,15%.

Sebagai kota yang secara fisik berbatasan dengan laut, maka Kota Balikpapan memiliki beberapa fasilitas pelabuhan baik pelabuhan umum maupun pelabuhan khusus. Pelabuhan umum terdiri dari Pelabuhan Semayang, Pelabuhan Fery Kariangau, Pelabuhan Kampung Baru. Sedangkan pelabuhan khusus terdiri dari Pelabuhan Pertamina, Pelabuhan Pendaratan Ikan Manggar, dan Pelabuhan yang dimiliki oleh perusahaan di Kawasan Industri Kariangau.

Keberadaan Pelabuhan Semayang yang berada di pusat kota saat ini menimbulkan bangkitan lalu-lintas yang cukup tinggi terlebih lagi adanya peningkatan bongkar muat barang dan penumpang. Oleh karena itu, di masa yang akan datang pelabuhan ini hanya akan dioperasikan untuk pelabuhan penumpang. Sedangkan pelabuhan bongkar muat barang akan dikembangkan di Kariangau.

Bandar Udara Sepinggian saat ini melayani penerbangan domestik dan internasional. Namun kapasitas bandaranya relatif terbatas dalam menampung penumpang. Oleh karena itu pengembangan bandara baik dari segi *run way* maupun terminal akan mampu meningkatkan pelayanan Bandara Udara Sepinggian.

Secara umum kondisi perhubungan Kota Balikpapan saat ini mulai menghadapi masalah serius dan semakin menjadi ancaman besar di masa datang bila tidak dilakukan terobosan penting. Terlebih lagi dengan perkembangan kota dan pertumbuhan kendaraan yang sangat tinggi. Sehingga Sangat dibutuhkan sistem angkutan umum massal sebagai salah satu solusinya.

i. Sarana Lingkungan (Sanitasi, Drainase, Sampah)

1. Air Limbah

Berdasarkan laporan final Master Plan Air Limbah, perkiraan total produksi air limbah domestik (rumah tangga) untuk black dan grey water di Kota Balikpapan sampai tahun 2015 adalah sekitar 86.312 m³/hari. Untuk mengolah air limbah domestic Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Balikpapan mempunyai beberapa layanan yaitu

- layanan IPAL Margasari, Instalasi ini mulai dioperasikan pada bulan September 2002 dengan jumlah jam operasi selama 24 jam/hari dengan volume limbah yang masuk mencapai $\pm 450 \text{ m}^3/\text{hr}$. Daerah pelayanan sistem pembuangan air limbah dengan perpipaan dan IPAL adalah kawasan seluas $\pm 98,9 \text{ ha}$ di Kel. Margasari Kecamatan Balikpapan Barat, yang mencakup pemukiman di sekitar Jl. Letjen Suprpto, Jl. Pandan Timur, Jl. Pandansari, Jl. Pandanwangi, Jl. Pandanarum, Jl. Semoi, dan Jl. Pandan Barat. Sampai sekarang IPAL Margasari melayani sebanyak 1.308 SR
- Layanan IPAL komunal di Kota Balikpapan bukan hanya dimiliki oleh Pemerintah Kota Balikpapan tetapi juga dimiliki oleh perumahan yang dikelola perusahaan asing. Ada 3 lokasi IPAL komunal tersebut yaitu IPAL Komunal di Perumahan Chevron, IPAL Komunal di Perumahan Villabeta dan IPAL Komunal di Perumahan Total. IPAL Komunal yang terletak di perumahan Chevron ini sudah dibangun dari tahun 1973 sampai sekarang berfungsi

dengan baik dengan jumlah Sambungan Rumah yaitu 50 SR. Sedangkan IPAL Komunal yang terletak di Perumahan Villabeta dapat melayani penghuni di wilayah tersebut sebanyak 70 SR dan IPAL komunal Perumahan Total melayani 48 SR.

- Sedangkan IPAL Komunal yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Balikpapan ini pada umumnya dikelola oleh masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Lokasi IPAL Komunal tersebar di beberapa daerah di Kota Balikpapan yaitu Kelurahan Damai RT 19 dengan KSM Sumber Damai, jumlah pengguna IPAL tersebut 62 KK dengan Sambungan Rumah 70 unit. Kelurahan Mulyo RT 40 dengan KSM Mangrove Mandiri, jumlah pengguna IPAL tersebut 106 KK dengan Sambungan Rumah 80 unit. Kelurahan Sepinggian RT 61 dengan KSM Beriman, jumlah pengguna IPAL tersebut 50 KK dengan Sambungan Rumah 50 unit. Kelurahan Klandasan Ilir RT 32 dengan KSM Al – Hikmah, jumlah pengguna IPAL tersebut 108 KK dengan Sambungan Rumah 62 unit. Kelurahan Margo Mulyo RT 18 dengan KSM Maju Bersama, jumlah pengguna IPAL tersebut 88 KK dengan Sambungan Rumah 70 unit.
- Pemerintah Kota Balikpapan mempunyai juga MCK ++ berada di 2 kelurahan yaitu Kelurahan Margo Mulyo RT 26 dikelola oleh KSM Tirta Guna dengan jumlah pengguna 83 KK sedangkan Kelurahan Margo Mulyo RT 25 dikelola oleh KSM Sendang Makmur dengan jumlah pengguna 70 KK.

2. Drainase

Terdapat 86 (delapan puluh enam) saluran atau sungai yang langsung bermuara di teluk Balikpapan atau di Selat Makasar yang melayani pampatan kota Balikpapan. Tidak ada

saluran primer drainase buatan yang dibuat khusus untuk mengalirkan air pematuan dan air buangan keluar daerah perkotaan. Semua saluran primer drainase yang ada sekarang merupakan saluran alam yang disesuaikan untuk kebutuhan saluran drainase.

Sistem drainase Kota Balikpapan dibagi menjadi 6 (enam) wilayah yaitu wilayah Balikpapan Barat dengan total panjang sungai 22.341 m, wilayah Wain dengan panjang sistem drainase 23.428 m, wilayah somber yang mempunyai panjang 36.022 m, wilayah Balikpapan selatan yang dilayani dengan sungai-sungai kecil yang mempunyai outflow langsung ke Selat Makasar dengan total panjang drainase 110.869 m, wilayah manggar mempunyai panjang drainase 9.232 m dan wilayah Balikpapan Timur 23.981 m.

Kondisi drainase pada umumnya masih kotor oleh sampah dan sedimen sehingga sering kali terjadi penyumbatan pada daerah tertentu dan menyebabkan genangan jika hujan.

3. **Persampahan**

Berdasarkan Master Plan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Kota Balikpapan, pada tahun 2011 kondisi limbah padat (sampah domestik) di Kota Balikpapan yang dihasilkan perhari diperkirakan sebanyak 381 ton/hari dan jumlah sampah yang dapat diangkut dan dikelola DKPP Kota Balikpapan sebesar 250 ton/hari. Kondisi sanitasi kota juga sangat dipengaruhi keberadaan tempat pengumpulan sampah sementara (TPS). Standar pelayanan minimal pelayanan persampahan menetapkan dalam penyediaan sarana pengumpul untuk 1 m³ wadah sampah melayani 200 KK, berdasarkan Masterplan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Kota Balikpapan total kapasitas TPS berupa container dan TPS beton mencapai 1.403,85 m³/hari, sehingga nilai kecukupan mencapai 100 %,

sedangkan pelayanan terhadap penduduk mencapai angka 1 m³/88 KK. Hal ini memperlihatkan bahwa berdasarkan kapasitasnya, jumlah sarana pengumpulan sampah di Kota Balikpapan telah mencukupi kebutuhan.

Pengelolaan sampah secara garis besar saat ini dilayani TPA Manggar dengan sistim sanitary landfill. Untuk pengembangan TPA saat ini sedang dilakukan peningkatan kapasitas pengelolaan air lindi dan pembangunan cell 2 dan 3 yang akan mampu melayani 5 (lima) tahun kedepan. Program pengurangan timbulan sampah dilakukan melalui pengembangan composting, memacu program 3R dan pengembangan bank sampah. selama tahun 2011 telah berhasil mengurangi produksi sampah sebesar 8,92% melalui program komposting sebesar 525 ton/bulan, recycle mencapai 564 ton/bulan dan penggunaan yang lain sebesar 86 ton/bulan.

Program pengembangan dan pengelolaan sanitasi yang meliputi air bersih, drainase, persampahan serta pola hidup bersih dan sehat selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mewujudkan clean land, clean water dan clean air telah disusun secara terpadu dalam Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Balikpapan 2012-2016.

ii. Air Minum (Air Bersih)

Kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Balikpapan dipenuhi dari beberapa sumber yaitu jaringan perpipaan yang dikelola PDAM, PT.Pertamina dan kawasan perumahan tertentu, hidrant umum yang dikelola PDAM, mobil tangki yang dikelola swasta, sumur dalam, sumur dangkal dan air hujan.

Sumber air baku saat ini sangat tergantung pada Waduk Manggar untuk pelayanan seluruh warga kota dan Waduk Pertamina di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain untuk memenuhi kebutuhan operasional kilang dan perumahan PT.Pertamina.

Tingkat cakupan layanan air bersih oleh PDAM saat ini mencapai 72,15% atau sekitar 77.708 sambungan rumah dengan kapasitas produksi PDAM 1.108 lt/dt dan presentasi kehilangan air bersih rata-rata pertahun 30,69%.

Kebutuhan air baku rata-rata pada tahun 2025 mencapai 2.179 lt/detik. Saat ini kapasitas air baku hanya 1.140 lt/dt. Untuk memenuhi kebutuhan air baku tersebut pembangunan Waduk Teritip dan Waduk Wain harus dipercepat. Jika kedua waduk tersebut terbangun maka akan menghasilkan air baku dengan kapasitas 420 lt/dt.

Program penyediaan air baku dan air bersih baik jangka pendek (2011-2015) maupun jangka panjang (2016-2020) khususnya yang dikelola PDAM akan dikembangkan sesuai dengan revisi master plan sistem penyediaan air bersih PDAM Kota Balikpapan Tahun 2005-2020.

iii. Sarana Pendidikan

Sebagai Kota Pendidikan, Kota Balikpapan selalu menjadi tujuan utama para pelajar untuk mengenyam pendidikan, karena Kota Balikpapan memiliki kualitas yang baik dibanding dengan daerah disekitarnya. Sampai dengan Tahun 2011, Kota Balikpapan memiliki 144 TK/RA, 190 SD/MI, 65 SMP/MTs dan 54 SMA/SMK/MA yang tersebar di 6 Kecamatan (Sumber : Dinas Pendidikan Kota Balikpapan).

Sebagai Kota Pendidikan, Kota Balikpapan memiliki 1 (satu) Politeknik Negeri (Politeknik Balikpapan) dan 6 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan 2 Akademi (Sumber Balikpapan Dalam Angka Tahun 2011).

Akan tetapi penyebaran Lembaga Pendidikan tersebut tidak merata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sarana prasarana pendidikan, maupun ketenagaan pendidikan, dimana hal ini akan mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kota Balikpapan, dengan munculnya sekolah favorit dan sekolah yang kurang favorit.

Berbagai upaya telah dilaksanakan Kota Balikpapan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Balikpapan, diantaranya melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, antara lain melalui *Role Sharing* antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi,

akan tetapi kondisi sarana prasarana pendidikan belum memadai. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.36
Rekapitulasi Kondisi Sarana Prasarana Pendidikan Tahun 2011

Jenjang Pendidikan	Jumlah Ruang Kelas	Kondisi Ruang Kelas		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
TK/RA	165	157	4	4
SD/MI	1.548	1.369	136	43
SMP/MTs	786	730	45	11
SMA/SMK/MA	599	582	17	0

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Balikpapan 2011 (data diolah)

Dari kondisi tersebut, di masa datang patut diperhatikan mengenai sebaran sarana pendidikan dan penataan kawasan pendidikan. Hal ini dapat mengurangi pergerakan penduduk khususnya siswa/mahasiswa agar lebih efisien dan tidak terlalu lama dalam perjalanan menuju lokasi belajar. Pelibatan masyarakat dalam penyediaan dan pengembangan sarana pendidikan juga dapat menjadi alternatif penting

Dalam hal ketenagaan pendidikan, Kota Balikpapan memiliki Guru sebanyak 2.835 orang guru SD/MI, 1.569 orang guru SMP/MTs dan 1.673 orang guru SLTA/MA terbanyak adalah guru Sekolah Dasar dan guru SLTA. Rasio guru per sekolah semakin meningkat bila jenjang pendidikan semakin tinggi, karena kebutuhan bidang ilmu yang semakin spesifik.

Tingkat pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio siswa per kelas. Pada tingkat Taman Kanak-Kanak, rasio siswa per kelas sebanyak 35 orang, SD sebanyak 40 orang, SLTP sebanyak 47 orang, SLTA sebanyak 37 orang. Pada tingkat SLTP jumlah anak yang bersekolah relatif banyak bila dibandingkan dengan daya tampung, sehingga rasio per kelas melebihi 40 siswa. Pada tingkat SLTA, rasio ini semakin menurun, karena relatif lebih banyak yang tidak melanjutkan studi.

iv. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2011 adalah 26 unit Puskesmas, 14 unit Puskesmas Pembantu , 7 unit Puskesmas 24 Jam, 1 Unit UPTD Lab dan Rontgen dan 1 unit UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan.

Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya adalah Praktek Dokter Umum 506 Orang, Praktek Dokter Gigi 158 Orang, Praktek Bidan 463 Orang, Praktek Dokter Spesialis 159 Orang, Balai Pengobatan Swasta 15 buah, Klinik Kesehatan 14 buah, Laboratorium Klinik 13 buah, Apotek sebanyak 125 buah, Toko Obat 72 buah.

Dari 11 Rumah Sakit tersebut, 4 diantaranya milik Pemerintah, yaitu RS Kanudjoso Djatiwibowo, RS DR. Hardjanto, RS Bhayangkari, dan Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu milik Pemerintah Kota Balikpapan

Sedangkan Rumah Sakit Swasta berjumlah 7 buah, yaitu RS Pertamina Balikpapan, RS Restu Ibu, RS Shiloam, RS Balikpapan Baru, RS Khusus Bedah Harapan Mulia, RS Bersalin Permata Hati, dan RS Bersalin Kasih Bunda.

Memperhatikan perkembangan kota Balikpapan yang sangat pesat dan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi maka keberadaan sarana kesehatan Kota Balikpapan masih harus ditingkatkan sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal sesuai dengan permasalahan kesehatan perkotaan.

v. Sarana Ekonomi

Sarana ekonomi di Kota Balikpapan, khususnya untuk perdagangan dan jasa memiliki jenis beragam dan tumbuh dengan pola alamiah. Karena pertumbuhannya yang alami dan mengikuti kecenderungan pasar, maka beberapa pusat perdagangan skala besar dibangun dalam jarak terlalu dekat atau justru bersaing dengan pasar yang sudah ada. Usaha ritel dan grosir sudah menjadi tidak jelas lagi, sehingga persaingan dapat dikatakan kurang sehat. Toko-toko kecil sudah semakin terdesak oleh jaringan pertokoan besar dan pasar tradisional

semakin terfokus pada produk-produk pertanian primer (*perishable goods*). Situasi seperti ini bagi ekonomi makro Kota Balikpapan dapat memunculkan potensi *crowding out* investasi, artinya investasi satu kegiatan tergeser oleh persaingan padahal belum mencapai titik keuntungan. Hal ini juga dapat menjadi salah satu pemicu kenaikan biaya-biaya ekonomi di Kota Balikpapan.

Untuk itu pada perekonomian Kota Balikpapan diperlakukan aturan yang jelas dan tegas agar persaingan usaha menjadi lebih sehat dan produktif.

vi. Sarana Peribadatan

Mayoritas penduduk Kota Balikpapan beragama Islam, sehingga jumlah masjid mencapai 335 jumlah langgar 287 jumlah gereja 93, pura 2, dan vihara 5 klenteng 1 Pembangunan Rumah Ibadah sering kali tanpa memperhitungkan cakupan kebutuhan rumah ibadah pada pemeluk agama tertentu, sehingga berkembangnya fasilitas peribadatan dengan pesat tanpa hirarki dan distribusi yang baik menyebabkan fasilitas peribadatan kurang dimanfaatkan secara optimal.

vii. Sarana Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman Umum

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian penting dari ekosistem perkotaan. RTH adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area /kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka (tanpa bangunan).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/ 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, jenis-jenis ruang terbuka hijau kawasan perkotaan Balikpapan dilihat dari segi kepemilikan dibagi menjadi 2 jenis RTH yaitu RTH Publik dan RTH Privat.

RTH privat merupakan RTH yang berlokasi pada lahan-lahan milik privat, misal: halaman rumah tinggal, perkantoran, tempat ibadah, sekolah atau kampus, hotel, rumah sakit, kawasan perdagangan

(pertokoan, rumah makan), kawasan industri, stasiun, bandara, pelabuhan, dan lahan pertanian kota. Sedangkan RTH publik merupakan RTH yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat, daerah) atau dapat diartikan sebagai lahan dengan tujuan penggunaan utamanya adalah ditanami berbagai jenis tetumbuhan untuk memelihara fungsi lingkungan, yang dikelola pemerintah kota dan dapat dipergunakan masyarakat umum, seperti taman rekreasi, taman olahraga, taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau jalan, saluran umum tegangan ekstra tinggi (SUTET), bantaran kali, serta hutan kota (HK) konservasi, HK wisata, HK zona industri, HK antar-zona permukiman, HK tempat koleksi dan penangkaran flora dan fauna.

Ruang terbuka hijau publik yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Balikpapan maupun Pemerintah Provinsi diantaranya yaitu semua jenis RTH jalur hijau, taman kota, makam, hutan kota dan hutan lindung. Selain kelima jenis RTH tersebut, RTH yang dimiliki oleh pemerintah kota yaitu RTH Kariangau, RTH Bendali I & II, Kawasan Bantaran Sungai Jl. A. Yani Karang Jati, dan Kawasan RT.42 & 55 Batu Ampar. Sedangkan ruang terbuka hijau privat (milik pribadi atau badan hukum) diantaranya yaitu Buffer Zone Pertamina Karang Jati (dikelola Pertamina), Kawasan Perumahan TNI AL Karang Jati (dikelola oleh TNI-AL), Hutan Kota Ponpes Syaichona Cholil (dikelola oleh pondok pesantren), Hutan Wisata Inhutani (dikelola PT.Inhutani), Hutan Kawasan Hutan Karangrejo dan Kawasan Hutan Prapatan (dikelola masyarakat). Selain ruang terbuka hijau diatas yang dikelola oleh pemerintah maupun pribadi atau badan hukum, juga terdapat RTH yang dikelola dengan kerjasama antara pemerintah dan swasta yaitu Hutan Kota Gunung Komendur yang berlokasi di Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota.

Sesuai RTRW Kota Balikpapan tahun 2012-2032, 52% wilayah menjadi kawasan ruang terbuka hijau dan hanya 48% yang terbangun. Pemerintah Kota Balikpapan terus meningkatkan luas kawasan ruang terbuka hijau. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap Kawasan Nonbudidaya/Lindung dan Ruang Terbuka Hijau, dapat dihasilkan luasan total Kawasan Nonbudidaya/Lindung dan Ruang Terbuka Hijau yang ada

di Kota Balikpapan yaitu **18.821,742 Ha** atau **37,396%** dari luas wilayah Kota Balikpapan (50.330,57 Ha). Untuk memenuhi prosentase 52%, maka arahan pengembangan kawasan non budidaya (ruang terbuka hijau) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.37
ARAHAN KAWASAN NON BUDIDAYA / LINDUNG KOTA BALIKPAPAN

No.	Kawasan Non Budidaya/Lindung Ruang Terbuka Hijau	Luas	
		Ha	Prosentase Luas Terhadap Kota Balikpapan (%)
1	Kawasan yang memberikan perlindungan dibawahnya		
	1. Hutan Lindung Sungai Wain	9,783.00	19.43
	2. Hutan Lindung DAS Manggar	4,998.99	9.93
	3. Kawasan Paruh Burung	1,449.098	2.88
	4. Kawasan Hutan Inhutani	2,723.322	5.41
	Sub Total	18,954.41	37.65
2	Kawasan Perlindungan Setempat		
	1. Kawasan Waduk	594.737	1.182
	a. Waduk Sungai Wain		
	b. Waduk Sungai Manggar		
	c. Bendali Sepinggian I		
	d. Bendali Sepinggian II		
	e. Bendali Batu Ampar		
	2. Pulau-pulau Kecil	130.348	0.259
	a. P. Benawa Besar		
	b. P. Benawa Kecil		
	c. P. Balang		
	d. P. Babi		
	e. P. Tukung		
	f. P. Lipan		
	g. P. Kelawan		
	h. P. Tak Bernama		
	3. Buffer Zone Bendali	64.581	0.13
	4. Buffer zone hutan lindung	3,274.822	6.51
	5. Green belt waduk	199.46	0.40
	6. Sempadan sungai	121.317	0.24
	Sub Total	4,385.26	8.72
3	Kawasan Suaka Alam		
	1. Kawasan Mangrove	1,302.42	2.588
	2. Wanawisata Inhutani	19.16	0.04
	Sub Total	1,321.58	2.628
4	Ruang Terbuka Hijau		
	1. Tempat Pemakaman Umum (TPU)	99.25	0.19
	2. Taman dan Jalur Hijau	6.31	0.012
	3. Hutan Kota Eksisting	659.938	1.311
	4. Kawasan dengan Kemiringan > 40 %	678.543	1.35
	Sub Total	1,444.041	2.86
5	Kawasan Non Budidaya dan RTH	1,529.917	3,03

	berdasarkan Peta Dasar		
	Total Luas	27,635.213	54.90

Sumber : Bappeda Kota Balikpapan (2009)

RTH pemakaman merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada area pemakaman. Pemakaman umum tersebar di setiap Kecamatan di Kota Balikpapan. Pengelolaan pemakaman tersebut ada yang dikelola oleh pemerintah (Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman) namun ada juga yang dikelola oleh masyarakat setempat. Skala pelayanan pemakaman umum tersebut sebagian besar merupakan skala pelayanan lingkungan, namun ada juga yang berskala besar (kota).

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti sebagai sumber pendapatan.

RTH pemakaman umum di Kota Balikpapan juga merupakan salah satu sarana lain yang masih dapat dianggap mempunyai fungsi sebagai daerah terbuka hijau. Besar luas tanah pekuburan ini sangat tergantung dari sistem penyempurnaan jenazah yang dianut.

Sebaran pemakaman umum di Kota Balikpapan didasarkan pada data mengenai Jumlah dan Luasan Pemakaman Umum yang dikelola oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan, dimana berdasarkan data dari DKPP Kota Balikpapan tersebut diketahui bahwa jumlah tempat pemakaman yang ada di Kota Balikpapan berjumlah 28 makam dan tersebar di seluruh wilayah kota dengan luas total 99,25 ha. Luas makam terbesar berada di Tempat Pemakaman Umum Terpadu di Kecamatan Balikpapan Utara (makam km.15) dengan luas total 48 ha.

Tabel 2.38
Jumlah dan Luas Pemakaman Umum Kota Balikpapan

No	Wilayah Administrasi	Jenis Pemakaman Umum	Luas (ha)
1	Balikpapan Selatan	Makam Prapatan	1,5
		Makam Pasar Baru (3 buah)	2
		Makam Pupuk	1
		Makam Sepinggan	2
		Makam Gunung Bahagia	2
		Makam TMP Dharma Agung	2
Total		6	10,5
2	Balikpapan Timur	Makam Batakan	1,5
		Makam Patok Merah	1,5
		Makam Manggar	2
		Makam Lamaru	1,5
		Makam Lamaru Dalam	1
		Makam teritib	2
		Makam Gunung Tembak	0,75
Total		7	10,25
3	Balikpapan Tengah	Makam Gunung Guntur	1,5
Total		1	1,5
4	Balikpapan Utara	Makam km.0,5 (Gunung Samarinda)	4,5
		Makam km.2,5 (Kristen)	4,5
		Makam km.4	1
		Makam km. 5,5	2
		Makam Kariangau	3,5
		Makam km.8	1
		Makam Transad	1,5
		Makam km.11	2
Makam Tiong Hoa (Cina)	1,5		
Makam km.15	48		
Total		10	21,5
5	Balikpapan Barat	Makam Gunung Empat	1

No	Wilayah Administrasi	Jenis Pemakaman Umum	Luas (ha)
		Makam Gunung Pipa	1,5
		Makam Asrama Bukit	3
		Makam Baru Ulu	2
Total		4	7,5
Total Jumlah Makam dan Luas Makam		28 makam	99,25

Sumber : Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan

2.4. Aspek Daya Saing

Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian kota Balikpapan dalam mencapai tingkat kesejahteraan tinggi yang berkelanjutan dengan tetap terbuka dengan persaingan dalam konteks regional. Daya saing daerah di Kota Balikpapan dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

a. Kemampuan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan banyak membawa tingkat kesejahteraan masyarakat manakala pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat sedangkan masyarakat lain tidak menikmati. Kemampuan ekonomi juga dapat dilihat dari produktivitas pada masing-masing sektor lapangan usaha PDRB Kota Balikpapan. Produktivitas sektor PDRB dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, Pada tahun 2010 PDRB per Kapita Kota Balikpapan dengan migas sebesar Rp. 71.845.402,- atau naik 5,72 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara pendapatan perkapita sebesar Rp.45.133.389 atau naik sebesar 11,22 persen. Sedangkan Pada tahun 2011 PDRB perkapita kota Balikpapan dengan migas sebesar Rp.78.316.576,- naik 9,44 persen dibanding tahun 2010, sedangkan pendapatan per kapita sebesar Rp.52.242.506,- atau naik sebesar 16,48 persen dibanding tahun 2010.

Tabel 2.39
Aspek Daya Saing
Bidang Kemampuan Ekonomi Daerah

Lapangan Usaha	2010*	2011**
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	711.348,42	740.874,28
2. Pertambangan dan Penggalian	26.526,51	29.438,10
3. Industri Pengolahan	21.786.127,08	22.797.423,06
4. Listrik, Gas dan Air	332.535,71	432.050,89
5. Bangunan	5.866.067,68	7.279.238,72
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	6.553.075,70	7.131.105,63
7. Pengangkutan dan Komunikasi	3.060.622,98	3.461.008,17
8. Keuangan, Persewaan & Jasa	1.603.953,56	1.773.958,93
9. Jasa-jasa	1.318.750,73	1.483.223,74
Produk Domestik Regional Bruto	41.259.008,37	45.128.321,52

Dari tabel tersebut, kontribusi sektor usaha terbesar terhadap PDRB Kota Balikpapan adalah sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan, hotel dan restoran serta sektor Bangunan kemudian disusul sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Pada tahun 2010 kontribusi masing-masing sektor usaha tersebut adalah sebagai berikut : Industri Pengolahan sebesar 51,11 %, Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 16,33 %, Bangunan sebesar 14,62 %, sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 7,59 %. Hal tersebut menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Kota Balikpapan didominasi oleh sektor Industri Pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor Bangunan, pengangkutan dan Komunikasi. Sektor perdagangan dan jasa inilah yang akan dikembangkan sebagai aktivitas utama warga masyarakat.

b. Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antara kabupaten/kota, yang meliputi fasilitas transportasi

(jalan, jembatan, terminal, fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan suatu kota.

1. Aksesibilitas Daerah

Sesuai dengan kondisi geografis kota Balikpapan yang terletak pada posisi sentral Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan juga merupakan penopang distribusi perekonomian wilayah sekitarnya. Kondisi infrastruktur merupakan unsur penting yang perlu mendapatkan perhatian agar dapat berfungsi dengan optimal. Dalam mendukung aksesibilitas, Kota Balikpapan memiliki kualitas panjang jalan yang semakin meningkat dalam 3 tahun terakhir ini.

2. Penataan wilayah

Sebagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan, penataan wilayah Kota Balikpapan terbagi menjadi kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. *Kawasan Lindung*, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian Utara. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan sungai, dan sempadan waduk. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. *Kawasan Budidaya*, merupakan kawasan yang secara karakteristik wilayah

Dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah. Kawasan yang dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah adalah sebagai berikut : Kawasan Permukiman, Kawasan perdagangan dan Jasa, Kawasan Minapolitan, Kawasan Pendidikan, Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran, Kawasan olahraga, Kawasan Wisata /Rekreasi, Kawasan perumahan dan permukiman, Kawasan pemakaman Umum, Kawasan Khusus dan Kawasan Terbuka Non Hijau. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan Kota terdapat kompensasi yang tak bisa

dihindari dalam tata guna lahan, yaitu tingginya ratio perubahan alih fungsi lahan. Hal ini ditandai dengan timbulnya pusat- pusat kegiatan baru seperti kawasan perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman daerah pinggiran kota.

3. Ketersediaan air bersih

Pemanfaatan air tanah (non perpipaan) masih menjadi pilihan bagi masyarakat yang belum terjangkau air bersih. Sistem jaringan perpipaan di Kota Balikpapan ini pelayanan dan pengelolaannya dilakukan oleh PDAM. Daya saing ketersediaan air bersih akan semakin membaik dengan selesainya penambahan kapasitas. Di Kota Balikpapan persentase rumah tangga yang mempunyai fasilitas air minum pada tahun 2005, yaitu sebesar 63,33 persen pada tahun 2009 menjadi 69,70 persen. Dan untuk tahun berikutnya terus mengalami kenaikan hingga mencapai 73 persen pada tahun 2011.

4. Fasilitas listrik dan telepon

Perkembangan jaringan telekomunikasi beberapa tahun terakhir cukup menggembirakan, terlihat dengan banyaknya satuan sambungan yang dipasarkan kepada masyarakat. Jika dilihat dari sebaran tiap kecamatan yang ada, maka jaringan telepon telah menjangkaunya seluruh kecamatan. Ketersediaan daya listrik sangat memungkinkan bagi pengembangan investasi.

5. Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Tersedianya fasilitas hotel dan restoran merupakan capaian kinerja daya saing bidang perdagangan dan jasa. Pertumbuhan Hotel dan Restoran baru yang terjadi selama ini merupakan salah satu bahwa pertanda bahwapotensi ekonomi masyarakat masih akan terus meningkat seiringdengan meningkatnya tingkat kesejahteraaan masyarakat.

c. Fasilitas Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnyasangat

dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antar lain fasilitas keamanan dan ketertiban wilayah, kemudahan proses perijinan, dan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing.

1. Keamanan dan Ketertiban

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban sampai dengan tahun 2010 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh apratur pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

2. Kemudahan Perijinan

Faktor pendukung yang sangat erat kaitannya dalam melakukan investasi adalah prosedur dan tata cara perolehan ijin atau pengurusan ijin untuk berinvestasi. Proses perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan satu pintu (*One Stop Services*), melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Balikpapan. Kepastian prosedur, waktu dan keamanan perijinan merupakan kinerja utama pelayanan investasi. Dengan kemudahan perijinan berinvestasi diharapkan akan menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya.

3. Pengean Pajak Daerah

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya berasal dari Pos Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya mendasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya penyesuaian terhadap regulasi yang baru telah mulai

dilaksanakan, dan ini dilakukan agar daya saing di bidang pajak dan retribusi mampu segera diakomodasi.

d. Sumber Daya Manusia

Ukuran pembangunan yang digunakan selama ini, yaitu PDB-dalam konteks nasional dan PDRB-dalam konteks regional, hanya mampu memotret pembangunan ekonomi saja. Untuk itu dibutuhkan suatu indikator yang lebih komprehensif, yang mampu menangkap tidak saja perkembangan ekonomi akan tetapi juga perkembangan aspek sosial dan kesejahteraan manusia. Pembangunan manusia memiliki banyak dimensi, karena itu pula Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia dengan melihat perkembangannya.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM). IPM merupakan suatu ukuran komposit sederhana yang memuat tiga aspek yang dianggap esensial dan operasional untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia secara menyeluruh yaitu peluang hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Dari tabel dibawah ini, terlihat bahwa Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kota Balikpapan tahun 2011 adalah 77,86 Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka Propinsi Kalimantan Timur yang hanya mencapai 76,11, bahkan tertinggi se Kabupaten/Kota dalam Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM di Kota Balikpapan sudah lebih baik dibandingkan SDM di Propinsi Kalimantan Timur secara umum.

Tabel 2.40
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur 2009 - 2011

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	IPM 2009	IPM 2010	IPM 2011	2009	2010	20 11
KALIMANTAN TIMUR		75.11	75.56	76.15	5	5	5
1	Paser	73.99	74.66	75.40	6	6	6
2	Kutai Barat	72.60	72.90	73.65	10	10	10
3	Kutai Kertanegara	72.50	72.90	73.65	11	11	11
4	Kutai Timur	71.23	72.05	72.77	13	13	13
5	Berau	73.22	73.84	74.51	8	7	7
6	Malinau	72.30	72.65	73.27	12	12	12
7	Bulungan	74.68	75.11	75.50	5	5	5
8	Nunukan	73.48	73.84	74.30	7	8	8
9	Penajam Paser Utara	73.11	71.42	71.76	9	9	9
10	Tana Tidung	71.07	71.42	71.76	14	14	14
11	Samarinda	76.68	77.05	77.49	2	2	2
12	Tarakan	76.37	73.74	77.15	4	4	4
13	Bontang	76.52	76.88	77.28	3	3	3
14	Balikpapan	77.86	78.33	78.83	1	1	1



BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 20 (dua puluh) tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik maka pemerintah daerah dapat mempertahankan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJPD karena menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

1. Pendidikan

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tergambar dari tingkat pendidikannya. Melalui pendidikan, masyarakat dapat dibina menjadi tenaga terampil, handal dan produktif sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahtraannya. Keberhasilan untuk membentuk sumber daya manusia

yang terampil dan produktif juga ditentukan oleh kualitas sistem pendidikan. Upaya yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Balikpapan adalah mensukseskan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi anak, khususnya anak usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan dasar.

Seiring dengan penambahan penduduk, maka jumlah anak usia sekolah juga mengalami peningkatan. Pertambahan tersebut ternyata tidak diimbangi dengan ketersediaan fasilitas pendidikan serta kualitas penyelenggaraan pendidikan yang memadai. Keterbatasan tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi proses pendidikan yang sedang dijalankan serta kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan pada masa yang akan datang.

Sebagai kota jasa, industri dan perdagangan, Kota Balikpapan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai.

Namun hal tersebut belum bisa terpenuhi karena sebagaimana tenaga kerjanya belum memiliki tingkat pendidikan yang memadai atau keahliannya tidak sesuai kebutuhan pasar kerja. Kesempatan kerja yang ada sebagian besar diisi oleh tenaga kerja luar Kota Balikpapan yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan terjadi ledakan penduduk.

Oleh karena itu, pemerintah Kota Balikpapan perlu mengembangkan pendidikan unggulan dan kejuruan baik secara formal, non formal maupun informal. Dengan keterampilan dan tingkat pendidikan yang memadai, masyarakat Kota Balikpapan dapat memiliki daya saing untuk memasuki pasar kerja. Hal ini penting artinya untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja yang siap pakai, baik untuk pasar tenaga kerja lokal, regional maupun internasional.

2. Kesehatan

Salah satu indikator kualitas kehidupan masyarakat dapat dilihat dari tingkatan derajat kesehatannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan drajat kesehatan secara terus menerus dan memberikan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Selama ini, pemerintah telah berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan melalui pembangunan rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat serta pemberian pelayanan kesehatan secara gratis. Pelayanan kesehatan gratis diberikan pemerintah Kota Balikpapan melalui program jaminan kesehatan bagi masyarakat dengan menggunakan dana APBD.

Masih banyak ditemukan beberapa jenis penyakit yang diderita warga masyarakat Kota Balikpapan, diantaranya disentri, Demam Berdarah Dengue (DBD), dan gangguan saluran pernafasan Hal ini merupakan indikasi dari masih kurangnya ketersediaan sanitasi yang baik, serta kebersihan lingkungan dan polusi udara.

Salah satu upaya mendasar yang perlu dilakukan adalah memasyarakatkan dan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

3. Kependudukan

Berdasarkan data demografi yang disajikan pada bagian terdahulu, diketahui bahwa penambahan penduduk Kota Balikpapan pertahun cukup tinggi, yakni rata-rata mencapai 4,13 % per tahun. Pertambahan penduduk tersebut umumnya didominasi oleh penduduk pendatang (migrasi). Hal ini

erat kaitannya dengan kondisi Kota Balikpapan sebagai kota jasa, industri dan perdagangan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia untuk bermigrasi ke Kota Balikpapan.

Seperti daerah lainnya, penyebaran penduduk Kota Balikpapan juga tidak merata. Kepadatan penduduk yang tinggi berada di daerah pusat kota, khususnya Kecamatan Balikpapan Tengah dan Balikpapan Selatan. Hal ini mengakibatkan munculnya pemukiman – pemukiman kumuh dengan permasalahan sosial yang cukup tinggi.

Sebagai daerah terbuka, mobilitas penduduk untuk keluar dan masuk Kota Balikpapan cukup tinggi. Penduduk yang datang dan menetap di Kota Balikpapan sebagian tidak melaporkan diri ke pemerintah setempat. Kondisi ini menyebabkan administrasi kependudukan kurang akurat. Hal tersebut dapat diindikasikan pada perbedaan jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh beberapa instansi resmi sehingga menyulitkan pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan pada masa sekarang dan akan datang.

4. Ketenagakerjaan

Keberadaan berbagai macam perusahaan baik yang bergerak di bidang industri, perdagangan dan jasa di Kota Balikpapan memberikan peluang lapangan pekerjaan yang cukup besar. Kondisi ini mendapat perhatian dari pencari kerja diseluruh Indonesia sehingga berdatangan ke Kota Balikpapan untuk mencari pekerjaan. Dengan demikian, walaupun terjadi peningkatan kesempatan kerja namun disisi lain terjadi pula lonjakan peningkatan pencari kerja, dimana peningkatan kesempatan kerja selalu lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Pada masa yang akan datang kebutuhan tenaga kerja di

Kota Balikpapan masih cukup besar mengingat Kota Balikpapan merupakan kota industri, perdagangan dan jasa yang terus berkembang. Sektor perindustrian Kota Balikpapan diprediksi tumbuh positif yang dibarengi dengan kebutuhan tenaga kerja yang profesional. Perkembangan industri tersebut dapat terlihat dari komitmen Pemerintah Kota untuk mengembangkan Kawasan Industri Kariangau.

Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dan stakeholder lainnya untuk memperbaiki mutu dan kualitas tenaga kerja Kota Balikpapan melalui pelatihan dan praktek kerja agar menjadi tenaga yang siap pakai. Rendahnya pendidikan dan keterampilan tenaga kerja akan mengakibatkan sulitnya mencari pekerjaan mengingat pada era globalisasi ini terjadi persaingan tenaga kerja disegala bidang baik tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Selama ini, kesejahteraan dan keselamatan tenaga kerja kurang diperhatikan secara serius oleh pengusaha. Hal ini menyebabkan sering terjadinya konflik antara pekerja dan pengusaha. Dengan demikian diperlukan upaya – upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar merasa aman dalam bekerja.

5. Pemuda dan Olahraga

Dilihat dari komposisi penduduk menurut umur, Kota Balikpapan dapat dikatakan sebagai daerah dalam transisi komposisi penduduk dari kategori penduduk usia muda ke arah penduduk usia tua. Komposisi ini mencirikan bahwa penduduk Kota Balikpapan berada pada kelompok peralihan (intermediate). Hal tersebut dapat terjadi karena Kota Balikpapan sebagai

daerah terbuka dimana mobilitas (migrasi) penduduk usia produktif sangat tinggi.

Sampai saat ini, peran dan fungsi pemuda dalam kegiatan pembangunan di Kota Balikpapan umumnya masih rendah. Kegiatan dan organisasi kepemudaan belum mampu menunjukkan fungsi dan peran lembaga kepemudaan dalam proses pembangunan. Mengingat peran dan fungsi pemuda dalam kegiatan pembangunan di Kota Balikpapan pada masa yang akan datang diprediksi akan meningkat maka diperlukan upaya-upaya untuk mendorong kepedulian terhadap berbagai permasalahan pembangunan.

Secara umum, prestasi olahraga masyarakat Balikpapan cukup baik. Hal ini disebabkan pembinaan yang intensif terhadap cabang-cabang olahraga serta masyarakat yang serius untuk menekuni dunia olahraga. Tingginya animo masyarakat untuk mengembangkan olahraga perlu didukung oleh sarana dan prasarana olahraga yang tersedia. Masih minimnya sarana dan prasarana olah raga menyebabkan atlet-atlet muda berbakat tidak memiliki tempat latihan yang memadai dan latihan-latihan yang dilakukan menjadi kurang intensif. Dengan demikian, atlet-atlet yang ada belum maksimal menunjukkan prestasinya baik di tingkat provinsi ataupun nasional.

6. Kesejahteraan Sosial

Penduduk miskin Kota Balikpapan sebagian besar merupakan pendatang baru tidak memiliki pendidikan dan ketrampilan yang memadai. Kaum pendatang baru tersebut berada di Balikpapan tanpa pekerjaan yang jelas sehingga menambah penduduk miskin.

Kualitas pelayanan serta bantuan dasar terhadap anak terlantar, anak asuh, penyandang cacat dan penduduk lanjut usia akan dididik dan diberi ketrampilan agar dapat berkembang dan diterima dilingkungannya. Kesejahteraan sosial para lanjut usia dan sumber daya manusia pengelola kesejahteraan sosial belum maksimal diperhatikan.

7. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pemerintahan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pemerintahan mengarah pada upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penerapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Secara birokratis kebijakan tersebut diinstruksikan hingga tingkat kelurahan.

Sampai saat ini, pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya serta sarana dan prasarana di kelurahan belum ditingkatkan dan diupayakan secara optimal. Sasaran utama pembangunan tersebut adalah agar kondisi masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan dapat mengakses berbagai kebutuhan baik itu berupa kebutuhan informasi, pendidikan, kesehatan, pemukiman yang layak, listrik, pekerjaan yang layak, pelayanan prima dari pihak pemerintah dan kebutuhan lainnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat, sehingga secara bertahap ekonomi masyarakat miskin akan meningkat.

Berdasarkan fakta yang ada masyarakat Kota Balikpapan masih hidup dalam kondisi yang kurang mandiri dalam arti memiliki sifat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. Upaya pemberdayaan masyarakat di

masa mendatang diharapkan akan mampu memberikan keseimbangan antara upaya penguatan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan dengan kebijakan pemberian kewenangan kepada masyarakat dalam proses pembangunan, dengan penekanan pada aspek lingkungan serta pemantapan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sebagai jajaran pemerintahan terdepan dalam pemberdayaan masyarakat.

8. Reformasi Birokrasi

Pemberian kewenangan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab seperti yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan semua bidang pemerintahan yang terdiri dari 11 kewenangan diluar kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal. Disamping itu, pemerintah daerah mempunyai tugas dan kewajiban berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Pemerintah Kota Balikpapan berupaya keras untuk menata kelembagaan sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Penataan struktur kelembagaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan diharapkan dapat berfungsi secara optimal dalam rangka mengimplementasikan kebijakan yang dirinci dalam bentuk program dan kegiatan agar dapat disesuaikan dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Balikpapan telah membentuk instansi-

instansi pemerintahan. Penataan kelembagaan tersebut diimplikasi juga terhadap penempatan sumber daya manusia berdasarkan kapasitasnya dimasing-masing instansi. Penempatan SDM berdasarkan kapasitasnya diupayakan melalui mutasi pegawai baik tingkat pejabat maupun staf dengan harapan untuk memperoleh kinerja pegawai yang maksimal.

Sebagai salah satu daerah otonom, pemerintah Kota Balikpapan berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dan cepat bagi masyarakatnya. Hal tersebut tentunya dapat dicapai jika sumber daya manusia yang cakap, tangguh dan professional serta didukung ketersediaan teknologi informasi yang memadai.

Walaupun pemerintah berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan melakukan efisiensi organisasi perangkat daerah sesuai kebutuhan dan potensi wilayahnya agar koordinasi antar instansi mudah dibangun dengan cepat. Namun masyarakat tetap saja menganggap bahwa proses birokrasi dalam pemerintahan cukup panjang dan mahal sehingga mengharapkan pelayanan pemerintah yang cepat dan murah.

Sebagai daerah terbuka dengan mobilitas penduduk yang tinggi, Kota Balikpapan juga tidak lepas dari berbagai permasalahan daerah. Untuk mengatasi berbagai permasalahan, berbagai stakeholder belum terkoordinir dengan baik sehingga terkesan lamban dalam proses penyelesaiannya. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul belum mampu diatasi secara maksimal.

9. Penegakan Hukum

Pembangunan di bidang hukum sudah dilakukan oleh pemerintah tetapi belum dapat menjangkau semua program yang direncanakan. Pengembangan Budaya Hukum yang menjadi program prioritas di masyarakat untuk menciptakan kesadaran dan ketaatan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum belum sepenuhnya terwujud. Hal ini disebabkan karena partisipasi masyarakat di bidang hukum masih rendah.

Produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) dijadikan sebagai landasan hukum bagi pemerintah kota untuk menangani masalah-masalah baik yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan maupun yang berhubungan dengan warga masyarakat belum dijalankan dengan baik. Perda belum dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah kota secara maksimal dalam menata aktivitas masyarakat, sehingga timbul kekhawatiran bahwa apa yang dilaksanakan oleh pemerintah bertentangan dengan peraturan-peraturan yang bersifat universal seperti pelanggaran HAM.

10. Komunikasi dan Informasi

Teknologi komunikasi dan informasi merupakan salah satu sektor yang penting dalam kegiatan pembangunan. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, akan membuka akses masyarakat untuk dapat berinteraksi dengan dunia luar dan menjadi sarana penyebaran informasi pembangunan. Hal ini menyebabkan masyarakat dapat berkembang dengan cepat dan berbudaya informasi

Peran media massa di Kota Balikpapan masih belum optimal dalam memberikan informasi yang akurat, lengkap, jujur, adil dan berimbang kepada masyarakat. Saat ini, jaringan televisi dengan muatan lokal yang terbatas. Media cetak dalam bentuk tabloid dan majalah terbit secara berkala, yakni setiap satu minggu, dua minggu, dan tabloid bulanan. Meskipun tren penggunaannya mengalami peningkatan, namun jangkauan layanan maupun mutu penerbitan belum sesuai harapan.

11. Penataan Ruang

Penataan ruang Kota Balikpapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang dimulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dijabarkan lagi dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan lebih detail lagi Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus dan Rencana Teknik Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Kota Balikpapan telah memiliki Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 5 Tahun 2006 Tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan 2005 – 2015. Sesuai dengan Undang – Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Sejak Tahun 2010 Pemeruintah Kota Balikpapan mulai merevisi RTRW tersebut dan telah ditetapkan sebagaimana Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 12 Tahun 2012 Tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan 2012 – 2032. Sebagai acuan operasional perizinan, RTRW Tersebut akan

ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Balikpapan dan peraturan zonasi.

Permasalahan didalam melaksanakan penataan ruang di Kota Balikpapan adalah pesatnya pertumbuhan pembangunan pada pusat kota dan sekitarnya, sehingga terjadi perubahan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Oleh karena itu perlu pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota dan kesadaran masyarakat terhadap rencana tata ruang yang berlaku masih perlu ditingkatkan lagi. Sebagai akibat dari itu semua dampaknya yang bisa dirasakan adalah terjadinya banjir, tanah longsor, kepadatan lalu lintas dan sebagainya, yang seharusnya hal tersebut dapat dieliminir melalui mekanisme perizinan.

12. Perumahan dan Pemukiman

Perkembangan pemukiman di beberapa kawasan yang tidak disertai pemenuhan sarana dan prasarana perkotaan telah menimbulkan pemukiman kumuh serta memunculkan permasalahan sosial perkotaan. Hal ini menyebabkan kualitas lingkungan menurun serta menjadikan kawasan perumahan menjadi tidak berwawasan lingkungan.

Pembangunan perumahan dan pemukiman yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan masyarakat, pemerataan kebutuhan hunian bagi masyarakat serta mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh merupakan harapan pemerintah dan masyarakat. Adanya harapan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi perumahan dan pemukiman di Kota Balikpapan pada masa yang akan datang diyakini akan semakin membaik walaupun penyediaannya masih akan terpusat di daerah perkotaan. Upaya

pengembangan perumahan dan pemukiman ke daerah pengembangan yaitu dengan membangun perumahan Korpri yang diperuntukan bagi Pegawai Negri Sipil Pemerintah Kota Balikpapan memang telah diupayakan pemerintah, tetapi masih terkendala pada terbatasnya ketersediaan sumber energi listrik dan penyediaan air bersih.

Sebagian besar kawasan pemukiman kumuh berada dekat sungai dan pesisir. Tingginya kebutuhan ruang untuk tempat tinggal mengakibatkan tak terkendalinya konversi lahan yang mengakibatkan munculnya potensi lingkungan kumuh dan masih tingginya angka backlog serta masih rendahnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Penataan dan relokasi terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dengan pembangunan Rusunawa yang tersebar di Kota Balikpapan. Hingga Tahun 2012 telah terbangun 1 Unit Rusunawa kawasan DPU yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Balikpapan, dan 3 Unit Rusunawa yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat terdiri dari Rusunawa Manggar, Rusunawa Sepinggian, dan Rusunawa KM 7 Batu Ampar. Pembangunan rusunawa terus ditingkatkan guna Memenuhi Program penataan permukiman.

13. Perhubungan

Sebagai kota yang secara fisik berbatasan dengan laut, maka Kota Balikpapan memiliki beberapa fasilitas pelabuhan baik pelabuhan umum maupun pelabuhan khusus. Pelabuhan umum terdiri dari Pelabuhan Semayang, Pelabuhan Ferry Kariangau, Pelabuhan Kampung Baru. Sedangkan pelabuhan khusus terdiri dari Pelabuhan Pertamina, Pelabuhan

Pendaratan Ikan Manggar, dan Pelabuhan yang dimiliki oleh perusahaan di Kawasan Industri Kariangau. Keberadaan Pelabuhan Semayang yang berada di pusat kota saat ini menimbulkan bangkitan lalu lintas yang cukup tinggi terlebih lagi adanya peningkatan bongkar muat barang dan penumpang. Oleh karena itu, di masa yang akan datang pelabuhan ini hanya akan dioperasikan untuk pelabuhan penumpang. Sedangkan pelabuhan peti Kemas dikembangkan di Kariangau.

Sedangkan untuk transportasi udara dilayani melalui Bandar Udara Internasional Sepinggian yang saat ini melayani penerbangan domestik dan internasional. Namun kapasitas bandaranya relatif terbatas dalam menampung penumpang. Oleh karena itu pengembangan bandara baik dari segi run way maupun terminal akan mampu meningkatkan pelayanan Bandara Udara Sepinggian.

Dalam hal urusan transportasi darat, Pemerintah Kota Balikpapan telah banyak melakukan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan perhubungan darat kepada masyarakat. Sistem transportasi yang handal, berkapasitas massal, efisien dan menjawab kebutuhan terus dikembangkan. sehingga mampu menggerakkan dinamika pembangunan dan mendukung mobilitas manusia dan barang dari dan ke luar Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Balikpapan sudah memiliki Perencanaan Transportasi tentang Pola Transportasi Makro yang meliputi :

- a. Pengembangan Pelayanan Angkutan Umum Massal, Kebijakan ini meliputi perencanaan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM), Perencanaan Angkutan Umum Massal Moderen yang terdiri dari: Monorel dan Trem.

b. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan

Kebijakan ini meliputi pengembangan dan peningkatan kapasitas ruas jalan, peningkatan kapasitas simpang (dengan pembangunan fly over dan underpass), serta pengembangan Automatic Traffic Control System (ATCS).

c. Pengembangan Kebijakan Pendukung

14. Prasarana Jalan

Sarana jalan raya adalah bagian dari sistem perhubungan utama di Kota Balikpapan. Selain itu ada sarana perhubungan pelabuhan Semayang dan perhubungan udara Internasional Sepinggian. Sebagai sarana utama jalan raya di Kota Balikpapan, panjang jalan di Kota Balikpapan pada tahun 2010 adalah sepanjang 799,52 km dengan rincian sesuai status jalan sebagai berikut :

- Jalan Nasional : 115,0 Km
- Jalan Propinsi : 221,07 Km
- Jalan Kota : 463,35 Km

Adapun kondisi fisik jalan tersebut sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat bahwa untuk jalan Nasional dalam kondisi baik sepanjang 97,65 km atau 84,91%, kondisi sedang sepanjang 15,33 Km atau 13,33% dan kondisi rusak 2 km. Untuk jalan Propinsi dalam kondisi baik sepanjang 146,43 km atau 66,23%, kondisi sedang sepanjang 51,43 Km atau 23,23% dan kondisi rusak 23,3 Km atau 10,49%. Sedangkan untuk jalan kota dalam kondisi baik sepanjang 305,42 km atau 65,91%, kondisi sedang sepanjang 96,99 Km atau 20,93% dan kondisi rusak 60,94 Km atau 13,15%.

15. Lingkungan Hidup

Kota Balikpapan memiliki dua hutan lindung yaitu hutan lindung sungai wain memiliki luas 17766.53 ha dan hutan lindung sungai manggar dengan luas 1243.35 Ha. dua hutan lindung ini berfungsi untuk menjaga ketersediaan sumber air baku dan menjaga kualitas udara Indonesia khususnya Kota Balikpapan, melihat fungsi hutan lindung tersebut maka Pemerintah Kota Balikpapan membentuk Badan Pengelolaan Hutan Lindung (BPHLSW) dibawah Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. Tahun 2012 direncanakan pembangunan freeway yang melewati sebagian hutan lindung Kota Balikpapan. Selain hutan lindung, Pemerintah Kota Balikpapan memiliki hutan mangrove yang tersebar dibagian barat khususnya di Kelurahan Margasari, Kelurahan Kariangau. Luas seluruh Hutan mangrove yang dimiliki oleh kota Balikpapan adalah 1859.51 Ha. Saat ini hutan mangrove di Kelurahan Graha Indah yang merupakan pemekaran dari kelurahan Batu Ampar dikelola oleh masyarakat tepatnya masyarakat perumahan Graha Indah untuk ekowisata. Untuk hutan mangrove di Kelurahan Margomlyo telah dimanfaatkan sebagai ekowisata dan tempat pembelajaran siswa tentang ekosistem mangrove, oleh karena itu Pemerintah Kota Balikpapan telah mendirikan SMA 8 yang berdampingan dengan hutan mangrove.

Pemerintah Kota Balikpapan terus menjaga Konsistensi Rasio Pola Ruang Kawasan Lindung 52% : Kawasan budidaya 48% sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Balikpapan dalam melestarikan lingkungan hidup bentuk lainnya adalah:

- a. Konsistensi Tidak Membuka wilayah pertambangan
- b. Pengembangan Konsep *Ecological City*:

- i. *Foresting The City* (Penhijauan kawasan perkotaan dengan tanaman keras/hutan dari Hutan Lindung Sungai Wain),
- ii. *Green Coridor* (Penhijauan pada koridor jalan),
- iii. *Green Industry* pada Kawasan Industri Kariangau (KIK) didukung konsep *zero waste* dan *zero sediment*.

Pelaksanaan Penyehatan lingkungan di masyarakat melalui Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) Kota Balikpapan yang didalamnya terdiri dari masyarakat dan Stakeholder terkait yang turut berperan aktif melakukan sosialisasi dan edukasi melalui sub sektor didalamnya antara lain: air minum, air limbah, persampahan, dan drainase

16. Air Bersih

Pelayanan air bersih di Kota Balikpapan dilaksanakan oleh PDAM Kota Balikpapan yang pada tahun 2005 telah dapat melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat sebanyak 60.613 pelanggan atau 65% dari masyarakat Balikpapan yang perlu mendapatkan pelayanan air bersih .

PDAM Balikpapan saat ini melayani sekitar 73% penduduk Kota Balikpapan dengan 80.600 SR, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Balikpapan saat ini dioperasikan 6 IPA yang bersumber dari air permukaan dan air tanah. Sumber air baku utama berasal dari Waduk manggar yang terletak di Kecamatan Balikpapan Utara yang mampu menyediakan air baku sebesar 900 liter/detik dan dapat bertahan selama 6 bulan tanpa hujan karena memiliki kapasitas tampungan sebesar 16 juta m³ air baku waduk manggar ini dipergunakan sebagai air baku IPA Batu Ampar dan IPA

Kampung Damai, Sumber air baku lainnya beraal dari air tanah (sumur bor) dan sungai.

Kapasitas Produksi terpasang dari seluruh IPA sebesar 1.115 liter/detik seluruh IPA menggunakan sistem pengelolaan lengkap dikarenakan mutu air baku saat ini, beberapa IPA menggunakan air baku dari gabungan air permukaan dan air at Tanah yang dimanfaatkan oleh IPA Batu Ampar dan IPA Kampung Damai.

Ketersediaan air baku kota Balikpapan saat ini hanya 1.104 liter/detik sedangkan kebutuhan air baku mencapai 1.206 liter/detik sehingga terjadi defisit air baku sebesar 102 liter/detik, Target Kota Balikpapan sampai tahun 2016 adalah tersedianya air baku mencapai 1.400 lt/detik sehingga diperlukan perencanaan sumber air baku lain antara lain : Rencana pembangunan Waduk Teritip dan Wain yang sampai tahun 2012 masih terkendala dengan pembebasan lahan yang berdampak pada lambatnya proses sertifikasi bendungan sehinggamenhambat pekerjaan fisik pembangunan bendungan itu sendiri. penggunaan air bawah tanah harus sudah mulai dibatasi mengingat kondisi hidrologi Kota Balikpapan yang tidak menguntungkan.

Upaya lain yang tidak kalah pentingnya yang juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan adalah dengan penggantian pipa transmisi dan pipa distribusi, mengingat pipa tersebut telah dibangun pada tahun 1980 an secara teknis sudah tidak dapat berfungsi secara optimal, sehingga perlu dilakukan penggantian.

17. Perekonomian Kota Balikpapan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan dijelaskan bahwa Kota Balikpapan saat ini memiliki potensi sektor unggulan dari sektor jasa, industri dan perdagangan. Sektor jasa, industri dan perdagangan merupakan sektor unggulan dan menjadi basis ekonomi Kota Balikpapan. Berbeda dengan Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, kontribusi struktur perekonomian Kota Balikpapan sektor tersier tanpa migas memberi kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi kota Balikpapan dimana tahun 2005 sektor tersier yang meliputi Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Sektor keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan Sektor Jasa-jasa memberikan kontribusi sebesar 73,05 itu menggambarkan kota Balikpapan merupakan kota modern.

Sektor non migas di Kota Balikpapan pada tahun 2005 menyumbang 47,22% terhadap perekonomian kota. Pada tahun 2011 kontribusi sektor non migas meningkat menjadi 49,48%. Sektor non migas yang memberikan kontribusi besar adalah sektor Perdagangan, Hotel, Restoran yang saat ini kontribusinya mencapai 16,33 % terhadap sektor PDRB non migas (data tahun 2011). Kontribusi sektor lain yakni sektor perdagangan, keuangan dan jasa tidak menunjukkan perubahan kontribusi yang signifikan dan kontribusinya cenderung stagnan.

Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan selama periode 2005-2011 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,12 persen. Jika sektor migas tidak diperhitungkan, Pendapatan per kapita tahun 2011 mencapai Rp. 32.366.142 atau setara 31.796 US \$ (dengan nilai tukar 1 US \$ = Rp.

10.000). Dan jika sektor migas dalam PDRB diperhitungkan, pendapatan per kapita Kota Balikpapan tahun 2011 sudah mencapai Rp 53.093.814 atau sekitar US \$ 53.094. Perbedaan yang besar antara PDRB perkapita dengan tanpa migas tersebut menunjukkan bahwa tingkat kehidupan masyarakat kota Balikpapan masih dipengaruhi oleh sektor migas.

Perkiraan Kondisi Perekonomian Kota Balikpapan Masa Depan

Salah satu permasalahan penting dalam perumusan visi dan misi Kota Balikpapan adalah bagaimana kondisi perekonomian Kota Balikpapan di masa depan yang mungkin terjadi dan bagaimana pula kondisi ekonomi yang diinginkan oleh stakeholder Kota Balikpapan. Jika ada gap antara yang mungkin terjadi dengan keinginan pemangku kepentingan tersebut, maka visi dan misi serta arah strategi digunakan agar yang diharapkan benar-benar terjadi sehingga keinginan dan kemungkinan kondisi perekonomian tidak terjadi gap. Oleh karena itulah dalam menganalisis kondisi perekonomian Kota Balikpapan di masa depan, maka ini akan mengembangkan berbagai skenario yang mungkin terjadi di masa depan.

Dalam kerangka jangka panjang, skenario perekonomian Kota Balikpapan sebagai berikut :

1. **Skenario Base Line** : Skenario ini merupakan skenario jika perekonomian Kota Balikpapan akan mengikuti tren dalam lima tahun terakhir yakni sektor primer (Pertanian, Pertambangan&Penggalian) mengalami pertumbuhan berfluktuatif dan memberi kontribusi yang rendah dan cenderung mengalami penurunan dan sektor lain tumbuh sebagaimana pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir, dimana kontribusi industri pengolahan minyak masih memberi kontribusi yang

besar sedangkan industry non migas cenderung mengalami perlambatan Skenario ini merupakan skenario yang cenderung pesimis.

2. **Skenario Moderat** : Skenario ini dirancang dengan mengasumsikan bahwa sektor migas tetap tumbuh dan member kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian dengan migas dimana kota Balikpapan hanya sebagai tempat industry pengilangan minyak
3. **Skenario Optimis** : scenario tanpa migas dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi ditambah pertumbuhan yang lebih tinggi di sektor tersier meliputi Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Sektor Pengakutan dan Komunikasi Sektor keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan Sektor Jasa-jasa serta pertumbuhan sektor sekunder industri pengolahan (industri non migas) dan sektor tanpa migas mengalami peningkatan dan akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan.

Jika perekonomian Kota Balikpapan tumbuh mengikuti tren lima tahun terakhir yakni perekonomian tanpa migas akan mengalami peningkatan diatas migas pada tahun 2025 sektor non migas mampu mensubtitusi sektor migas. Skenario ini terjadi jika seluruh stakeholder merespons atas perkembangan sektor non migas dan berusaha usaha untuk mendorong perkembangan sektor non migas. Skenario akan segera terwujud, karena perumusan visi dan misi yang dilakukan dalam penyusunan RPJP Kota Balikpapan merupakan respon atas kondisi yang ada saat ini. Oleh karena itu, skenario yang berpeluang untuk terjadi adalah skenario Optimis .

Jika perekonomian dilihat tanpa migas seperti tren yang terjadi dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang tinggi merupakan gambaran riil, tetapi melalui serangkaian kebijakan pemerintah Kota Balikpapan berhasil mendorong sektor industri, Perdagangan dan jasa 31,81 persen , yang kemudian diikuti oleh bergeraknya sektor jasa, maka perekonomian Kota Balikpapan masih terus akan berkontraksi sampai tahun 2020 dan kemudian perekonomian Kota Balikpapan tanpa migas tumbuh diatas non migas hingga tahun 2025 dan setelah itu perekonomian sektor non migas akan tumbuh dan member kontribusi terhadap perekonomian kota Balikpapan. Dengan kinerja ekonomi demikian, pada tahun 2025 sektor non migas mampu mensubstitusi sektor migas. Tampaknya proyeksi pertumbuhan dan struktur perekonomian dengan skenario optimis tersebut cukup memberikan gambaran basis perekonomian kota Balikpapan sesungguhnya, maka periode RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025, kondisi perekonomian Kota Balikpapan akan tetap tumbuh. Periode ini harus digunakan untuk meletakkan dan memperkuat dasar dalam rangka melakukan mempercepat transformasi ekonomi Kota Balikpapan. Jika percepatan pertumbuhan ekonomi dan transformasi ekonomi yang diharapkan, maka hasil proyeksi skenario yang optimis.

Jika menginginkan Kota Balikpapan tumbuh relatif lebih cepat maka arah kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah adalah tetap mempertahankan sektor perdagangan, jasa dan industri Non Migas dengan kapasitas yang ada saat ini (walaupun dengan pertumbuhan nol) dan diikuti oleh kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor agroindustri, perikanan kelautan jasa maritime, perdagangan dan jasa yang tumbuh relative tinggi, maka mulai tahun 2011 tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan tanpa migas yang cenderung tinggi

dengan kinerja ekonomi demikian, transformasi ekonomi Kota Balikpapan dilakukan dengan mempercepat pembangunan disektor non migas karena sektor non migas baru akan mensubtitusi sektor migas pada tahun 2020. Jika hasil skenario optimis ini menunjukkan bahwa peride RPJPD Kota Balikpapan digunakan untuk meletakkan dan mempercepat dasar transformasi ekonomi Kota Balikpapan, serta dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan migas yang secara makro memberikan kontribusi terhadap perekonomian kota baikpapan Kondisi ini akan bisa dicapai jika sektor industri migas, khususnya minyak, masih akan exist dengn kapasitas yang sama saat ini yang diikuti kebijakan mendorong pertumbuhan sektor non migas ke level pertumbuhan yang relatif tinggi. Usaha yang perlu dilakukan agar sektor industri penggilangan minyak masih bisa beroperasi dengan kapasitas seperti saat ini, serta kebijakan dan langkah-langkah strategis apa yang perlu diambil agar sektor non migas bisa tumbuh dengan tingkat yang relatif tinggi. Ini merupakan salah satu permasalahan penting bagi pemerintah Kota Balikpapan agar kondisi perekonomian dengan skenario optimis ini bisa diwujudkan. Dengan skenario ini, memang transformasi ekonomi akan terjadi setelah peride RPJPD 2005-2025 selesai,

Dari hasil simulasi, maka beberapa kesimpulan terkait dengan perkiraan masa depan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025 seyogyanya diarahkan untuk mentransformasi ekonomi Kota Balikpapan dengan mendorong pertumbuhan sektor non migas utamanya perdagangan. jasa agar struktur perekonomian Kota Balikpapan menjadi lebih kuat. Hasil proyeksi perekonomian dengan baseline (industri migas terus menurun dan sektor lain (non migas) berkembang) menunjukkan bahwa

hingga tahun 2025-an perekonomian Kota Balikpapan akan terus berada dalam peningkatan Hal ini disebabkan besarnya pendapatan dari sektor industri migas (industry penggilangan minyak) dalam perekonomian Kota Balikpapan (saat ini mencapai kurang lebih 50,52 % dari PDRB Kota Balikpapan, sehingga meningkatkan pendapatan dari sektor industri non migas yang akan membuat struktur perekonomian menjadi lebih kokoh.

- 2) Setidaknya ada ruang pilihan untuk melakukan transformasi ekonomi agar struktur ekonomi menjadi lebih kokoh yaitu :
 - a. Pilihan pertama adalah karena karakter sumber daya yang tak terbarukan, sektor industri migas di masa depan akan terus mengalami penurunan., karena sektor non migas akan berkembang lebih baik dan di masa depan akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan.
 - b. Pilihan kedua adalah tetap mengupayakan agar industri migas di Kota Balikpapan tetap exist dengan kapasitas yang ada saat ini dan mendorong pertumbuhan di sektor non migas..tetapi setidaknya jika benar-benar minyak habis kegiatan sebagian jasa service perminyakan akan hilang dan akan mengurangi nilai penggerak ekonomi baikpapan, balance untuk itu adalah adanya industry petrokimia yang menghasilkan produk hiir perminyakan.

Dari fakta-fakta yang diungkapkan mengenai struktur perekonomian Kota Balikpapan seperti yang telah diuraikan di atas, yakni menurunnya kontribusi sektor industri migas dalam perekonomian menunjukkan bahwa saat ini terjadi transformasi perekonomian Kota Balikpapan dari sektor primer (sumber daya alam) dan sekunder (industri berbasis sumber daya alam) ke sektor sekunder-

tersier (industry pengolahan non migas, perdagangan dan jasa). Hal ini merupakan indikasi adanya perubahan yang harus dicermati oleh pemerintah Kota Balikpapan agar pembangunan Kota Balikpapan tetap sustainable.

Dengan memperhatikan potensi Kota Balikpapan serta dukungan diwilayah sekitarnya, maka sektor non migas yang mempunyai potensi unggulan untuk dikembangkan di Kota Balikpapan adalah industri pengolahan perkebunan dan hasil laut, perdagangan dan jasa maritim.

Oleh karena itulah, maka dorongan perekonomian Kota Balikpapan kembali ke jalur pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan langkah-langkah yang serius untuk mentransformasi perekonomian Kota Balikpapan yakni selain menjadi Kota Industri Migas, Kota Balikpapan juga harus dikembangkan menjadi Kota industry, pusat perdagangan dan jasa. Kebijakan transformasi ekonomi tersebut akan membawa Kota Balikpapan menjadi kota yang selama ini dipengaruhi industri migas, menjadi kota yang berbasis industri, perdagangan dan jasa trade inilah tantangan pembangunan Kota Balikpapan saat ini hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

18. Keuangan Daerah

Seperti halnya daerah lain di Kalimantan Timur, penerimaan daerah di Kota Balikpapan didominasi oleh penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk manandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tahun 2011, dana perimbangan memberikan kontribusi 64,41 %. Dalam periode yang sama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan cerminan

kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun dana yang berasal dari daerah hanya memberikan kontribusi sebesar 12,35 %. Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya kemandirian keuangan daerah Kota Balikpapan.

Keuangan daerah Kota Balikpapan 20 (dua puluh) tahun kedepan merupakan sebuah tantangan untuk menggali sumber-sumber keuangan baru. Kondisi tersebut memberikan tantangan bagi Kota Balikpapan untuk dapat menggali berbagai potensi daerah yang dimiliki seoptimal mungkin untuk mencapai kemandirian keuangan daerah sebagai salah satu ciri daerah otonom. Untuk itu, perlu dilakukan pengembangan sarana dan prasarana secara terintegrasi dan meningkatkan aksesibilitas untuk memperlancar aliran investasi dan produksi serta peningkatan tingkat pendidikan dan keahlian sumber daya manusia. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah Kota Balikpapan diharapkan pendapatan asli daerah Kota Balikpapan turut meningkat pula.

19. Pertanian

Potensi pertanian tanaman pangan di Kota Balikpapan tidaklah terlalu menonjol mengingat bahwa Kota Balikpapan adalah daerah perkotaan. Sebagian besar bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat Kota Balikpapan selama ini mengandalkan suplai dari daerah lain. Hal ini dapat dilihat dari peranan sektor pertanian terhadap perekonomian wilayah hanya rata-rata mencapai 0,1% (dengan migas) dan 1 % (tanpa migas).

Hasil kegiatan pertanian tanaman pangan di Kota Balikpapan berupa padi dan palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jenis buah-buahan yang

dihasilkan antara lain : salak dan pepaya Jenis padi dan buah-buahan cenderung mengalami penurunan karena lahannya semakin banyak dikonversi menjadi lahan pemukiman. Jenis palawija dan sayur-sayuran cenderung stabil karena petani menggarap yang umumnya melakukan pinjam pakai terhadap pemilik lahan tidur.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, sebagian besar lahan pertanian dikonversi menjadi lahan pemukiman dan fasilitas umum. Akibatnya petani harus berpindah-pindah mencari lokasi baru yang bisa dimanfaatkan. Selain keterbatasan lahan, permasalahan lainnya yang dihadapi dalam pembinaan dan pengembangan usaha pertanian di Kota Balikpapan adalah :

1. Petani di Kota Balikpapan sebagian besar adalah memanfaatkan lahan yang bukan lahan miliknya, sewa dan pinjam
2. Petani umumnya memiliki tingkat pendidikan, kemampuan dan ketrampilan yang rendah sehingga sulit menerapkan teknologi-teknologi baru yang memerlukan ketrampilan dan penalaran yang memadai.
3. Mahal mekanisasi pertanian
4. Sumber permodalan yang terbatas sehingga praktek sistem ijon terjadi di tingkat petani.

20. Kelautan dan Perikanan

Mengingat wilayah perairan Kota Balikpapan yang luas yang merupakan potensi sudah sepentasnya jika penggalian potensi kelautan lebih ditingkatkan tanpa merusak/mengganggu ekosistem yang ada. Kegiatan

ekspor hasil produksi perikanan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Balikpapan.

Untuk produk olahan hasil perikanan dalam bentuk ikan asin, ikan kering, olahan pangan. Jenis perikanan yang biasa di keringkan seperti terdiri dari tongkol, teri, tenggiri, kakap, dan rumput laut

Selat Makasar memiliki potensi ikan yang besar karena merupakan lalu lintas migrasi ikan. Kondisi ini dapat memberikan hasil perikanan yang lebih besar pada nelayan. Akan tetapi potensi ini belum dikelola mengingat metode penangkapan nelayan masih bersifat tradisional sehingga wilayah penangkapannya hanya disekitar perairan Kota Balikpapan. Selain jumlahnya sedikit, nilai ekonomis ikannya juga rendah sehingga pendapatannya kurang.

Budidaya perikanan Kota Balikpapan yang berjalan dengan baik adalah budidaya rumput laut. Hal ini dapat terjadi karena teknologi budidayanya sederhana, sumber bibit tersedia, pemasarannya mudah dan siklus produksinya singkat. Dengan demikian perkembangannya cukup baik dan produksinya cenderung meningkat dari tahun ketahun.

Budidaya perikanan lainnya belum berjalan dengan baik, masih banyak pembudidaya yang menggunakan cara tradisional.

Berkaitan dengan pengelolaan hasil perikanan maka instansi terkait perlu memperbanyak melakukan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan mutu dan diversifikasi hasil olahan perikanan. Dengan demikian, rumah tangga perikanan belum memperoleh nilai tambah terhadap produksi perikanan dan hasil olahannya.

21. Investasi Daerah

Investasi yang terdapat di Kota Balikpapan dapat dilihat dari kegiatan industrinya. Secara keseluruhan, jumlah industry di Kota Balikpapan menunjukkan peningkatan yang didominasi oleh penambahan unit usaha serta investasi pada industri aneka dan industri kecil aneka formal. Industri kecil aneka non formal selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tidak menunjukkan adanya peningkatan.

Pada masa 20 (dua puluh) tahun kedepan, investasi yang masuk ke Kota Balikpapan diperkirakan akan semakin meningkat terutama pada bidang industri. Hal tersebut ditunjang antara lain (1) Kebijakan pemerintah kota untuk mengembangkan kawasan industri di Kota Balikpapan, (2) Membaiknya iklim investasi nasional dan membaiknya indikator ekonomi makro, (3) Meningkatnya akses transportasi, komunikasi dan informasi antar wilayah, (4) Terbukanya jaringan kerja sama antar daerah dan antar Negara khususnya dengan Negara tetangga yang berbatasan langsung maupun dengan Negara lain yang berminat dengan potensi daerah yang dimiliki Kota Balikpapan, (5) Meningkatnya jumlah dan mutu tenaga kerja terampil dan terdidik.

22. Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Koperasi

Dalam perekonomian Kota Balikpapan sektor industri memegang peranan yang sangat penting. Kegiatan industri yang ada di Kota Balikpapan terdiri dari industri non migas yang terdiri dari industri besar/sedang, industri kecil dan industri rumah tangga. Kegiatan industry menengah dan besar di Kota Balikpapan merupakan supporting industry migas.

Ketergantungan industri migas sangat tinggi. Penurunan produksi migas beberapa tahun terakhir ini telah berpengaruh langsung terhadap PDRB Kota Balikpapan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan industri-industri lainnya yang mampu mengurangi ketergantungan pada industri ini.

Sementara itu, pada bidang perdagangan di Kota Balikpapan terdiri dari perdagangan kecil, menengah dan besar. Secara keseluruhan di Kota Balikpapan terdapat sarana perdagangan sebanyak 16 (enam belas) buah pasar tradisional, 7 buah mall/plaza,

Pada bidang Koperasi, secara umum koperasi di Kota Balikpapan terdiri dari berbagai jenis koperasi. Jumlah koperasi yang ada cenderung tidak bertambah. Walaupun telah berkembang secara finansial, tetapi pola manajemennya masih kurang profesional. Dalam struktur kepengurusan, masih terdapat pengurus yang belum memahami peran dan fungsinya dalam organisasi sehingga koperasi-koperasi berjalan apa adanya. Koperasi hanya dikendalikan oleh satu orang yang memungkinkan terjadinya perpecahan ketika sang pemimpin diganti.

Pada umumnya industri kecil skala rumah tangga merupakan kegiatan informal dengan tingkat produktivitas yang terbatas. Kualitas produk yang dihasilkan masih rendah menyebabkan pangsa pasar produk industri kecil menjadi sangat terbatas. Kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan modal yang dimiliki, kelemahan teknologi, dan manajerial masih kurang.

Industri skala besar berupa industri migas menjadi kekuatan utama yang sangat menentukan perkembangan kegiatan ekonomi Kota Balikpapan. Industri-industri kecil belum berkembang secara maksimal. Teknologi yang

digunakan masih sederhana, pembagian kerja yang longgar dan cenderung lebih mudah untuk menyerap tenaga kerja.

23. Pariwisata

Kegiatan pariwisata di Kota Balikpapan secara umum belum berkembang. Pariwisata di Kota Balikpapan saat ini berupa wisata alam, budaya dan sejarah. Menurut rencana induk pengembangan pariwisata Kota Balikpapan terdapat 15 (lima belas) obyek pariwisata yang perlu dikaji, potensial dikembangkan, maupun sudah berkembang namun belum ditangani secara profesional.

Pada dasarnya, semua lokasi objek pariwisata ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua atau roda empat bila berlokasi didarat, dan dapat ditempuh dengan perahu motor atau speedboat untuk obyek yang berlokasi dipesisir atau di laut. Sarana penunjang berupa hotel terdiri dari hotel bintang sebanyak 16 (Enam belas) unit terdiri dari 2 bintang 5, 2 bintang empat, 8 bintang empat, 3 bintang dua, 2 bintang 1 dan non bintang sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit.

Jika dibandingkan dengan daerah lainnya, Kota Balikpapan memiliki ekosistem pesisir yang lengkap karena terdapat hamparan mangrove, padang lamun dan terumbu karang dengan segala keanekaragamannya. Hal ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar ekowisata dan penelitian.

Kawasan-kawasan tujuan wisata Kota Balikpapan umumnya belum tertata dengan baik. Sarana dan prasarana sarta kegiatan promosi wisata untuk pendukung kepariwisataan masih kurang sehingga proses

pembenaannya terkesan lamban. Selain itu beberapa kawasan tujuan wisata tersebut berada dalam lokasi perusahaan sehingga waktu dan pengunjungnya terbatas dan penataan dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan.

3.2. Isu Strategis

1. Reformasi Birokrasi

Pemerintah daerah mempunyai tugas dan kewajiban berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Balikpapan perlu menata kelembagaan yang diikuti dengan penempatan sumber daya manusia berdasarkan kapasitasnya dimasing-masing lembaga/instansi. Disamping itu pemerintah Kota Balikpapan berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dan cepat bagi masyarakatnya. Hal tersebut tentunya dapat dicapai jika sumber daya manusia yang cakap, tangguh dan professional serta didukung ketersediaan teknologi informasi yang memadai.

Dalam penegakan hukum, pemerintah kota perlu mengembangkan Budaya Hukum di masyarakat untuk menciptakan kesadaran dan ketaatan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara. Disamping itu Produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) dijadikan sebagai landasan hukum bagi pemerintah kota untuk menangani masalah-masalah baik yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan maupun yang berhubungan dengan warga masyarakat belum

dijalankan dengan baik. Perda belum dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah kota secara maksimal dalam menata aktivitas masyarakat, sehingga timbul kekhawatiran bahwa apa yang dilaksanakan oleh pemerintah bertentangan dengan peraturan-peraturan yang bersifat universal seperti pelanggaran HAM.

2. Degradasi Lingkungan Hidup Kota

Lingkungan hidup dan permukiman sehat menjadi prioritas pembangunan 2005-2025. Berbagai permasalahan lingkungan hidup yang telah disampaikan pada bab sebelumnya menjadi prioritas yang harus dituntaskan selama 20 tahun mendatang. Program konservasi hutan dan lahan yang telah berhasil akan tetap dipertahankan disamping terus mendorong dan fokus pada pelestarian serta rehabilitasi hutan dan lahan yang kondisinya masih kritis. Pengawasan dan pengendalian pencemaran akibat kegiatan usaha maupun permukiman harus ditingkatkan untuk mewujudkan clean land, clean water dan clean air. Peningkatan peran masyarakat secara luas dalam pelestarian lingkungan juga harus dikembangkan sehingga timbul kesadaran dalam masyarakat bahwa pelestarian dan pengelolaan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama.

Program pengembangan dan pembangunan sanitasi telah direncanakan untuk lima tahun mendatang melalui Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang merupakan sinergitas peran berbagai pemangku kepentingan sehingga terwujud sanitasi sehat Kota Balikpapan.

3. Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur serta Penataan Kota

Infrastruktur perkotaan merupakan fasilitas fisik yang harus disediakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga berperan sangat penting dalam pembangunan. Pembangunan infrastruktur perkotaan tersebut telah dapat dirasakan oleh masyarakat, namun patut diakui belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Sektor infrastruktur terdiri atas prasarana transportasi, sumber daya air, dan prasarana permukiman yang berperan sebagai pembentuk struktur ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, serta pengikat antar wilayah. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur harus terus dilakukan dalam mendukung perekonomian.

Dibidang prasarana transportasi hingga tahun 2010 adalah Jalan Nasional dalam kondisi rusak 15,09% dari 115 Km, Jalan Propinsi dalam kondisi rusak 33,77% dari 221,07 Km, dan Jalan Kota dalam kondisi rusak 34,09% dari 463,35 Km. Kerusakan jalan tersebut disebabkan oleh kapasitas drainase jalan yang mengalami penurunan standar teknis, pengembangan permukiman yang cukup tinggi sehingga membuka jaringan jalan baru yang belum permanen, kondisi indiscipliner dari para supir yang memuat kendaraan yang melebihi tonase jalan yang ditetapkan, namun lebih diutamakan oleh faktor daya dukung tanah (lempung, podsolik merah kuning) yang kurang memenuhi persyaratan teknis jalan sementara secara teknis minimal daya dukung tanah minimal (angka CBR) 6%. Disamping itu belum terealisasinya SAUM sebagai wujud penyelenggaraan transportasi menghubungkan antar moda transportasi.

Dibidang sumberdaya air, ketersediaan air baku Kota Balikpapan saat ini hanya 1.104 liter/detik sedangkan kebutuhan air baku mencapai 1.206 liter/detik sehingga terjadi defisit air baku sebesar 102 liter/detik. Rencana

pembangunan Waduk Teritip dan Wain masih terkendala oleh pembebasan lahan yang berdampak pada lambatnya proses sertifikasi bendungan sehingga menghambat pelaksanaan fisik pembangunan bendungan itu sendiri. Penggunaan air bawah tanah harus sudah mulai dibatasi mengingat kondisi hidrologi Kota Balikpapan sangat terbatas. Target Kota Balikpapan sampai tahun 2016 adalah tersedianya air baku mencapai 1.400 lt/detik.

Dibidang pra sarana permukiman, tingginya kebutuhan ruang untuk tempat tinggal mengakibatkan tak terkendalinya konversi lahan yang mengakibatkan munculnya potensi lingkungan kumuh dan masih tingginya angka *backlog* serta masih rendahnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendahbanjir.

Disamping itu pemenuhan layanan air bersih, sanitasi (air limbah, sampah, dan drainase) terutama masyarakat berpenghasilan rendah masih dirasakan minim. Cakupan layanan air bersih perpipaan mencapai 73 % terkendala karena terbatasnya kapasitas air baku. Cakupan layanan air limbah perpipaan hanya 2 %, sedangkan 98% air limbah masih dibuang ke tanah atau badan air tanpa pengolahan terlebih dahulu. Cakupan layanan persampahan sudah mencapai 80 % dengan timbulan sampah 290 ton/hari, namun pengelolaan sampah berbasis masyarakat (3R) masih rendah. Sedangkan drainase masih kurang berfungsi optimal karena masih tingginya sedimentasi dan ditemukannya sampah, terutama pada drainase lingkungan permukiman, yang menimbulkan banjir pada 12 lokasi dengan ketinggian genangan > 30 cm yang memerlukan penanganan hingga tahun 2011,

meskipun telah mengalami penurunan dari 87 lokasi genangan air pada tahun 2004/2005.

Semua hal tersebut diatas merupakan tantangan dalam pelaksanaan penataan ruang di Kota Balikpapan guna mewujudkan pembangunan yang selaras dengan rencana tata ruang. Saat ini Kota Balikpapan telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2005 – 2015 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006. Kebijakan penataan ruang yang dituangkan dalam RTRW Kota Balikpapan adalah kebijakan penggunaan lahan 52% luas wilayah sebagai kawasan non budidaya dan 48% luas wilayah kota sebagai kawasan budidaya. Sedangkan pada RTRW Tahun 2012 – 2032 yang hingga saat ini sedang dalam tahap pengesahan Raperda-nya, terdapat kebijakan penataan ruang tambahan dalam penataan ruang Kota Balikpapan yaitu *Foresting The City* dan *Green Coridor*. Oleh karena itu, pembangunan bukan hanya diarahkan untuk sesuai dengan peruntukan lahan dalam RTRW Kota Balikpapan, juga diarahkan untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang tersebut di atas.

4. Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan tidak bermaksud mempertentangkan ekonomi besar dengan ekonomi kecil. Persoalan ekonomi kerakyatan bukan mempertentangkan antara *wong cilik* dengan *wong gedhe*. Ekonomi kerakyatan bukan bagaimana usaha kecil, menengah, dan usaha mikro dilindungi. Ekonomi kerakyatan bukan ekonomi belas kasihan, bukan ekonomi penyantunan kepada kelompok masyarakat yang kalah dalam persaingan. Tetapi ekonomi kerakyatan adalah tatanan ekonomi dimana aset

ekonomi dalam perekonomian nasional didistribusikan kepada sebanyak-banyaknya warga negara. Secara definisi ekonomi kerakyatan adalah:

- (1) Tata ekonomi yang dapat memberikan jaminan pertumbuhan *output* perekonomian suatu negara secara mantap dan berkesinambungan, dan dapat memberikan jaminan keadilan bagi rakyat.
- (2) Tata ekonomi yang dapat menjamin pertumbuhan *output* secara mantap atau tinggi adalah tata ekonomi yang sumber daya ekonominya digunakan untuk memproduksi jasa dan barang pada tingkat pareto optimum. Tingkat pareto adalah tingkat penggunaan faktor-faktor produksi secara maksimal optimum dan tidak ada faktor produksi yang menganggur atau *idle*.
- (3) Tata ekonomi yang dapat menjamin *pareto optimum* adalah tata ekonomi yang mampu menciptakan penggunaan tenaga kerja secara penuh (*full employment*) dan mampu menggunakan kapital atau modal secara penuh.
- (4) Tata ekonomi yang dapat memberikan jaminan keadilan bagi rakyat adalah tata ekonomi yang pemilikan aset ekonomi nasional terdistribusi secara baik kepada seluruh rakyat, sehingga sumber penerimaan (*income*) rakyat tidak hanya dari penerimaan upah tenaga kerja, tetapi juga dari sewa modal dan deviden. Secara ekonomis, dalam perekonomian kerakyatan, model income masyarakat adalah sebagai berikut: $Y_i = (W + f + is)_i$. Dimana Y_i adalah income individu anggota masyarakat, W adalah penerimaan dari upah tenaga kerja, f adalah penerimaan dari *deviden* atau bagi hasil sisa usaha, i adalah tingkat sewa modal (misalnya bunga deposito), dan s adalah jumlah tabungan

atau *endowment* yang disewakan. Dengan demikian dalam tata ekonomi kerakyatan, masyarakat bukan hanya sebagai buruh dalam perekonomian tetapi juga pemilik atau memiliki saham di sektor produksi.

Tujuan utama ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Bila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih lanjut, maka isu strategis ekonomi kerakyatan di Kota Balikpapan dalam garis besarnya meliputi empat hal berikut:

1. Kurang tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh warga masyarakat.
2. Belum maksimalnya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terantar.
3. Belum optimalnya distribusi kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat.
4. Belum maksimalnya jaminan kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

5. SUMBER DAYA KELAUTAN

Kota Balikpapan memiliki potensi perikanan tangkap seluas 337.805 KM² yang membentang disepanjang selat makassar dan laut sulawesi, sedangkan potensi perikanan budidaya Tambak seluas +- 905 Ha, yang tersebar di dua kecamatan yaitu Balikpapan Timur dan Balikpapan Barat.

Produksi Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan secara total masih

didominasi oleh sektor perikanan tangkap yaitu sebesar 95,3% sedangkan sisanya berasal dari sektor perikanan Budidaya yaitu sebesar 4,5%.

Isu-isu strategis pada sektor kelautan dan perikanan tahun 2005-2025, antara lain:

1. Kurangnya Kapasitas SDM Nelayan dan pembudidaya (Keterampilan, Penguasaan Teknologi, Pola Pikir dan Lain-lain) membatasi optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan.
2. Kemiskinan dan kesejahteraan nelayan.
3. Terbatasnya fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan.
4. Terbatasnya armada penangkap ikan baik jumlah maupun kapasitas.
5. Tidak adanya sistem monitoring pendaratan hasil penangkapan ikan dan stok sumber daya ikan.
6. Kebutuhan konsumsi ikan cenderung meningkat.
7. Konflik penggunaan ruang antar sektor perikanan, pariwisata dan perhubungan.
8. Belum tersedianya data akurat mengenai potensi budidaya perikanan.
9. Belum optimalnya pemanfaatan ruang dan pulau-pulau kecil sebagai lokasi budidaya laut.
10. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan budidaya.
11. Kualitas produk perikanan masih rendah.

6. Sumber Daya Manusia

Dari permasalahan yang dipaparkan di atas, terdapat isu strategis dalam pengelolaan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi bidang

Pendidikan yaitu ketersediaan fasilitas pendidikan serta kualitas penyelenggaraan pendidikan perlu mendapatkan perhatian utama. Sebagai kota jasa, industri dan perdagangan, Kota Balikpapan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai. Namun hal tersebut belum bisa terpenuhi karena sebagian tenaga kerjanya belum memiliki tingkat pendidikan yang memadai atau keahliannya tidak sesuai kebutuhan pasar kerja. Pemerintah Kota Balikpapan perlu mengembangkan pendidikan unggulan dan kejuruan baik secara formal, non formal maupun informal.

Bidang kesehatan, yang perlu diperhatikan adalah Jenis penyakit yang masih sering dialami oleh masyarakat diantaranya adalah disentri, Demam Berdarah Dengue (DBD), dan gangguan saluran pernafasan. Penyebab utamanya adalah masih kurangnya ketersediaan sanitasi yang baik, serta kebersihan lingkungan dan polusi udara. Seiring dengan penambahan penduduk yang pesat maka diperlukan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Serta tersedianya jaminan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada semua lapisan masyarakat melalui pengembangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan.

Bidang Kependudukan, bahwa penambahan penduduk Kota Balikpapan pertahun cukup tinggi, yakni rata-rata mencapai 4,13 % per tahun. Pertambahan tersebut umumnya didominasi oleh penduduk usia produktif yang disebabkan oleh migrasi. Hal ini erat kaitannya dengan kondisi Kota Balikpapan sebagai kota jasa, industri dan perdagangan yang menjadi daya tarik masyarakat Indonesia untuk mendapatkan peluang kerja di Kota Balikpapan. Disamping itu penyebaran penduduk Kota Balikpapan juga tidak

merata. Hal ini mengakibatkan munculnya pemukiman – pemukiman kumuh dengan permasalahan sosial yang cukup tinggi.

Bidang Ketenagakerjaan, bahwa kebutuhan tenaga kerja di Kota Balikpapan masih cukup besar mengingat Kota Balikpapan merupakan kota industri, perdagangan dan jasa yang terus berkembang. Sektor perindustrian Kota Balikpapan diprediksi tumbuh positif yang dibarengi dengan kebutuhan tenaga kerja yang profesional. Perkembangan industri tersebut dapat terlihat dari komitmen Pemerintah Kota untuk mengembangkan Kawasan Industri Kariangau.

Untuk itu memperbaiki mutu dan kualitas tenaga kerja Kota Balikpapan melalui pelatihan dan praktek kerja agar menjadi tenaga yang siap pakai. Disamping itu kesejahteraan dan keselamatan tenaga kerja perlu mendapat perhatian secara serius. Diperlukan upaya – upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar merasa aman bekerja.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, bahwa peran aktif perempuan dalam pembangunan dinilai masih kurang. Pekerja sektor formal umumnya didominasi oleh kaum laki-laki sehingga peluang bagi perempuan untuk berkarier masih rendah. Ditinjau dari disparitas pendapatan sektor non pertanian, penghasilan perempuan dan laki-laki di Kota Balikpapan. Masih banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Bidang Pemuda dan Olah Raga, bahwa peran dan fungsi pemuda dalam pembangunan di Kota Balikpapan umumnya masih rendah. Kegiatan dan organisasi kepemudaan belum mampu menunjukkan fungsi dan peran lembaga kepemudaan dalam proses pembangunan. Mengingat peran dan fungsi pemuda dalam kegiatan pembangunan di Kota Balikpapan pada masa

yang akan datang diprediksi akan meningkat maka diperlukan upaya-upaya untuk mendorong kepedulian terhadap berbagai permasalahan pembangunan. Dalam hal prestasi olahraga masyarakat Balikpapan cukup baik. Tingginya animo masyarakat untuk mengembangkan olahraga perlu didukung oleh sarana dan prasarana olahraga yang tersedia. Masih minimnya sarana dan prasarana olah raga menyebabkan atlit-atlit muda berbakat tidak memiliki tempat latihan yang memadai dan latihan-latihan yang dilakukan menjadi kurang intensif. Dengan demikian, atlit-atlit yang ada belum maksimal menunjukkan prestasinya baik di tingkat provinsi ataupun nasional.

Permasalahan Kemiskinan, masih akan terjadi di Kota Balikpapan. Hal ini dikarenakan penduduk miskin Kota Balikpapan sebagian besar merupakan pendatang baru tidak memiliki pendidikan dan ketrampilan yang memadai. Kaum pendatang baru tersebut berada di Balikpapan tanpa pekerjaan yang jelas sehingga menambah penduduk miskin. Disamping itu pelayanan serta bantuan dasar terhadap anak terlantar, anak asuh, penyandang cacat dan penduduk lanjut usia perlu mendapatkan perhatian.



BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1. VISI

Visi pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Balikpapan tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota 5 Dimensi :
Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan &
Budaya dalam Bingkai Madinatul Iman.”**

Kota Jasa

Sejak awal perkembangannya sampai dengan saat ini dan perkembangan Balikpapan kedepan dapat dipastikan bahwa kota ini berkembang sebagai Kota Jasa. Keberadaan infrastruktur berbagai moda perhubungan, keberadaan kantor-kantor pelayanan skala Kalimantan Timur dan Kalimantan, ketiadaan sumber daya alam yang dieksploitasi, serta keberadaan fasilitas penunjang perkotaan lainnya memperkuat fungsi Kota Balikpapan sebagai Kota Jasa. Skala pelayanan jasa Kota

Balikpapan tidak hanya meliputi lingkup Provinsi Kalimantan Timur tetapi juga meliputi wilayah Kalimantan bahkan Indonesia bagian Timur. Pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur perhubungan pada saat ini akan semakin memperluas jaringan lingkup pelayanan jasa Kota Balikpapan kedepan. Tingginya

intensitas berbagai pertemuan, pameran dan konferensi baik skala regional, nasional maupun internasional menjadikan Kota Balikpapan dikenal sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition).

Kota Industri

Pengeboran minyak pertama di sumur mathilda oleh perusahaan JH Menten dan Firma Samuel And Co pada tanggal 10 Februari 1897, merupakan momentum penting bagi Balikpapan untuk menjadi Kota Industri yang sampai dengan saat ini berkembang menjadi industri pengolahan minyak terbesar diluar pulau jawa. Keberadaan kilang minyak ini berperan strategis untuk mensuplai kebutuhan migas khususnya di Indonesia Timur. Dalam perkembangannya kegiatan industri di Kota Balikpapan semakin tumbuh baik kegiatan industri yang mendukung industri pengolahan minyak tersebut maupun kegiatan industri lainnya seperti industri galangan kapal, perkayuan, bahan bangunan dan lain-lain.

Dipersiapkannya lahan seluas 9 Ha untuk relokasi industri tahu tempe dan industri kecil lainnya serta ditetapkannya Kawasan Industri Kariangau pada RTRW 2005-2015 seluas 2.189 Ha dan lebih diperluas lagi menjadi 2.721 Ha pada RTRW 2012-2032 akan semakin memperkuat posisi Kota Balikpapan sebagai Kota Industri.

Kota Perdagangan

Fungsi Kota Balikpapan sebagai Kota perdagangan diawali dari para saudagar bugis yang melakukan aktivitas perdagangan di kawasan pesisir kampung baru. Kemudian dibangun dan difungsikannya pelabuhan Semayang Balikpapan sebagai pintu masuk dan keluarnya barang, orang dan jasa serta berkembangnya berbagai fasilitas perdagangan di Kota Balikpapan semakin memperkuat fungsi Balikpapan

sebagai Kota Perdagangan. Fungsi pelayanan perdagangan Kota Balikpapan tidak hanya mencakup wilayah Balikpapan tetapi mencakup pula wilayah Kalimantan Timur. Dibangunnya dan dikembangkannya pelabuhan peti kemas kariangau dan diperluasnya berbagai fasilitas bandar udara sepinggan akan semakin memperluas cakupan pelayanan perdagangan Kota Balikpapan.

Kota Pariwisata

Keberadaan Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur dan kota transit mendorong Kota ini berkembang menjadi Kota Pariwisata, yang pada awalnya lebih berfungsi sebagai pendukung sektor pariwisata wilayah Kalimantan Timur. Oleh karena itu di Kota Balikpapan banyak tersedia fasilitas penginapan dan restoran serta berkembangnya bisnis biro perjalanan. Posisi geografis Balikpapan yang memiliki garis pantai sepanjang lebih kurang 45,6 Km, banyaknya peninggalan sejarah di kota ini dan komitmen yang kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup mengarahkan Balikpapan mengembangkan berbagai objek pariwisata. Rencana pembangunan *coastal road*, pengelolaan Teluk Balikpapan dan pelestarian mangrove dan pesisir pantai akan semakin menumbuh kembangkan sektor pariwisata Kota Balikpapan.

Kota Pendidikan & Budaya

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menjadikan warga Kota Balikpapan menjadi tuan di rumah sendiri, Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk mengembangkan berbagai lembaga dan fasilitas pendidikan. Ditetapkannya Balikpapan sebagai Kota vokasi Pemerintah Kota mengembangkan sekolah-sekolah menengah kejuruan dan SMK Model serta membangun Politeknik Balikpapan. Komitmen Pemerintah Kota ini didukung pula oleh peran sektor swasta

yang juga turut mengembangkan lembaga pendidikan yang cukup berkualitas baik formal maupun informal. Pada perkembangan selanjutnya Politeknik Balikpapan didukung Pemerintah pusat menjadi Politeknik Negeri. Dorongan dari Pemerintah Pusat untuk membangun dan mengembangkan Institut Teknologi Kalimantan akan semakin memperkuat peran dan fungsi pelayanan Kota Balikpapan sebagai kota pendidikan.

Heterogenitas penduduk Kota Balikpapan merupakan potensi berkembangnya Balikpapan sebagai Kota Budaya. Keberadaan ratusan paguyuban yang tumbuh di kota ini, berikut pembinaannya yang dilakukan pemerintah kota serta dibangunnya fasilitas gedung kesenian, merupakan pilar-pilar yang menopang Balikpapan sebagai Kota Budaya.

Madinatul Iman

Madinatul Iman bermakna bahwa Balikpapan menjadi pusat peradaban maju dengan landasan Iman sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Madinah (Madinat) atau madani mengandung makna suatu kota yang masyarakatnya berperadaban maju, dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam kondisi masyarakat yang majemuk (multi etnis, multi agama dan multi budaya). Masyarakat dalam Madinatul Iman merupakan Masyarakat Madani atau masyarakat yang berperadaban maju yang didukung pemerintahan yang baik, dan menjadikan Iman sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai landasan dalam seluruh gerak pembangunan.

4.2. MISI

Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
2. Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai;
3. Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan;
4. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif;
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik.

4.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Misi RPJP Kota Balikpapan 2005-2025, maka dirumuskanlah beberapa tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran misi tersebut adalah sebagai berikut :

MISI-1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing

Tujuan-1 :

Meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan masyarakat serta kualitas angkatan kerja.

Sasaran :

1. Meningkatnya cakupan masyarakat dalam mengikuti pendidikan dan kualitas penyelenggara pendidikan;
2. Menurunnya angka pengangguran dan meningkatnya kualitas angkatan kerja;

Tujuan-2 :

Meningkatkan derajat kesehatan dan kesehatan masyarakat.

Sasaran :

1. Meningkatnya derajat dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya drajat kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk
4. Menurunnya angka penduduk miskin

Tujuan-3 :

Meningkatkan pembinaan pemuda, olahraga dan keanekaragaman budaya.

Sasaran :

1. Meningkatnya peranan pemuda dan prestasi olah raga;
2. Meningkatnya pembinaan terhadap keanekaragaman budaya secara partisipatif.

Tujuan-4 :

Meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat.

Sasaran :

1. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

MISI-2 : MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG MEMADAI

Tujuan-1 :

Menyediakan prasarana dan sarana perhubungan yang nyaman.

Sasaran :

1. Meningkatnya jaringan perhubungan darat, laut dan udara yang terintegrasi baik di lingkungan internal Kota Balikpapan maupun yang menghubungkan Kota Balikpapan dan sekitarnya;

Tujuan-2 :

Menyediakan pelayanan air bersih/minum.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan distribusi penyediaan air bersih

Tujuan 3 :

Menciptakan perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak huni

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman;
2. Meningkatnya sanitasi sehat;

Tujuan 4 :

Menciptakan ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

Sasaran :

1. Meningkatnya sumber daya energy yang ramah lingkungan ;
2. Meningkatnya penataan ruang yang aman, nyaman, produktif ;

MISI-3 : MEWUJUDKAN KOTA LAYAK HUNI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN.

Tujuan-1 :

Meningkatkan keamanan dan ketertiban kota.

Sasaran :

1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban kota;

Tujuan-2 :

Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup

Sasaran :

1. Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota;
2. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup;

MISI-4 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif.

Tujuan-1 :

Mewujudkan iklim investasi berbasis keunggulan daerah

Sasaran :

1. Pengembangan potensi ekonomi yang berbasis kepada masyarakat yaitu: pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan serta usaha mikro kecil menengah dan koperasi;
2. Pengembangan basis ekonomi Balikpapan dimasa depan khususnya untuk industri, perdagangan dan jasa serta pariwisata;
3. Pengembangan Investasi.

MISI-5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik.

Tujuan-1 :

Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah

Sasaran :

1. Meningkatnya sistem informasi manajemen tata kelola pemerintahan yang akuntabel;
2. Meningkatnya kapasitas manajemen pemerintah kota;
3. Meningkatnya manajemen pengelolaan keuangan daerah;
4. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Tujuan-2 :

Menata kelembagaan pemerintahan

Sasaran :

1. Menata kelembagaan pemerintahan daerah.



BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

5.1. SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Untuk mencapai visi RPJP Kota Balikpapan 2005-2025 ditetapkan 5 (lima) misi, yang selanjutnya dijabarkan dalam berbagai strategi dan arah kebijakan sebagai berikut.

5.1.1. MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING

1. Sasaran Pokok 1 : Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Arah Kebijakan :

- a. Mengembangkan kegiatan keagamaan masyarakat.dengan mendorong dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya.
- b. Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan pemuka agama/alim ulama dalam memberikan pembinaan kehidupan beragama kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana kehidupan beragama.
- d. Mengembangkan suasana kota yang religius dan berbudaya melalui peningkatan pemahaman warga kota terhadap nilai pluralisme serta

menghindarkan terjadinya konflik masyarakat yang disebabkan isu SARA.

2. Sasaran Pokok 2 : Meningkatnya Derajat dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dan mewujudkan kota yang sehat bagi masyarakat melalui upaya promotif dan preventif.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, penyediaan pembiayaan kesehatan yang memadai dengan tetap memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan.
- c. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat secara berkeadilan dengan mengutamakan kualitas dan keterjangkauan, agar "Health for All" atau Kesehatan untuk semua dapat tercapai.
- d. Menyediakan Sarana Prasarana Kesehatan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

3. Sasaran Pokok 3 : Meningkatnya cakupan masyarakat dalam mengikuti pendidikan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Arah Kebijakan :

- a. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang yang disediakan secara bermutu (berkualitas)

- dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- b. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Daerah dimasa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penguasaan ilmu dan teknologi serta berdaya saing global.
 - c. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan sepanjang hayat (long life education) sesuai dengan kebutuhan Daerah dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vokasional) dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk.
 - d. Menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
4. Sasaran Pokok 4 : Meningkatnya pembinaan terhadap keanekaragaman budaya secara partisipatif
- Arah Kebijakan :
- a. Membina kesatuan dan persatuan masyarakat.
 - b. Menyediakan Sarana Prasarana yang mendukung pembinaan keanekaragaman seni dan budaya.
 - c. Melestarikan adat istiadat dan budaya yang heterogen dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.
5. Sasaran Pokok 5 : Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk
- Arah Kebijakan :
- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana (KB).

- b. Menata perkembangan dan penyebaran penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan kota.
 - c. Memantapkan dan menyempurnakan pelaksanaan administrasi kependudukan yang didukung teknologi informasi
 - d. Meningkatkan perlindungan sosial dan pemenuhan hak-hak penduduk.
6. Sasaran Pokok 6 : Meningkatnya peranan pemuda dan prestasi olahraga
Arah Kebijakan :
 - a. Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda diberbagai bidang pembangunan.
 - b. Mendorong terciptanya budaya olahraga dan prestasi olahraga dikalangan masyarakat.
 - c. Menyediakan berbagai prasarana dan sarana kegiatan pemuda dan olahraga.
7. Sasaran Pokok 7 : Meningkatnya peranan perempuan dan perlindungan anak
 - a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta penghapusan tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
 - c. Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.

8. Sasaran Pokok 8 : Menurunnya angka pengangguran dan meningkatnya

Arah Kebijakan :

- a. Menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja lokal;
- b. Menciptakan suasana hubungan industrial yang harmonis dan perlindungan tenaga kerja, serta kesehatan dan keselamatan kerja;
- c. Meningkatkan kualitas dan ketrampilan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
- d. Menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelatihan kerja baik formal maupun nonformal;
- e. Meningkatkan kualitas sistim informasi tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan dunia usaha dan para pekerja.

9. Sasaran Pokok 9 : Menurunnya angka penduduk miskin

Arah Kebijakan :

- a. Melaksanakan penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan yang diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Meningkatkan rasa percaya diri penduduk miskin agar dapat mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial dan ekonominya.

10. Sasaran Pokok 10 : Meningkatnya Derajat kesejahteraan sosial masyarakat

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan yang tepat guna bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b. Meningkatkan penyediaan pelayanan sosial yang memadai.

5.1.2. MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG MEMADAI

1. Sasaran Pokok 1: Meningkatnya jaringan perhubungan darat, laut dan udara yang terintegrasi baik di lingkungan internal Kota Balikpapan maupun yang menghubungkan Kota Balikpapan dan sekitarnya.

Arah Kebijakan :

- a. Mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi antar wilayah mainland dan hinterland.
 - b. Meningkatkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta prasarana transportasi darat, laut dan udara yang handal.
 - c. Mengembangkan moda transportasi darat, laut dan udara yang efisien.
2. Sasaran Pokok 2 : Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana penanganan sistem jaringan drainase.
 - b. Meningkatkan penyediaan prasarana dasar bagi kawasan rumah sederhana sehat.
 - c. Meningkatkan penyediaan lahan dan perumahan melalui hunian vertikal untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan relokasi permukiman di wilayah rawan bencana.
3. Sasaran Pokok 3 : Meningkatnya kualitas, kuantitas dan distribusi penyediaan air bersih.

Arah Kebijakan :

- a. Mengembangkan sumber air baku yang memenuhi kebutuhan jangka panjang.
 - b. Meningkatkan pelayanan air bersih hingga layak minum (drinkable water) yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
4. Sasaran Pokok 4 : Meningkatnya Sumberdaya Energi yang ramah lingkungan

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya energi secara efektif dan efisien.
 - b. Mengembangkan sumber daya energi terbarukan (renewable) yang ramah lingkungan.
5. Sasaran Pokok 5 : Meningkatnya penataan ruang yang aman, nyaman, produktif

Arah Kebijakan :

- a. Melaksanakan penataan ruang kota sesuai rencana umum dan rencana rinci yang telah ditetapkan.
6. Sasaran Pokok 6 : Meningkatnya Sanitasi Sehat

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi baik pengolahan air limbah maupun persampahan.
- b. Mengembangkan manajemen sanitasi sehat (sampah, drainase dan air limbah).
- c. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat.

5.1.3. MEWUJUDKAN KOTA LAYAK HUNI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

1. Sasaran Pokok 1 : Mempertahankan pola ruang 52% Hijau dan 48% Budidaya

Arah Kebijakan:

a. Meningkatkan peran BKPRD Kota Balikpapan

2. Sasaran Pokok 2 : Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan pengelolaan perparkiran, trotoar, median dan ruang terbuka hijau.

b. Meningkatkan kegiatan 3R (Reduce, Reuse and Recycle) untuk mengurangi timbulan sampah Kota Balikpapan.

3. Sasaran Pokok 3 : Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup

Arah Kebijakan :

a. Mempertahankan pola ruang 52% Kawasan lindung dan 48% Kawasan Budidaya.

b. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

c. Mengembangkan upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim.

4. Sasaran Pokok 4 : Meningkatnya keamanan dan ketertiban kota

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban kota

5.1.4. MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG KREATIF

1. Sasaran Pokok 1 : Meningkatnya potensi ekonomi yang berbasis masyarakat

Arah Kebijakan :

- a. Pengembangan pertanian tanaman pangan.
 - b. Perluasan areal tanaman perkebunan pada areal non produktif.
 - c. Pengembangan peternakan diarahkan untuk memenuhi kecukupan kebutuhan akan konsumsi daging ternak yang sehat dan berkualitas.
 - d. Pengembangan perikanan dan kelautan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan untuk masyarakat dan keperluan export.
 - e. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing.
 - f. Pengembangan UMKM diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat,
2. Sasaran Pokok 2 : Berkembangnya ekonomi riil masyarakat yang inovatif dan kreatif

Arah Kebijakan :

- a. Pengembangan Industri diarahkan dalam rangka pengembangan industri manufaktur dalam rangka memperkuat basis ekonomi.
- b. Pengembangan Perdagangan diarahkan dalam rangka memperkuat Kota Balikpapan sebagai kota kolektor dan distributor bagi daerah sekitarnya.

3. Sasaran Pokok 3 : Meningkatnya Iklim Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan :

- a. Pengembangan investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas.
 - b. Pengembangan investasi lainnya juga diarahkan terhadap sektor pembiayaan pembangunan yang berasal dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kota khususnya untuk pembangunan infrastruktur dasar baik dibidang ekonomi maupun sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan Kota.
4. Sasaran Pokok 4 : Meningkatnya Kapasitas Ekonomi Daerah dan terpenuhinya kebutuhan teknologi aplikatif

5.1.5. MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Sasaran Pokok 1 : Menata kelembagaan pemerintahan daerah

Arah Kebijakan :

- a. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan daerah yang disesuaikan dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat maupun kebutuhan kota dalam rangka memberikan pelayanan prima.
2. Sasaran Pokok 2 : Meningkatnya sistem informasi manajemen tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan sistim informasi manajemen dalam pengelolaan kota agar masyarakat dapat memperoleh akses yang seluas-luasnya terhadap berbagai informasi penyelenggaran pemerintahan, pembangunan Kota dan pelayanan publik.
 - b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi didalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota, dengan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.
3. Sasaran Pokok 3 : Meningkatnya kualitas kemitraan antar daerah, lembaga dan kerja sama luar negeri

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan kemitraan antar daerah melalui organisasi Pemerintahan atau melalui sistem jejaring (networking) antardaerah yang bermanfaat sebagai sarana saling berbagi pengalaman, saling berbagi keuntungan, maupun saling berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan secara proporsional.
 - b. Meningkatkan kemitraan dengan lembaga baik lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan lembaga masyarakat lainnya dengan memanfaatkan potensi, keunggulan dan pengalaman lembaga yang bersangkutan.
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan luar yang bermanfaat bagi Kota.
4. Sasaran Pokok 4 : Meningkatnya Kapasitas Manajemen Pemerintah Kota

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan kapasitas pemerintah Kota meliputi kapasitas manajerial dan tehnik fungsional.

- b. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah Kota.
- d. Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah Kota dan upaya meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.

5. Sasaran Pokok 5 : Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan pengelolaan keuangan Daerah yang bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektifitas pemanfaatan.
- b. Meningkatkan kemandirian Daerah dalam upaya untuk menggali sumber penerimaan Daerah yang berasal dari Daerah sendiri.
- c. Meningkatkan pelayanan publik dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik .

6. Sasaran Pokok 6 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap segala informasi yang dibutuhkan dengan melibatkan dalam proses perumusan kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan Daerah.

7. Sasaran Pokok 7 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara pemerintahan Daerah terhadap prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik

Meningkatkan intensitas dan efektifitas pengawasan aparatur Pemerintah Kota melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

5.2. TAHAPAN DAN PRIORITAS

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud diatas, diperlukan pentahapan dan skala prioritas. Tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, namun tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan dibagi dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut :

5.2.1 RPJMD Tahap I (2005-2009)

Pada kurun waktu 2005 - 2009 RPJMD tahap I, pembangunan diarahkan pada Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur berbasis IMTAQ dan IPTEK, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana, manajemen pelayanan pendidikan, peningkatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi daerah yang berorientasi pasar, serta peningkatan dan pengembangan infrastruktur daerah.

Tahapan dan prioritas pembangunan pada Periode Pertama ini adalah sebagai berikut:

Misi I : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing;

Sasaran misi kesatu pada RPJMD Ke-1 ini adalah mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai budaya dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang maju dan sejahtera

Untuk mencapai sasaran tersebut maka ditetapkan strategi dan kebijakan RPJMD Ke-1 ini adalah sebagai berikut:

1. Meletakkan dasar sistem pelayanan pendidikan formal dan non formal, serta pemerataan pendidikan, melalui peningkatan sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan berbasis moral dan budi pekerti serta berorientasi pada jiwa kepemimpinan dan profesional guna mewujudkan kualitas lulusan yang didukung dengan upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran.
3. Mendorong terwujudnya generasi muda yang profesional dan berprestasi sejalan dengan pembangunan parasarna dan sarana olah raga yang selektif disertai dengan pembekalan infrastruktur olah raga yang memadai.
4. Mendorong tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama memenuhi kebutuhan warga miskin dan kurang mampu melalui peningkatan sarana dan parasarana kesehatan, pengembangan puskesmas, tenaga medis dan peralatan medis.
5. Pembinaan pemahaman dan pengamalan kehidupan umat beragama, peningkatan toleransi inter dan antar umat beragama serta

pengembangan kebudayaan daerah yang berbasis pada nilai-nilai sosial kemasyarakatan.

Misi II : Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai;

Sasaran misi Kedua pada RPJMD Ke-1 ini adalah mewujudkan kondisi infrastruktur kota yang memadai dan berkelanjutan sehingga dapat menunjang seluruh aktifitas masyarakat Kota Balikpapan dengan aman dan nyaman serta berorientasi pada lingkungan yang berkelanjutan.

Untuk mencapai sasaran tersebut maka ditetapkan strategi dan kebijakan RPJMD Ke-1 ini adalah sebagai berikut:

1. Integrasi sarana dan prasarana antara Kota Balikpapan dengan wilayah sekitarnya sehingga peningkatan perekonomian dan pemenuhan komoditas di Kota Balikpapan dan sekitarnya dapat tercipta dengan sinergis.
2. Meningkatkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta prasarana transportasi darat, laut dan udara yang handal serta berkelanjutan.
3. Pengembangan moda transportasi yang berorientasi pada *mass trasport* (sarana transportasi massal) yang lebih modern dan ramah lingkungan seperti trem, monorel, *mass rapid trasport* (jaringan kereta bawah tanah).
4. Antisipasi kebutuhan lahan parkir yang terus meningkat dengan implementasi kantong-kantong parkir yang terintegrasi dengan moda pendukungnya yang tersebar di seluruh kawasan strategis di Kota Balikpapan, untuk menghindarkan *parking on the street*.
5. Peningkatan sistim sarana prasarana drainase yang handal dalam rangka mengurangi titik-titik genangan maupun banjir yang terjadi di

- seluruh wilayah Kota Balikpapan, dengan intergrasi dan manajemen banjir melalui pengelolaan jaringan Bendali dalam masterplan drainsae dengan jaringan pendukungnya secara komprehensif.
6. Peningkatan Prasarana dasar di Kawasan RSS yang meliputi sistem jaringan drainase, sanitasi sehat, dan jaringan jalan yang handal dan fasilitas pendukung lainnya yang dapat menciptakan rasa nyaman dan berorientasi pada lingkungan.
 7. Penyediaan hunian yang berbasis hunian vertikal untuk pemenuhan kebutuhan perumahan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) untuk menghindarkan permukiman liar di daerah-daerah rawan bencana di Kota Balikpapan melalui Program-program rusunawa dan rusunami yang ramah lingkungan dengan aplikasi *green buliding* yang dilaksanakan pemerintah Kota Balikpapan secara berkelanjutan.
 8. Pemenuhan standar mutu air baku yang diharapkan terus meningkat dan tercapai pada akhir masa RPJP dan pengembangan sumber air baku dengan pemantauan dan identifikasi penggunaan sumber air bawah tanah oleh masyarakat sehingga kehandalan sumber air bawah tanah sebagai sumber air baku pendukung selain air permukaan (waduk dan Bendali) tetap terjaga.
 9. Perluasan dan peningkatan pengembangan wilayah cakupan distribusi air minum hingga ke seluruh wilayah Kota Balikpapan serta implemantasi teknologi pengolahan air yang terdistribusi menjadi air bersih layak minum pada akhir periode RPJP.
 10. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya energi secara efektif dan efisien melalui pengasaan dan penindakan

terkait penambangan galian c secara liar.

11. Pemanfaatan dan implementasi sumber daya energi terbarukan yang ramah lingkungan melalui diversifikasi energi listrik dari motor bakar menjadi energi listrik yang bersumber pada tenaga surya, tenaga angin dan sumber lain yang terbarukan dan ramah lingkungan pada instansi pemerintah Kota Balikpapan dan Instansi lain di Kota Balikpapan.
12. Pada sektor penataan ruang diharapkan terciptanya kesadaran terhadap penataan ruang dan rencana penataan rinci yang telah ditetapkan dengan indikator menurunnya pelanggaran pemanfaatan ruang oleh stake holder.

Misi III : Mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan Lingkungan ;

Sasaran misi ketiga pada RPJMD Ke-1 ini adalah menetapkan tata kelola untuk mewujudkan Balikpapan menjadi Kota layak Huni yang berwawasan lingkungan melalui sasaran pokok yang telah ditetapkan yang berorientasi pada lingkungan dan implementasi kebijakan yang pro lingkungan agar tercipta kenyamanan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Mengembangkan sanitasi sehat adalah bagian dari sasaran pokok yang dituangkan melalui strategi menurunkan jumlah sampah yang terbuang ke TPA, yang mencerminkan kesadaran masyarakat dalam program 3R (reduce, reuse, recycling) yang telah dicanangkan pemerintah Kota

Balikpapan dan menjadi isu *global warming*, menurunnya titik genangan yang tersebar di kawasan Kota Balikpapan merupakan bagian dari pengembangan sanitasi sehat, dan yang terakhir adalah peningkatan kapasitas IPAL dan sebaran IPAL di Kota Balikpapan sebagai bentuk sanitasi sehat pada sektor air limbah.

2. Mempertahankan pola ruang 52% Kawasan lindung dan 48% Kawasan Budidaya merupakan sasaran pokok yang implementasinya adalah manajemen kontrol kawasan berjalan efektif dengan kontrol dari pemerintah Kota agar dapat mempertahankan Pola ruang pola ruang 52% Kawasan lindung dan 48% Kawasan Budidaya sampai pada masa RPJP berakhir.
3. Mengembangkan upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim salah satu sasaran pokok yang wujud implementasinya adalah monitoring degradasi dan perubahan pemanfaatan lahan non budidaya menjadi kawasan budidaya yang sedikit banyak akan mempengaruhi proporsi pola ruang 52% Kawasan lindung dan 48% Kawasan Budidaya, bentuk lainnya adalah untuk monitoring perubahan pemanfaatan lahan kritis untuk kawasan budidaya yang diharapkan dapat menurun dan sampai pada akhir masa RPJP ini dapat diminimalkan.
4. Meningkatnya keamanan dan ketertiban kota salah satunya adalah perluasan dan peningkatan kapasitas sistem ATCS dan ITC yang telah diimplementasikan untuk jaminan kemandirian dan ketertiban dalam berlalulintas oleh masyarakat Kota Balikpapan.

Misi IV : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif

Sasaran misi keempat pada RPJMD Ke-1 adalah mewujudkan perekonomian

daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah yang berfokus pada perdagangan dan jasa, agribisnis, agroindustri, pariwisata, dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan prioritas pembangunan pada perbaikan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah peningkatan peranan strategis sektor basis daerah dan pelaku ekonomi kerakyatan

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.
2. Meningkatkan akses permodalan, penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi, pembinaan dan peningkatan jaringan pemasaran bagi Koperasi, UMKM dan BUMD.
3. Meningkatkan kemampuan dan produktivitas usaha melalui optimalisasi sumberdaya pertanian, peternakan, perikanan yang berbasis agribisnis.
4. Meningkatkan peluang dan kemitraan usaha secara sinergis antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha disertai pengembangan pelatihan tenaga kerja guna menumbuhkembangkan hubungan dan kesesuaian antara kualifikasi keahlian dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan guna mendorong daya tarik objek wisata serta pelayanan jasa pariwisata yang handal.

6. Meningkatkan pelestarian, reboisasi dan rehabilitasi sumber daya hutan dan lingkungan.

Misi V : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik;

Sasaran misi kelima pada RPJMD Ke-1 ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah di seluruh tingkatan yang transparan dan akuntabel melalui penataan kelembagaan, manajemen publik serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur berbasis pengembangan dan pemanfaatan lptek.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan perempuan dalam kehidupan politik, sosial dan ekonomi yang dinamis, beretika serta berorientasi pada upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Memantapkan kemampuan keuangan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah disertai dengan pengawasan yang baik.

4. Penataan kelembagaan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan.

5.2.2 RPJMD Tahap II (2010-2014)

Tahap Kedua atau RPJMD Ke-2 dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan perwujudan pelaksanaan pembangunan yang diarahkan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, pendidikan berkualitas yang berbasis IMTAQ dan IPTEK, kesejahteraan masyarakat yang berbasis ekonomi kerakyatan, pelayanan kesehatan, kualitas kehidupan yang agamis, berakhlak mulia dan berbudaya, pengelolaan potensi daerah, pembangunan infrastruktur, pemerataan sarana dan prasarana daerah, penataan ruang dan lingkungan hidup serta upaya mitigasi bencana. Tahapan dan prioritas pembangunan pada Periode Kedua ini adalah sebagai berikut:

Misi I : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing ;

Sasaran misi kesatu pada RPJMD Ke-2 ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai sosial dan agama yang merupakan tugas utama pemerintah. Kualitas hidup masyarakat, diukur dengan menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM) yang terdiri dari indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks paritas daya beli. Untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat diperlukan adanya sinkronisasi dan harmonisasi program dari seluruh satuan kerja yang ada.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi kedua pada Periode Kedua ini, ditetapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang diarahkan pada:

1. Membangun manajemen pendidikan yang demokratis dan semua stakeholder memberikan kontribusi di dalam memajukan dan menumbuhkembangkan suasana kondusif pada lembaga pendidikan.
2. Merancang sistem pendidikan yang mampu menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang menyenangkan, merangsang dan menantang peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya dalam berinovasi, berkreasi dan berkompetisi
3. Memfasilitasi penguatan dan pengembangan lembaga pendidikan perguruan tinggi.
4. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
5. Meningkatkan akses layanan, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan didukung dengan penyediaan, pemerataan dan kualitas sarana pendidikan serta tenaga pendidik yang memiliki kompetensi.
6. Membangun media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai proses pembelajaran yang efektif dan kreatif yang di dukung oleh tenaga pendidik yang professional.
7. Meningkatkan partisipasi stakeholder pendidikan dan masyarakat dalam proses perbaikan mutu pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
8. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan balita.
9. Peningkatan pelayanan terhadap penanganan penyakit menular.
10. Pengembangan jaminan kesehatan daerah.
11. Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin.

12. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis secara merata.
13. Peningkatan sosialisasi terhadap kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat pada masyarakat.
14. Peningkatan pengawasan obat dan makanan dan minuman.
15. Pendataan dan peningkatan status kesehatan siswa.
16. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan profesionalisme sumber daya kesehatan.
17. Pengembangan Rumah Sakit dan Puskesmas sesuai dengan standar kebutuhan.
18. Optimalisasi lembaga sosial keagamaan yang ada dan berkembang di masyarakat.
19. Optimalisasi peran lembaga pendidikan dalam kehidupan yang agamis dan pembentukan karakter.
20. Mengembangkan modal sosial dengan mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan.
21. Optimalisasi peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan daerah.
22. Mengembang dan meningkatkan prestasi olahraga serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berolahraga.
23. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
24. Meningkatkan peran dan partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan lainnya dalam pembangunan.
25. Pembinaan dan peningkatan peran guru agama, ulama dan sekolah-sekolah keagamaan.
26. Menciptakan iklim yang kondusif, kreatif dan inovasi yang berbasiskan kebudayaan serta dan kerjasama sinergis antara paguyuban dengan

sektor-sektor lain, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi II: Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai;

Sasaran misi Kedua pada RPJMD Ke- 2 ini adalah mewujudkan kondisi infrastruktur kota yang memadai dan berkelanjutan sehingga dapat menunjang seluruh aktifitas masyarakat Kota Balikpapan dengan aman dan nyaman serta berorientasi pada lingkungan yang berkelanjutan.

Untuk mencapai sasaran tersebut maka ditetapkan strategi dan kebijakan RPJMD Ke-2 ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Integrasi sarana dan prasarana antara Kota Balikpapan dengan wilayah sekitarnya sehingga peningkatan perekonomian dan pemenuhan komoditas di Kota Balikpapan dan sekitarnya dapat tercipta dengan sinergis.
2. Meningkatkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta prasarana transportasi darat, laut dan udara yang handal serta berkelanjutan.
3. Peningkatan dan perluasan jaringan *mass transport* (sarana transportasi massal) yang lebih modern dan ramah lingkungan seperti Saum, Trem, monorel, *mass rapid transport* (jaringan kereta bawah tanah).
4. Bertambahnya sarana lahan parkir yang terus meningkat dengan implementasi kantong-kantong parkir yang terintegrasi dengan moda pendukungnya yang tersebar di seluruh kawasan strategis di Kota Balikpapan, untuk menghindarkan *parking on the street*.
5. Berkurangnya titik genangan air melalui peningkatan sistim sarana prasarana drainase yang handal dalam rangka mengurangi titik-titik

- genangan maupun banjir yang terjadi di seluruh wilayah Kota Balikpapan, dengan intergrasi dan manajemen banjir melalui pengelolaan jaringan Bendali dalam masterplan drainsae dengan jaringan pendukungnya secara komprehensif.
6. Peningkatan Prasarana dasar di Kawasan RSS yang meliputi sistem jaringan drainase, sanitasi sehat, dan jaringan jalan yang handal dan fasilitas pendukung lainnya yang dapat menciptakan rasa nyaman dan berorientasi pada lingkungan.
 7. Peningkatan penyediaan hunian yang berbasis hunian vertikal untuk pemenuhan kebutuhan perumahan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) untuk menghindarkan permukiman liar di daerah-daerah rawan bencana di Kota Balikpapan melalui Program-program rusunawa dan rusunami yang ramah lingkungan dengan aplikasi *green buliding* yang dilaksanakan pemerintah Kota Balikpapan secara berkelanjutan.
 8. Peningkatan standar mutu air baku dan pengembangan sumber air baku dengan pemantauan dan identifikasi penggunaan sumber air bawah tanah oleh masyarakat sehingga kehandalan sumber air bawah tanah sebagai sumber air baku pendukung selain air permukaan (waduk dan Bendali) tetap terjaga.
 9. Perluasan dan peningkatan pengembangan wilayah cakupan distribusi air minum hingga ke seluruh wilayah Kota Balikpapan serta implemantasi teknologi pengolahan air yang terdistribusi menjadi air bersih layak minum pada akhir periode RPJP.
 10. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya energi secara efektif dan efisien melalui pengasaan dan penindakan

terkait penambangan galian c secara liar.

11. Peningkatan pemanfaatan dan implementasi sumber daya energi terbarukan yang ramah lingkungan melalui diversifikasi energi listrik dari motor bakar menjadi energi listrik yang bersumber pada tenaga surya, tenaga angin dan sumber lain yang yang terbarukan dan ramah lingkungan pada instansi pemerintah Kota Balikpapan dan Instansi lain di Kota Balikpapan.
12. Menurunnya pelanggaran pemanfaatan ruang oleh stake holder.

Misi III : Mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan Lingkungan ;

Sasaran misi ketiga pada RPJMD Ke-1 ini adalah menetapkan tata kelola untuk mewujudkan Balikpapan menjadi Kota layak Huni yang berwawasan lingkungan melalui sasaran pokok yang telah ditetapkan yang berorientasi pada lingkungan dan implementasi kebijakan yang pro lingkungan agar tercipta kenyamanan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Sanitasi Sehat adalah bagian dari sasaran pokok yang dituangkan melalui strategi menurunkan jumlah sampah yang terbangun ke TPA, yang mencerminkan kesadaran masyarakat dalam program 3R (reduce, reuse, recycling) yang telah dicanangkan pemerintah Kota Balikpapan dan menjadi isu *global warming*, menurunnya titik genangan yang tersebar di kawasan Kota Balikpapan merupakan bagian dari pengembangan sanitasi sehat, dan yang terakhir adalah peningkatan kapasitas IPAL dan sebaran IPAL di Kota Balikpapan sebagai bentuk sanitasi sehat pada sektor air limbah.

2. Mempertahankan pola ruang 52% Kawasan lindung dan 48% Kawasan Budidaya merupakan sasaran pokok yang implematasinya adalah manajemen kontrol kawasan berjalan efektif dengan kontrol dari pemerintah Kota agar dapat mempertahankan Pola ruang pola ruang 52% Kawasan lindung dan 48% Kawasan Budidaya sampai pada masa RPJP berakhir.
3. Menurunkan degradasi dan perubahan pemanfaatan lahan non budidaya menjadi kawasan budidaya yang sedikit banyak akan mempengaruhi proporsi pola ruang 52% Kawasan lindung dan 48% Kawasan Budidaya,
4. perluasan dan peningkatan kapasitas sistem ATCS dan ITC yang telah diimplemantasikan untuk jaminan keamanan dan dan ketertiban dalam berlalulintas oleh masyarakat Kota Balikpapan.

Misi IV : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif

Sasaran Misi keempat RPJMD ke-2 adalah meningkatnya perekonomian daerah yang akan mendorong stabilitas perekonomian daerah. Ketidakstabilan perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat. Tantangan terbesar pemerintah daerah ke depan adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam mewujudkan kemandirian daerah, yang diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat. Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu amanah dalam era otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Indikator keberhasilan meningkatnya daya saing daerah adalah peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN). Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Misi keempat pada Periode Kedua ini, maka ditetapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang diarahkan pada :

1. Mendorong pertumbuhan lapangan usaha perdagangan dan jasa yang berkualitas dan pro-rakyat miskin serta meningkatkan usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan.
2. Meningkatkan sistem dan strategi dalam menumbuhkembangkan wirausaha baru yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pengembangan dan peningkatan peran UKM dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM yang handal.
4. Pengembangan dan perkuatan pembangunan industri kecil dan kerajinan rumah tangga dalam pengolahan hasil produksi pertanian dan peningkatan keanekaragaman yang mempunyai nilai komersial dan menguntungkan.
5. Revitalisasi dan pengembangan pasar tradisional, toko modern dan pasar penyangga dalam upaya menciptakan suasana kegiatan bisnis baru.
6. Mempertahankan penumbuhan aktifitas ekonomi yang kondusif serta peningkatan regulasi peluang investasi daerah.
7. Peningkatan daya saing produk melalui peranan Koperasi dan UMK dalam rangka pertumbuhan perekonomian daerah.
8. Peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui program padat karya produktif;

9. Mengintegrasikan pengembangan usaha ekonomi sesuai dengan karakteristik daerah, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi serta potensi usaha bagi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di setiap kecamatan, desa/kelurahan.
10. Peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat.
11. Membentuk perilaku petani yang berorientasi kemajuan dan keuntungan (*petani progressive*) dengan penggunaan teknologi dan komoditas yang lebih maju dalam merespon permintaan dan peluang pasar didukung perbaikan infrastruktur dan permodalan.
12. Penerapan sistem pertanian modern dan terpadu melalui teknologi tepat guna (TTG) dan peningkatan daya serap pasar terhadap produk unggulan.
13. Meningkatnya lapangan usaha di sektor jasa keparawisataan.
14. Peningkatan produktivitas lahan kritis dan lahan tidur (lahan marginal).
15. Pemanfaatan dan pengelolaan serta rehabilitasi pelestarian sumber daya hutan dan lingkungan.

Misi V : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik;

Sasaran misi kelima pada RPJMD Ke-2 ini adalah Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berkelanjutan yang merupakan kebutuhan bersama yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Membangun struktur pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah

- dan responsif terhadap kepentingan masyarakat luas.
2. Mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif dan transparan dalam pengambilan kebijakan dan akuntabilitas publik.
 3. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
 4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Pemerintah Daerah, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi menuju pencapaian *good governance* dan *clean government* yang diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan aparatur.
 5. Menghormati supremasi hukum, melalui perilaku keteladanan aparatur pemerintahan dalam mematuhi dan menaati hukum.
 6. Perwujudan produk hukum daerah yg memihak kepentingan masyarakat.
 7. Menerapkan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang bersinergi dan terintegrasi yang didukung SDM yang handal.
 8. Terselenggaranya koordinasi perencanaan lingkup pemerintahan baik Pusat dan Daerah.
 9. Tersusunnya konsep perencanaan yang berkualitas dengan didasari oleh analisa study yang baik.
 10. Peningkatan Pengelolaan pendapatan dan aset daerah yang menekankan pada keserasian antara kebutuhan pengeluaran dan pendapatan.
 11. Pengembangan sistem informasi terpadu (*e-government*) yang dapat memperlancar dan meningkatkan mutu layanan.
 12. Setiap pimpinan harus mempunyai visi yang strategis dalam mencapai *good governance* dan *clean governance* dengan mengembangkan

kualitas SDM di semua bidang melalui penetapan indikator kinerja daerah.

13. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

14. Penerapan kualitas pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah secara akomodatif, kompetitif dan transparan.

5.2.3 RPJMD Tahap III (2015-2019)

Tahap Ketiga atau RPJMD Ke-3 dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ini merupakan tahapan pencapaian sebagai kelanjutan pelaksanaan Periode Kedua, yang diarahkan pada pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian. Dan keunggulan daerah. Tahap Ketiga ini ditujukan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan yang lebih baik. Pada tahapan ini, focus pembangunan lebih diorientasikan bagaimana mewujudkan Kota Balikpapan sebagai kota jasa terkemuka.

Tahapan dan prioritas pembangunan pada Periode Ketiga ini adalah sebagai berikut:

Misi I : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya saing;

Sasaran pencapaian pembangunan Misi I pada RPJMD Ke-3 ini adalah meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada

tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul dan berkarakter, ditopang dengan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang makin baik serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya dan agama.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi kedua pada Periode Ketiga ini, maka ditetapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang diarahkan pada :

1. Mewujudkan sistem manajemen pendidikan yang demokratis dan semua stakeholder memberikan kontribusi di dalam memajukan dan menumbuhkembangkan suasana kondusif pada lembaga pendidikan.
2. Terciptanya suasana dan proses pembelajaran yang menyenangkan, merangsang dan menantang peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya dalam berinovasi, berkreasi dan berkompetisi.
3. Pengembangan kualitas sekolah menengah kejuruan (SMK) berbasis life skill.
4. Keberlanjutan pengembangan perguruan tinggi melalui upaya kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
5. Mewujudkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
6. Mewujudkan akses layanan, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan didukung dengan penyediaan, pemerataan dan kualitas sarana pendidikan serta tenaga pendidik yang memiliki kompetensi.
7. Mewujudkan media pembelajaran yang berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi yang di dukung oleh tenaga pendidik yang professional.



8. Meningkatkan partisipasi stakeholder pendidikan dan masyarakat dalam proses perbaikan mutu pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
9. Pelaksanaan proses belajar yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai proses pembelajaran yang efektif dan kreatif.
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas serta kapasitas tenaga kesehatan secara profesional dan proporsional.
11. Keberlanjutan peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan balita.
12. Keberlanjutan akses pelayanan terhadap penanganan penyakit menular.
13. Keberlanjutan pengembangan jaminan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu..
14. Menciptakan kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat bagi masyarakat.
15. Peningkatan pengawasan obat dan makanan dan minuman..
16. Peningkatan kesejahteraan keluarga dengan cara menurunkan tingkat kelahiran melalui pengendalian kehamilan serta peningkatan cakupan peserta KB.
17. Pengembangan, pengelolaan kekayaan budaya daerah.'
18. Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
19. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pembinaan dan pelatihan.
20. Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

21. Peningkatan kapasitas budaya dan tradisi lokal sebagai salah satu muatan pendidikan di sekolah.
22. Peningkatan optimalisasi peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan daerah.
23. Meningkatkan prestasi olah raga dan kesadaran masyarakat dalam berolahraga.
24. Meningkatkan peran dan partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan lainnya dalam pembangunan.
25. Menciptakan iklim yang kondusif, kreatif dan inovasi yang berbasiskan kebudayaan serta dan kerjasama sinergis antar etnis.

Misi II : Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai ;

Sasaran misi Kedua pada RPJMD Ke- 3 ini adalah meningkatkan kondisi infrastruktur kota yang memadai dan berkelanjutan sehingga dapat menunjang seluruh aktifitas masyarakat Kota Balikpapan dengan aman dan nyaman serta berorientasi pada lingkungan yang berkelanjutan.

Untuk mencapai sasaran tersebut maka ditetapkan strategi dan kebijakan RPJMD Ke-3 ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Integrasi sarana dan prasarana antara Kota Balikpapan dengan wilayah sekitarnya sehingga peningkatan perekonomian dan pemenuhan komoditas di Kota Balikpapan dan sekitarnya dapat tercipta dengan sinergis.
2. Meningkatkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta prasarana transportasi darat, laut dan udara yang handal serta berkelanjutan.
3. Peningkatan dan perluasan jaringan *mass trasport* (sarana transportasi

- massal) yang lebih modern dan ramah lingkungan seperti Saum, Trem, monorel, *mass rapid trasport* (jaringan kereta bawah tanah).
4. Bertambahnya sarana lahan parkir yang terus meningkat dengan implementasi kantong-kantong parkir yang terintegrasi dengan moda pendukungnya yang tersebar di seluruh kawasan strategis di Kota Balikpapan, untuk menghindarkan *parking on the street*.
 5. Berkurangnya titik genangan air melalui peningkatan sistim sarana prasarana drainase yang handal dalam rangka mengurangi titik-titik genangan maupun banjir yang terjadi di seluruh wilayah Kota Balikpapan, dengan intergrasi dan manajemen banjir melalui pengelolaan jaringan Bendali dalam masterplan drainsae dengan jaringan pendukungnya secara komprehensif.
 6. Peningkatan Prasarana dasar di Kawasan RSS yang meliputi sistem jaringan drainase, sanitasi sehat, dan jaringan jalan yang handal dan fasilitas pendukung lainnya yang dapat menciptakan rasa nyaman dan berorientasi pada lingkungan.
 7. Peningkatan penyediaan hunian yang berbasis hunian vertikal untuk pemenuhan kebutuhan perumahan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) untuk menghindarkan permukiman liar di daerah-daerah rawan bencana di Kota Balikpapan melalui Program-program rusunawa dan rusunami yang ramah lingkungan dengan aplikasi *green buliding* yang dilaksanakan pemerintah Kota Balikpapan secara berkelanjutan.
 8. Peningkatan standar mutu air baku dan pengembangan sumber air baku dengan pemantauan dan identifikasi penggunaan sumber air bawah tanah oleh masyarakat sehingga kehandalan sumber air bawah tanah

sebagai sumber air baku pendukung selain air permukaan (waduk dan Bendali) tetap terjaga.

9. Perluasan dan peningkatan pengembangan wilayah cakupan distribusi air minum hingga ke seluruh wilayah Kota Balikpapan serta implementasi teknologi pengolahan air yang terdistribusi menjadi air bersih layak minum pada akhir periode RPJP.
10. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya energi secara efektif dan efisien melalui pengasaan dan penindakan terkait penambangan galian c secara liar.
11. Peningkatan pemanfaatan dan implementasi sumber daya energi terbarukan yang ramah lingkungan melalui diversifikasi energi listrik dari motor bakar menjadi energi listrik yang bersumber pada tenaga surya, tenaga angin dan sumber lain yang yang terbarukan dan ramah lingkungan pada instansi pemerintah Kota Balikpapan dan Instansi lain di Kota Balikpapan.
12. menurunnya pelanggaran pemanfaatan ruang oleh stake holder.

Misi III : Mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan Lingkungan ;

Sasaran misi ketiga pada RPJMD Ke-3 ini adalah menetapkan tata kelola untuk mewujudkan Balikpapan menjadi Kota layak Huni yang berwawasan lingkungan melalui sasaran pokok yang telah ditetapkan yang berorientasi pada lingkungan dan implementasi kebijakan yang pro lingkungan agar tercipta kenyamanan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Sanitasi Sehat adalah bagian dari sasaran pokok yang dituangkan melalui strategi menurunkan jumlah sampah yang terbangun ke TPA, yang mencerminkan kesadaran masyarakat dalam program 3R (reduce, reuse, recycling) yang telah dicanangkan pemerintah Kota Balikpapan dan menjadi isu *global warming*, menurunnya titik genangan yang tersebar di kawasan Kota Balikpapan merupakan bagian dari pengembangan sanitasi sehat, dan yang terakhir adalah peningkatan kapasitas IPAL dan sebaran IPAL di Kota Balikpapan sebagai bentuk sanitasi sehat pada sektor air limbah.
2. Mempertahankan pola ruang 52% Kawasan lindung dan 48% Kawasan Budidaya merupakan sasaran pokok yang implematasinya adalah manajemen kontrol kawasan berjalan efektif dengan kontrol dari pemerintah Kota agar dapat mempertahankan Pola ruang pola ruang 52% Kawasan lindung dan 48% Kawasan Budidaya sampai pada masa RPJP berakhir.
3. Menurunkan degradasi dan perubahan pemanfaatan lahan non budidaya menjadi kawasan budidaya yang sedikit banyak akan mempengaruhi proporsi pola ruang 52% Kawasan lindung dan 48% Kawasan Budidaya.
4. Perluasan dan peningkatan kapasitas sistem ATCS dan ITC yang telah diimplementasikan untuk jaminan keamanan dan dan ketertiban dalam berlalulintas oleh masyarakat Kota Balikpapan.

Misi IV : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif

Sasaran pencapaian pembangunan Misi IV pada RPJMD Ke-3 ini adalah mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada

ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah berfokus pada perdagangan dan jasa, agribisnis, agroindustri, pariwisata, yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal serta cluster usaha tingkat kelurahan/pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada sektor basis daerah akan menjadi pondasi perekonomian daerah, makin besarnya peranan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam perekonomian daerah, makin tumbuhnya kawasan ekonomi pedesaan berbasis cluster usaha, disertai dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi keempat pada Periode Ketiga ini, maka ditetapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang diarahkan pada :

1. Mengintegrasikan ekonomi produktif serta pusat-pusat pertumbuhan baru dalam sistem jaringan infrastruktur dan komunikasi untuk mempermudah transportasi pemasaran hasil produksi, terbentuknya kawasan agribisnis dan agroindustri dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan.
2. Peningkatan peluang bagi industri kecil, kerajinan rakyat, koperasi dan UKM yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkuatan keterkaitan industri yang selaras dengan pusat-pusat pertumbuhan baru dengan memperhatikan pelestarian lingkungan bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
3. Mempertahankan dan mengembangkan peluang investasi dan perkuatan jaringan pemasaran skala regional dan nasional.

4. Revitalisasi dan pengembangan pasar tradisional, pasar modern dan pasar penyangga dalam rangka menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
5. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar dan pendukung lainnya serta memperkuat regulasi investasi daerah.
6. Peningkatan daya saing produk dan peranan Koperasi, UMKM dan industri kecil dalam perekonomian daerah melalui peningkatan SDM dan teknologi dalam rangka peningkatan nilai produk pertanian.
7. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan dan jasa, pengembangan kemitraan, promosi, dan lapangan usaha sektor jasa kepariwisataan.
8. Peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui program padat karya produktif dan penerapan sistem pertanian modern dan terpadu melalui teknologi tepat guna (TTG) serta peningkatan daya serap pasar terhadap produk unggulan.
9. Mengintegrasikan pengembangan usaha sesuai dengan karakteristik daerah dan pengusah serta potensi usaha di setiap kecamatan, desa/kelurahan.
10. Peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat.
11. Pengembangan kawasan bididaya perikanan melalui pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya sungai, air payau dan air tawar.
12. Peningkatan pemanfaatan potensi lahan disekitar hutan yang berwawasan lingkungan.
13. Peningkatan produktivitas lahan kritis dan lahan tidur (lahan marginal)

14. Terjaminnya pemanfaatan dan pengelolaan rehabilitasi dan pelestarian sumber daya hutan dan lingkungan yang berkesinambungan dan keberlanjutan.

Misi V : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik

Sasaran pencapaian pembangunan Misi I pada RPJMD Ke-3 ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tenteram, dengan prioritas pembangunan diharapkan terjadi perbaikan yang signifikan dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah, meningkatnya kualitas aparatur daerah, makin baiknya kelembagaan pemerintah dalam pemberian pelayanan, dan makin berkembangnya kerjasama pemerintah daerah dengan berbagai komponen. Pada kondisi ini diharapkan semakin mantap regulasi dan kebijakan otonomi daerah dalam berbagai aspek, kondusifnya iklim politik, keamanan, ketertiban, dan hukum daerah, perkuatan sistem kelembagaan pemerintah dalam pemberian pelayanan, serta makin meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi kesatu pada Periode Ketiga ini, maka ditetapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang diarahkan pada :

1. Mewujudkan terselenggaranya menegakkan *rule of law* (kekuasaan hukum) secara adil dan demokratis, mentransformasikan berbagai nilai

- kebijakan daerah yang merupakan kekuatan kelembangaan sosial dan adat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai sengketa dalam masyarakat.
2. Mewujudkan kualitas SDM aparatur Pemerintah Daerah yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan serta penerapan teknologi menuju pencapaian good governance dan clean government.
 3. Meningkatkan kualitas peran dan partisipasi perempuan dalam proses politik dan jabatan publik dalam pembangunan daerah.
 4. Menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik serta penerapan teknologi informasi dalam sistem birokrasi.
 5. Perwujudan kualitas produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat.
 6. Menerapkan sinergitas sistem perencanaan dengan pengelolaan keuangan daerah yang lebih terarah, efektif, efisien dan akuntabel.
 7. Terselenggaranya koordinasi perencanaan lingkup pemerintahan baik Pusat dan Daerah secara akomodatif dan terintegrasi.
 8. Pelaksanaan konsep perencanaan yang berkualitas dengan didasari oleh analisa studi dan kajian/penelitian yang berdaya guna, dalam meningkatkan penerapan kualitas pembangunan yang berwawasan lingkungan.
 9. Peningkatan Pengelolaan pendapatan dan aset daerah yang menekankan pada keserasian antara kebutuhan pengeluaran dan pendapatan.
 10. Peningkatan sistem informasi terpadu (e-government) dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu layanan.
 11. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat.

12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah secara akomodatif, kompetitif dan transparan.
13. Memantapkan penerapan standar pelayanan minimum secara konsisten dan berkelanjutan dalam menciptakan kualitas pelayanan.
14. Berkembangnya dan semakin mantapnya kerjasama pemerintah daerah dengan berbagai komponen masyarakat dengan regulasi dan kebijakan otonomi daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat, didukung iklim politik yang kondusif, keamanan, ketertiban, serta adanya kepastian hukum/peraturan daerah.

5.2.4 RPJMD Tahap IV (2020-2024)

RPJMD ke-4 ini diorientasikan pada upaya mempertahankan dan memantapkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat. Kota Balikpapan dalam mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya yang berwawasan Lingkungan, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, meningkatnya keunggulan kompetitif daerah, mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera.

Tahapan dan prioritas pembangunan pada Periode Keempat ini adalah sebagai berikut:

Misi I : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya saing ;

Untuk mencapai Visi Kota Balikpapan di atas, maka sasaran Misi Kedua pada tahap terakhir RPJPD ini adalah memantapkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, dengan prioritas pembangunan diharapkan terjadinya kondisi kesejahteraan masyarakat sudah dapat diwujudkan baik lahir maupun batin, makin mantapnya harmonisasi hubungan perikehidupan bermasyarakat berasaskan norma dan nilai hukum, budaya dan agama, mantapnya karakter sumber daya manusia yang unggul, tangguh, kompetitif, bermoral, berbudaya, beretos kerja tinggi dan berkembang secara dinamis. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi kedua ini pada tahap terakhir RPJPD ini, ditetapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang diarahkan pada :

1. Mewujudkan masyarakat terdidik yang berkarakter, inovatif, kreatif, berbudaya, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama, beretos kerjaserta professional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang berkualitas berstandar nasional dan berdaya saing semua jenjang pendidikan yang terstruktur dan berkesinambungan dengan didukung sarana dan prasarana yang memenuhi standar nasional.
2. Mewujudkan Kota Pendidikan, dengan prioritas pada pencapaian sistem pendidikan dan pelaksanaan pembelajaran, pemerataan akses tenaga pendidik dan penerapan pelayanan pendidikan yang

- berkualitas sehingga pendidik dan tenaga kependidikan mampu bersaing dalam regional maupun nasional.
3. Memantapkan kapasitas jaringan kerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui dukungan teknologi informasi.
 4. Menciptakan gerakan peduli pendidikan, melalui kawasan lingkungan sosial yang nyaman dan aman dengan prinsip pendidikan adalah “ibadah dan pendidikan untuk semua”
 5. Membentuk masyarakat yang mempunyai wawasan dan prilaku hidup sehat.
 6. Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
 7. Tersedianya sarana dan prasarana serta sarana pendukung dan layanan kesehatan representative.
 8. Mempertahankan keberlanjutan perkembangan budaya dan memberi perlindungan akan kelestarian aset budaya.
 - 9.

Misi II : Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai ;

Sasaran misi Kedua pada RPJMD Ke- 4 ini adalah Pemantapan pencapaian kondisi infrastruktur kota yang memadai dan berkelanjutan sehingga dapat menunjang seluruh aktifitas masyarakat Kota Balikpapan dengan aman dan nyaman serta berorientasi pada lingkungan yang berkelanjutan.

Untuk mencapai sasaran tersebut maka ditetapkan strategi dan kebijakan RPJMD Ke-4 ini adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan Integrasi sarana dan prasarana antara Kota Balikpapan dengan wilayah sekitarnya sehingga peningkatan perekonomian dan

- pemenuhan komoditas di Kota Balikpapan dan sekitarnya dapat tercipta dengan sinergis.
2. Meningkatkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta prasarana transportasi darat, laut dan udara yang handal serta berkelanjutan.
 3. Pemantapan dan perluasan jaringan *mass trasport* (sarana transportasi massal) yang lebih modern dan ramah lingkungan seperti Saum, Trem, monorel, *mass rapid trasport* (jaringan kereta bawah tanah).
 4. Bertambahnya sarana lahan parkir yang terus meningkat dengan implementasi kantong-kantong parkir yang terintegrasi dengan moda pendukungnya yang tersebar di seluruh kawasan strategis di Kota Balikpapan, untuk menghindarkan *parking on the street*.
 5. Berkurangnya titik genangan air melalui peningkatan sistim sarana prasarana drainase yang handal dalam rangka mengurangi titik-titik genangan maupun banjir yang terjadi di seluruh wilayah Kota Balikpapan, dengan intergrasi dan manajemen banjir melalui pengelolaan jaringan Bendali dalam masterplan drainsae dengan jaringan pendukungnya secara komprehensif.
 6. Peningkatan Prasarana dasar di Kawasan RSS yang meliputi sistem jaringan drainase, sanitasi sehat, dan jaringan jalan yang handal dan fasilitas pendukung lainnya yang dapat menciptakan rasa nyaman dan berorientasi pada lingkungan.
 7. Peningkatan penyediaan hunian yang berbasis hunian vertikal untuk pemenuhan kebutuhan perumahan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) untuk menghindarkan permukiman liar di daerah-daerah rawan

bencana di Kota Balikpapan melalui Program-program rusunawa dan rusunami yang ramah lingkungan dengan aplikasi *green buliding* yang dilaksanakan pemerintah Kota Balikpapan secara berkelanjutan.

8. Pencapaian standar mutu air baku sesuai dengan target dan pencapaian volume kapasitas sumber air baku melalui pemanfaatan sumber air bawah tanah sebagai sumber air baku pendukung selain air permukaan (waduk dan Bendali)
9. Pencapaian target dan wilayah cakupan distribusi air minum hingga ke seluruh wilayah Kota Balikpapan serta implementasi teknologi pengolahan air yang terdistribusi menjadi air bersih layak minum pada akhir periode RPJP.
10. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya energi secara efektif dan efisien melalui pengasaan dan penindakan terkait penambangan galian c secara liar.
11. Peningkatan pemanfaatan dan implementasi sumber daya energi terbarukan yang ramah lingkungan melalui diversifikasi energi listrik dari motor bakar menjadi energi listrik yang bersumber pada tenaga surya, tenaga angin dan sumber lain yang yang terbarukan dan ramah lingkungan pada instansi pemerintah Kota Balikpapan dan Instansi lain di Kota Balikpapan.
12. Menurunnya pelanggaran pemanfaatan ruang oleh stake holder.

Misi III : Mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan Lingkungan ;

Sasaran misi ketiga pada RPJMD Ke-4 ini adalah memanfaatkan tata kelola untuk mewujudkan Balikpapan menjadi Kota layak Huni yang berwawasan

lingkungan melalui sasaran pokok yang telah ditetapkan yang berorientasi pada lingkungan dan implementasi kebijakan yang pro lingkungan agar tercipta kenyamanan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Tercapainya tujuan Sanitasi Sehat adalah bagian dari sasaran pokok yang dituangkan melalui strategi menurunkan jumlah sampah yang terbangun ke TPA, yang mencerminkan kesadaran masyarakat dalam program 3R (reduce, reuse, recycling) yang telah dicanangkan pemerintah Kota Balikpapan dan menjadi isu *global warming*, menurunnya titik genangan yang tersebar di kawasan Kota Balikpapan merupakan bagian dari pengembangan sanitasi sehat, dan yang terakhir adalah peningkatan kapasitas IPAL dan sebaran IPAL di Kota Balikpapan sebagai bentuk sanitasi sehat pada sektor air limbah.
2. Mempertahankan pola ruang 52% Kawasan lindung dan 48% Kawasan Budidaya merupakan sasaran pokok yang implementasinya adalah manajemen kontrol kawasan berjalan efektif dengan kontrol dari pemerintah Kota agar dapat mempertahankan Pola ruang pola ruang 52% Kawasan lindung dan 48% Kawasan Budidaya sampai pada masa RPJP berakhir.
3. Menurunkan degradasi dan perubahan pemanfaatan lahan non budidaya menjadi kawasan budidaya yang sedikit banyak akan mempengaruhi proporsi pola ruang 52% Kawasan lindung dan 48% Kawasan Budidaya,
4. perluasan dan peningkatan kapasitas sistem ATCS dan ITC yang telah diimplementasikan untuk jaminan keamanan dan dan ketertiban dalam berlalulintas oleh masyarakat Kota Balikpapan.

Misi IV : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif

Sasaran pencapaian Misi Keempat pada Periode IV ini adalah mempertahankan dan memantapkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah berfokus pada perdagangan dan jasa, agribisnis, agroindustri, pariwisata, yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal, serta cluster usaha tingkat kelurahan/pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan prioritas pembangunan pada kondisi ini diharapkan sudah dapat dicapai dan berkembang seperti terjadinya kondisi perekonomian daerah yang mantap, tumbuh dengan signifikan berbasis struktur yang kuat, mantapnya kekuatan pelaku ekonomi kerakyatan yang sinergis dengan pelaku ekonomi kuat, serta meratanya pembangunan antar kawasan yang berbasis cluster usaha produktif. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi keempat pada tahap akhir RPJPD ini, ditetapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang diarahkan pada :

1. Membentuk dan memperkuat lembaga/usaha koperasi, ekonomi produktif, kreatif dan industri kecil serta kerajinan kreatif yang menghasilkan produk yang berkualitas, orisinal, dan berpotensi memperoleh hak paten dengan daya dukung kecukupan.
2. Membentuk perilaku petani yang dinamis, mandiri, berlandaskan pengembangan potensi sumber daya lokal daerah dan memantapkan kelembagaan yang berorientasi kemajuan, keuntungan dan modern.
3. Membentuk sistem jaringan informasi perdagangan, kemitraan, promosi, pemasaran pariwisata dan peningkatan investasi daerah.

4. Pemantapan sistem pendukung usaha bagi UMKM.
5. Terwujudnya penataan perdagangan dan jasa, sub-sistem agribisnis, agroindustri, ekowisata, dalam rangka peningkatan dan pengembangan pengolahan dan pemasaran produk pertanian serta pelayanan wisata secara optimal, efisien, mempunyai nilai tambah dan berdaya saing.
6. Mewadahi aspirasi dan peran perempuan dalam kegiatan sosial dan ekonomi dan terbentuknya kelompok kegiatan sosial dan ekonomi yang produktif dalam rangka meningkatkan dan pengembangan diri menuju kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan kawasan konservasi dan pemanfaatan potensi sumber daya lahan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Misi V : Mewujudkan Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik

Sasaran misi kelima pada tahap terakhir RPJPD ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat birokrasi, penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada kondisi ini pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip good governance and clean government sudah mantap dan sudah dapat dicapai sehingga KKN menjadi sangat minimal, kemudian kemampuan dan

kapasitas daerah juga semakin mantap sehingga pemerintahan mampu berjalan dengan efektif dan efisien, selanjutnya kondisi kerjasama dan networking juga semakin berkembang dan berdampak positif bagi kemajuan daerah. Kesemuanya berdampak kepuasan bagi masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Pada kondisi ini diharapkan terjadi pula kondisi demokrasi yang mantap didukung dengan konsistensi kebijakan reformasi pembangunan, makin matang dan mantapnya kepemimpinan kepala daerah, makin mantapnya supremasi hukum, dan berkurangnya kriminalitas, serta semakin mantapnya sistem kelembagaan pemerintahan dalam pemberian pelayanan pada daerah otonomi baru. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pertama ini pada tahap terakhir RPJPD ini, ditetapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang diarahkan pada :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata Pemerintahan yang baik (*good governance and clean government*) berorientasi pada masyarakat (*people center oriented*), selaras budaya setempat (*culturally appropriate*), berwawasan lingkungan (*environmentally sound*) dan tidak diskriminatif (*non discriminative*). Arah pembangunan yang perlu diwujudkan pada tahap ini adalah melakukan pembaharuan komitmen terhadap penegakan hukum yang berkeadilan atau tidak diskriminatif, pembenahan terhadap berbagai peraturan daerah guna menyesuaikan dengan perubahan hukum nasional, pementapan pelaksanaan desentralisasi, demokratisasi, penegakan supremasi hukum dan HAM serta mengatur peran serta masyarakat

dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan daerah sebagai salah satu upaya pencapaian tata pemerintahan yang baik, kredibel, transparan, dan akuntabel.

2. Terwujudnya kemampuan dan kapasitas daerah, jaringan kerjasama (networking) serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik yang efektif sehingga meningkatnya kepuasan pelayanan masyarakat yang diberikan pemerintah.
3. Menciptakan kondisi pemerintahan yang kondusif, aman, tertib dan tentram yang ditandai dengan berkurangnya angka kriminalitas serta membangun kapasitas kelembagaan sosial dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah menurut hukum atau secara musyawarah mufakat.
4. Mewujudkan konsistensi kebijakan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.



BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 adalah pedoman bagi Pemerintah Kota Balikpapan dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Bagi Pemerintah Kota Balikpapan, dokumen ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama periode tersebut. Bagi masyarakat dan *stakeholders*, dokumen ini menjadi pedoman dan rujukan dalam menyatukan gerakan dalam rangka membangun Kota Balikpapan.

Keberhasilan pencapaian pembangunan dapat dicapai apabila didukung dengan (a) Komitmen kepemimpinan daerah; (b) Konsistensi; (c) Kerja keras dan kesungguhan segenap aparat pemerintah; (d) Pelaksanaan *Good Governance*; (e) Keberpihakan kepada rakyat; (f) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta; (g) Kedisiplinan, ketertiban masyarakat, dan kehidupan bermasyarakat.

Kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Unsur pemerintah, masyarakat serta dunia usaha berkewajiban melaksanakan atau mendukung program-program dalam RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya;

2. Pemerintah Kota Balikpapan berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan tersebut;
3. Pemerintah Kota Balikpapan berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana tersebut;
4. Apabila dalam perjalanannya terjadi perubahan situasi dari keadaan normal pada saat RPJPD ini ditetapkan, yang bersifat memperlambat atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran 13 tahun ke depan, maka perubahan situasi tersebut tidak untuk mengubah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akan tetapi perubahan situasi tersebut hanya dapat memperlambat atau mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran. Implikasinya adalah memungkinkan adanya pergeseran target, tetapi masih dalam kerangka pencapaian tujuan semula.

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM

DAUD PIRADE